

MPR BERUPAYA MEREALISASIKAN HALUAN NEGARA PADA 2023

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR RUMAH KEBANGSAAN



MAJELIS



EDISI NO.05/TH.XV/MEI 2021

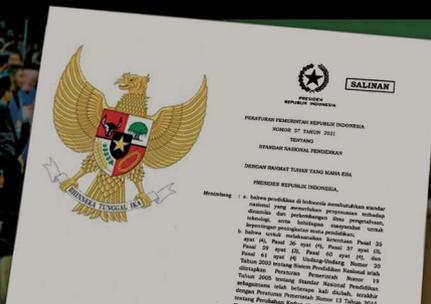


Revisi PP Nomor 57 Tahun 2021

URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA Masuk Kurikulum



ISSN 0854-6371
9 770854 637158



06 Refleksi
Biar Orang Muda Merdeka
dan Bersih dari Paham Radikal

21 Nasional
Bamsoet Terima
Dubes RI untuk Turki

39 Selingan
Sejarah Taman Mini
Indonesia Indah

60 Sosialisasi
Safari Ramadan Gus Jazil
Doa untuk KRI Nanggala 402



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

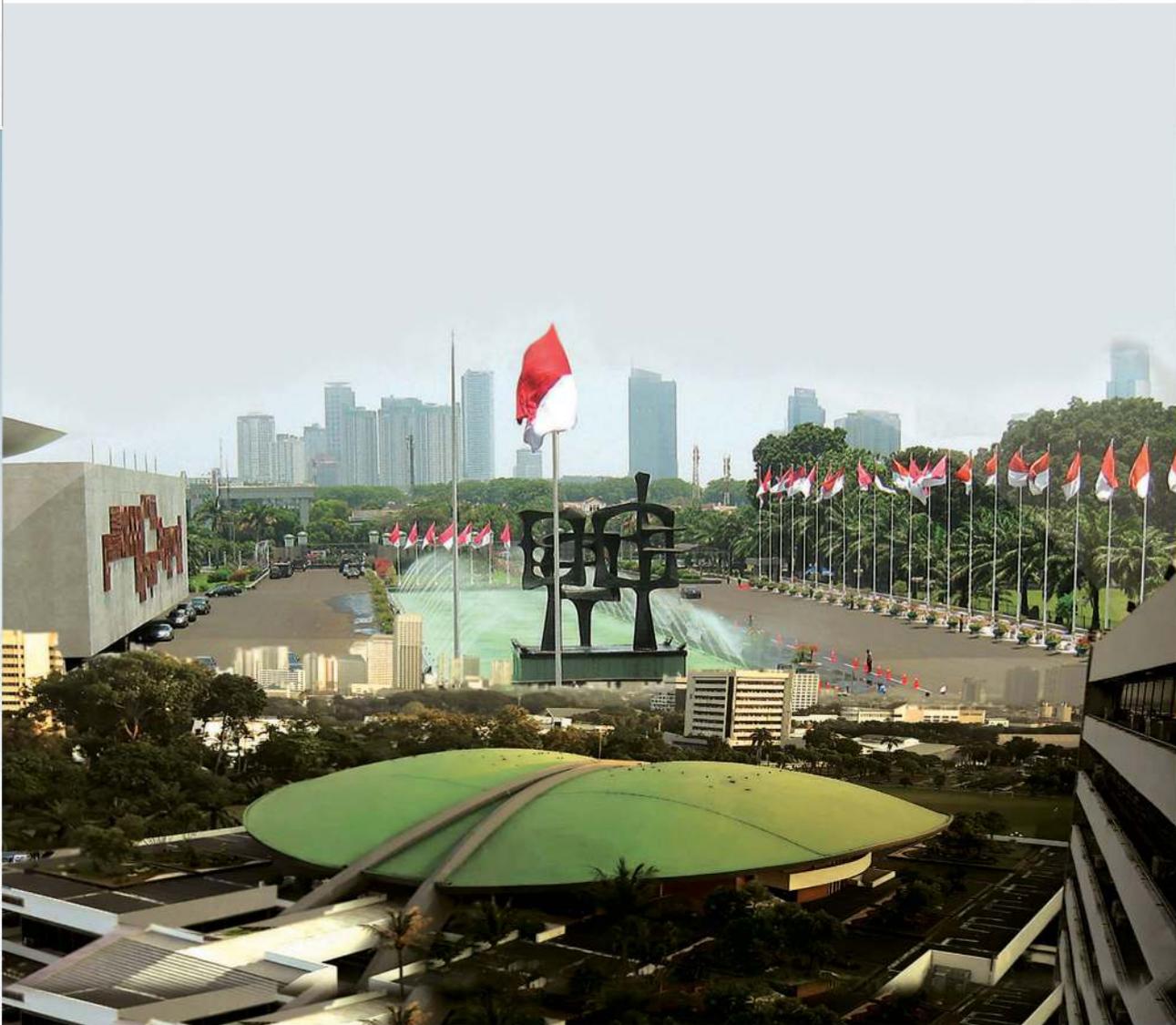


MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI, TAHUN 1945, NKRI, BHHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RIUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.05/TH.XV/MEI 2021



08 BERITA UTAMA

Urgensi Pendidikan Pancasila

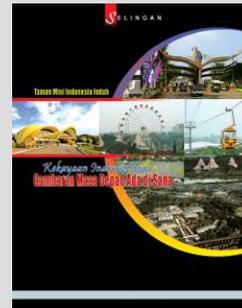
Pancasila sebagai ideologi bangsa harus ditempatkan pada kedudukan wajib diajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya dalam pendidikan. Karena dengan memahami nilai-nilai Pancasila kita sebagai warga negara mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat di tengah keheterogenitas suku, adat, budaya, dan bahasa.



16 Nasional
Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang



60 Sosialisasi
Doa Bersama untuk KRI Nanggala 402



39 SELINGAN
Taman Mini Indonesia Indah



76 Profil
Jon Erizal

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	26
Gema Pancasila	36
Aspirasi Masyarakat	47
Varia MPR	66
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Rehal	80
Dari Rumah Kebangsaan	82



COVER

Edisi No.05/TH.XV/Mei 2021
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatni

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

Pendidikan Pancasila, Mata Pelajaran Wajib di Sekolah

PRESIDEN Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada 30 Maret 2021. Sehari kemudian, Menkumham Yasonna Laoly mengundang PP itu dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Namun beleid baru pemerintah ini memancing reaksi negatif dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Pimpinan MPR. Pangkal muasal persoalannya adalah PP No. 57 Tahun 2021 itu tidak memuat pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi.

Akibat terbitnya PP itu, kritik deras mengalir ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Semua menyayangkan hilangnya pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib. Karena itu, muncul tuntutan dari berbagai kalangan, seperti Pimpinan MPR, pimpinan Ormas, anggota dewan, tokoh masyarakat, dan lainnya agar Kemendikbud merevisi PP No. 57 Tahun 2021 ini.

Kritik, masukan, dan tuntutan dari berbagai kalangan terkait PP No. 57 Tahun 2021 itu secara eksplisit memperlihatkan betapa pentingnya Pancasila diajarkan di sekolah. Sebagai catatan, sejak dulu, terutama pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Saat itu dikenal dengan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), kemudian berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun kata "Pancasila" kemudian hilang pada era reformasi, sehingga menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sejak diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pancasila sebagai mata pelajaran wajib pun mulai "menghilang".

Kini mulai dirasakan pentingnya pendidikan Pancasila kembali hadir sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini. Misalnya, sekarang Indonesia sedang menghadapi serbuan ideologi transnasional, seperti komunisme, ekstrimisme agama dengan cita-cita khilafahnya, dan liberalisme dengan individualisme dan juga pasar bebasnya.

Di sisi lain, pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila semakin merosot. Akibatnya, kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bhinneka, menghormati keragaman, toleran, gotong royong. Padahal Pancasila menempati fungsi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Karena itu, sesungguhnya pendidikan (sekolah) bisa menjadi wahana untuk ideologisasi atau menanamkan nilai-nilai Pancasila. Maka sangat tepat bila Pancasila sebagai ideologi bangsa ditempatkan pada kedudukan wajib diajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya melalui pendidikan.

Senyampang dengan revisi PP No. 57 Tahun 2021, kita bersyukur Mendikbud Nadiem Makarim setuju untuk memasukkan mata pelajaran Pancasila dalam revisi PP No. 57 Tahun 2021 dengan nama mata pelajaran "Pancasila dan Kewarganegaraan". Pancasila memang harus menjadi mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan. □

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

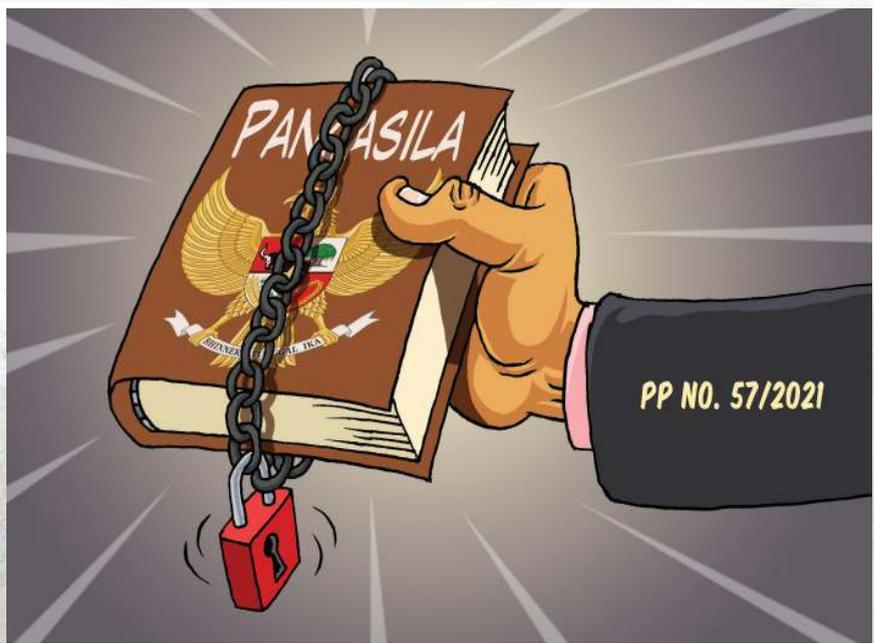
Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

INI BARU
INDONESIA



ILUSTRASI: SUSTANTO

Biarkan Orang Muda Merdeka dan Bersih dari Paham Radikal

AKSI orang muda dalam peristiwa bom bunuh diri di gerbang Katedral Makassar dan serangan di Mabes Polri Jakarta mengingatkan lagi tentang kewajiban, tugas, dan fungsi negara, orang tua dan komunitas pendidik melindungi anak serta remaja dari semua kemungkinan terpapar paham radikal. Ketika para penyesat berpenetrasi mencekoki paham radikal kepada anak dan remaja, negara dan semua komunitas seharusnya bergerak lebih cepat menangkal dan melindungi generasi muda.

Tidak sedikit orang tua maupun pemerhati terhenyak ketika menerima fakta bahwa dua aksi yang berujung pada kematian para pelaku itu dilakoni orang muda dalam kelompok usia generasi milenial. Lahir tahun 1995, penyerang Mabes Polri, ZA, serta bomber Makassar, pasangan L-YSF, masih dalam periode usia produktif. Mereka, dengan penuh kesadaran, tidak ingin meraih kehidupan hari esok yang lebih baik di dunia ini, karena tujuan hidup dan pola pikir mereka telah dijungkirbalikan oleh para penyesat. Mereka memilih mengakhiri hidup untuk alasan yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat orang kebanyakan. Namun, kendati tidak mengenal mereka secara personal, jutaan orang prihatin dengan pilihan jalan hidup ketiga orang muda itu.

Pilihan jalan hidup ZA serta L-YSF memberi gambaran tentang sebuah dinamika yang sangat kontras jika diperbandingkan dengan komunitas orang muda lain yang seusia dengan ketiganya. Ketika puluhan juta orang muda bergegas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang ditandai oleh proses transformasi digital saat ini, ketiganya memilih jalan yang berbeda. Pertanyaan yang patut dikemukakan adalah mengapa ketiganya sampai pada pilihan itu? Dan, masih ada berapa banyak lagi rekan ketiganya yang juga punya pilihan sama?

ZA dan pasangan L-YSF patut menjadi contoh kasus tentang sekumpulan orang muda yang belum mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, dari institusi agama dan dari sistem pendidikan. Karena tak terlindungi, ketiganya sejak remaja sudah masuk

perangkap penyesat yang mencekoki mereka dengan paham dan pandangan radikal, termasuk pandangan yang membenarkan aksi bunuh diri untuk mencelakai orang lain yang tak bersalah.

Kalau sekarang ini disinyalir tidak sedikit orang muda Indonesia yang sepaham dengan pilihan hidup ZA serta L-YSF, ini pun menjadi bukti kegagalan negara menangkal sepak terjang para penyesat yang muncul dan berbicara di hadapan banyak orang dengan label atau identitas guru agama maupun pendakwah. Sejumlah kalangan



menggambarkan betapa para penyesat telah melakukan penetrasi hingga ke pelosok negeri.

Di banyak forum keagamaan, para penyesat ini gencar menjungkirbalikan akal sehat orang muda dengan pandangan dan paham radikal, membangun kebencian pada siapa saja yang berbeda, dan terus menebar rasa permusuhan, termasuk dorongan untuk memusuhi negara dan bangsanya sendiri. Dan, yang memprihatinkan adalah penetrasi para penyesat ini bukan gejala atau kecenderungan baru, melainkan fakta yang sudah berlangsung

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



bertahun-tahun. Bahkan, tak jarang sangat terbuka sehingga sering di-viral-kan oleh warga-net.

Menghadapi kecenderungan seperti itu, negara terkesan pasif atau minimalis. Respons dari Institusi agama pun amat minim. Institusi pendidikan pun terlihat tak bisa berbuat banyak untuk melindungi orang-orang muda dari paham radikal. Akibatnya, memang sangat memprihatinkan. Kini, sebagian besar masyarakat hanya bisa kecewa pada sejumlah fakta yang tak terbantahkan. Sebab, sepak terjang para penyesat itu telah berbuah dan bertebaran di banyak tempat atau titik strategis. Beberapa penelitian mengungkap bahwa sejumlah kampus sudah terpapar paham radikal.

Pada 2018, Badan Intelijen Negara (BIN) juga mengungkap bahwa dari 100 rumah ibadah milik kementerian/lembaga serta BUMN, 41 rumah ibadah sudah terpapar paham radikal. Data BIN diperkuat oleh temuan GP Ansor tentang kecenderungan yang sama. Hasil investigasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2019 juga mengungkapkan bahwa sekitar dua juta pegawai BUMN berpotensi terpapar paham radikal.

Karena kecenderungan ini sudah menjadi pengetahuan umum, di ruang publik muncul pertanyaan; mengapa negara dan institusi agama tidak bertindak menghentikan aksi para penyesat? Pertanyaan ini tidak salah. Selain menjadi kewajiban negara dan institusi agama melindungi generasi muda agar terhindar dari paham radikal, negara dan institusi agama pun punya wewenang, undang-undang dan alat. Jika negara dan institusi agama tidak segera berinisiatif, para penyesat akan terus

merusak akal sehat orang muda, dan di waktu mendatang akan tampil penerus ZA serta L-YSF untuk beraksi lagi di tempat lain.

Langkah sigap Detasemen Khusus-88 Anti Teror Mabes Polri menyergap para terduga teroris layak diapresiasi. Namun, hasil kerja Densus-88 merupakan respons terhadap sebuah akibat, bukan terhadap sumber masalah. Sedangkan urgensi persoalannya adalah keleluasaan para penyesat mencekoki orang muda Indonesia dengan paham radikal. Para penyesat inilah yang seharusnya menerima respons tegas dari negara dan institusi agama.

Maka, selain mendorong Densus-88 terus mengintai para terduga teroris, negara dan institusi agama hendaknya mulai merumuskan kebijakan atau langkah-langkah untuk menghentikan sepak terjang para penyesat. Mengeliminasi sepak terjang para penyesat jauh lebih strategis.

Tidak boleh lagi ada ruang dan panggung bagi para penyesat. Jangan lagi ada pihak atau kelompok oportunist yang coba memberi pembenaran ketika para penyesat merusak dan menjungkirbalikan akal sehat orang muda Indonesia. Hanya negara bersama institusi agama yang berwenang dan bisa menghakimi sepak terjang para penyesat.

Manakala negara dan institusi agama berhasil mengeliminasi para penyesat, orang muda Indonesia dengan sendirinya dimerdekakan untuk bertumbuh dan berkembang, serta memilih jalan hidup seturut akal sehat masing-masing. Untuk itu, negara harus berbelas kasih dan all out. Jangan biarkan orang muda Indonesia terkungkung paham radikal yang diajarkan para penyesat. □

Revisi PP No. 57 Tahun 2021

Urgensi Pendidikan Pancasila Masuk Kurikulum



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pancasila sebagai ideologi bangsa harus ditempatkan pada kedudukan wajib diajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya dalam pendidikan. Karena dengan memahami nilai-nilai Pancasila kita sebagai warga negara mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat di tengah keheterogenitas suku, adat, budaya, dan bahasa.

PIMPINAN MPR RI bersuara sama. Mereka mengkritisi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 (PP No. 57 Tahun 2021) tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasalnya, PP No. 57 Tahun 2021 itu tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mata kuliah pendidikan tinggi. Mereka pun meminta pemerintah untuk merevisi PP No. 57 Tahun 2021 itu.

“Pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap PP No. 57 Tahun 2021. Mata pelajaran pendidikan Pancasila harus menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu, 17 April 2021.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berpendapat serupa. Menurut Basarah, seharusnya pemerintah tidak mengundangkan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah menghilangkan Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib. “Penerbitan PP ini seharusnya tidak perlu terjadi dan dapat dicegah,” katanya di Jakarta, Jumat, 16 April 2021.

Basarah mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebenarnya telah

memberikan perhatian besar terhadap upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan negara. Namun, tidak semua aparatur negara di internal pemerintahan memiliki kapasitas dan kesungguhan untuk dapat menerjemahkan kehendak presiden itu secara baik dan benar.

“Aparatur negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi di bidang pendidikan terkesan masih belum memiliki pandangan yang sama tentang arti penting Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi penerus bangsa,” katanya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan pemerintah yang telah menerbitkan PP No. 57 Tahun 2021 yang menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib untuk perguruan tinggi. Menurut Hidayat, PP itu sebagai bentuk berulangnya kecerobohan pemerintah dalam pembuatan peraturan. Sebelumnya, “frasa agama” telah hilang dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020 – 2035.

“Untuk mengakhiri polemik dan kegaduhan maka pemerintah harus segera mencabut dan mengevaluasi secara menyeluruh PP No. 57 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani Presiden dan diundangkan



oleh Menkum HAM,” tegasnya di Jakarta, Sabtu, 17 April 2021.

Pimpinan MPR lainnya, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat juga mendorong agar dilakukan perbaikan PP No. 57 Tahun 2021. Usulan perbaikan atau revisi yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera direalisasikan untuk menghentikan polemik terkait hilangnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional.

“Polemik yang terjadi terkait tidak adanya mata ajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional harus segera diakhiri dengan langkah-langkah konkret agar proses pendidikan nasional dapat berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 April 2021.

Apa yang menjadi penyebab polemik dari PP No. 57 Tahun 2021 sehingga banyak kalangan, termasuk Pimpinan MPR, mendesak kepada pemerintah— melalui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)— untuk segera merevisi peraturan pemerintah itu?

Berawal terbitnya PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kemudian mengundang PP tersebut pada 31 Maret 2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. PP ini dimaksudkan sebagai alas untuk assessment pendidikan nasional pada September 2021 yang berlaku untuk semua jalur pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal di pusat maupun daerah.

“Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) PP tersebut.

Pada pasal 40 ayat (3) dari PP No. 57

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dari kurikulum pendidikan tinggi. Adapun bunyi pasal 40 ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa

Di sinilah pokok pangkal persoalannya. Mengapa? Aturan dalam pasal 40 ayat (3) PP itu bertentangan dengan Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ini bunyi Pasal 35 UU Pendidikan Tinggi: Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: (a). agama; (b). Pancasila; (c). kewarganegaraan; dan (d). Bahasa Indonesia.

Jadi, PP No. 57 Tahun 2021 telah menyimpang dari isi UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut. Hal itu berarti mengandung ketidakabsahan hukum, karena PP. 57 Tahun 2021 tersebut bertentangan norma di atasnya secara nyata. Wajar jika

terjadi polemik di masyarakat terkait PP ini. PP No. 57 Tahun 2021 ini memancing banyak diskusi di media sosial dan media massa. Hampir semua diskursus tentang PP No. 57 Tahun 2021 bernada desakan untuk merevisi peraturan pemerintah itu.

Urgensi Pendidikan Pancasila

Ketika pendidikan Pancasila hilang dalam PP No. 57 Tahun 2021 maka banyak kalangan mulai angkat suara, mulai dari Pimpinan MPR, pimpinan Ormas (NU dan Muhammadiyah, serta ormas lainnya), tokoh masyarakat, dan anggota dewan. Ini menunjukkan adanya keinginan agar pendidikan Pancasila menjadi sesuatu yang penting dan urgent untuk diajarkan kepada para siswa dan mahasiswa.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila itu. “Mata pelajaran pendidikan Pancasila harus menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Hilangnya mata pelajaran pendidikan Pancasila sejak diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah merapuhkan pondasi bangsa, akibat ketidakpahaman generasi bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Pada waktu lalu, terutama pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila telah menjadi pelajaran wajib (lihat bagian kedua, “Pasang Surut Pendidikan Pancasila”). Hal ini tidak lepas dari peran MPR RI melalui Ketetapan MPR Tahun 1973 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. “MPR RI saat ini tengah mendorong agar pendidikan Pancasila kembali menjadi mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan. Tanpa pemahaman ideologi, bangsa kita tidak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera,” tegas Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan data hasil survei LSI tahun 2018 bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10%. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2% dan hingga 2018 angkanya turun menjadi 75,3%.

Sementara, survei yang dilakukan pada



Syaiful Huda

akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61% responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

“Seiring cepatnya laju roda zaman dan lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang dibungkus dalam bingkai modernitas, tantangan merawat dan menjaga Pancasila semakin nyata. Bila kita lalai dan abai, nilai-nilai asing yang masuk dengan deras ke Indonesia pada akhirnya akan merongrong jati diri, tradisi dan budaya, moralitas, serta warisan kearifan lokal bangsa,” jelas Bamsoet.

Ahmad Basarah juga menekankan pentingnya pendidikan Pancasila. Menurut Basarah, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan maha berat terkait serbuan ideologi transnasional, seperti komunisme, ekstrimisme agama dengan cita-cita khilafahnya, dan liberalisme dengan individualisme dan juga pasar bebasnya.

“Berbagai survei menunjukkan makin merosotnya pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila. Hal ini tentu semakin mengkhawatirkan apabila pelajaran Pancasila dihilangkan dalam pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Tak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi

PKB Syaiful Huda juga menyatakan, Pancasila yang diwariskan para pendiri bangsa menjadi alat pengikat bagi bangsa Indonesia dalam menyatukan cara pandang yang sangat beragam dengan berbagai perbedaan. Dan, menyatukan cara pandang berbangsa dan bernegara itu melalui pendidikan.

“Cara terbaik yang diterapkan oleh pemerintah dalam menyatukan pandangan warga negaranya dalam berbangsa dan bernegara adalah melalui pendidikan. Sebab, selain sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan pengajaran akhlak, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk ideologisasi (menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila),” kata Syaiful Huda kepada *Majelis*.

Untuk itu, Syaiful Huda menyarankan, pendidikan Pancasila harus dimulai sejak dini selaras dengan pendidikan agama, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. “Pancasila sebagai ideologi bangsa harus ditempatkan pada kedudukan wajib diajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya dalam pendidikan. Karena dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita sebagai warga negara mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat di tengah keheterogenitas suku, adat, budaya, dan bahasa,” papar Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan.

Syaiful menambahkan, nilai-nilai Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa, memunculkan sikap pluralisme dan gotong royong. Nilai-nilai dasar ini sebagai bekal bangsa kita untuk tidak mudah menerima paham dari luar. “Sudah saatnya kita memikirkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengajar Pancasila dengan berbagai treatment. Jika setiap pengajar mata pelajaran Pancasila memiliki kualitas yang baik maka mereka menjadi kepanjangan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai (silasila Pancasila) dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira mengungkapkan, Komisi X DPR sering mendapat kritik karena masyarakat melihat dan merasakan pentingnya mata pelajaran Pancasila di bangku sekolah dasar dan menengah sebagai pembentukan karakter bangsa Indonesia. “Kita merasakan

bahwa sejak reformasi kita maju dalam aspek kebebasan (freedom) sebagai satu pilar demokrasi, tapi di sisi lain kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bhinneka yang menghormati keragaman, toleran, gotong royong,” ujarnya kepada *Majelis*.

Andreas mengharapkan, kehadiran kembali mata pelajaran Pancasila dalam standar pendidikan nasional akan menjadi peletak dasar pembentukan kembali karakter masyarakat bangsa yang Pancasila-lais, yang menghormati kemajuan, toleransi, dan gotong royong. “Pendidikan Pancasila ini penting. Bahkan sangat penting karena dari mata pelajaran Pancasila maka para siswa mendapat materi menyangkut nilai-nilai dalam pembentukan karakter pribadi,” tutur anggota Komisi X DPR ini.

Pada gilirannya, lanjut Andreas, karakter pribadi menjadi karakter kolektif kita sebagai bangsa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bukan nilai-nilai atau isme yang bertentangan dengan Pancasila. “Dengan pemahaman yang benar tentang Pancasila, sekaligus menjadi filter dan pembendungan terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila,” katanya.

Revisi PP No. 57 Tahun 2021

Pada Selasa, 20 April 2021, berlangsung pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dan didampingi Kepala BPIP, Yudian Wahyudi. Turut hadir dalam pertemuan di Kediaman Ibu Megawati Jl. Teuku



Andreas Pareira

Umar Nomor 27 Menteng Jakarta Pusat itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pertemuan itu dalam rangka membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia. Pancasila menempati fungsi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai

bangsa Indonesia. “Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia sehingga mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang,” kata Megawati.

Mendikbud Nadiem menyatakan, setuju untuk merevisi PP No. 57 Tahun 2021 dengan memasukkan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional. “Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukkan dalam revisi PP No. 57 Tahun 2021 dengan nama mata pelajaran ‘Pancasila dan Kewarganegaraan’,” katanya.

Sebenarnya, beberapa hari sebelum pertemuan di Kediaman Megawati, Mendikbud Nadiem Makarim sudah mengajukan Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Surat bernomor 25059/MpK.A/HK.01,01/2021 tertanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam surat tersebut, Nadiem mendorong perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi. Pengajuan revisi aturan tersebut akan merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Nadiem menyampaikan dua poin pertimbangan revisi yang harus dilakukan. Pertama, dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Kedua, ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diharmoniskan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi. Pokok perubahan yang diajukan mencakup penambahan norma mengenai Pancasila menjadi salah satu muatan wajib dalam kurikulum. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DER/EFP/BSC

Pasang Surut Pendidikan Pancasila di Indonesia

Saat ini muncul perbincangan untuk menambahkan kata Pancasila ke mata pelajaran PkN sehingga kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Salah satu alasannya adalah nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik sudah mulai luntur.



Presiden Soekarno



Presiden Soeharto

SEBENARNYA, sejak dulu Pancasila memang tidak dikenal sebagai satu mata pelajaran spesifik yang berdiri sendiri. Dalam dunia pendidikan, materi Pancasila lebih dekat dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (civics education). Pendidikan kewarganegaraan (civics education) ini diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1970 di Amerika Serikat. Saat itu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah agar warga Amerika Serikat memiliki satu identitas sebagai bangsa Amerika, karena negara itu memiliki keragaman suku bangsa yang berasal dari banyak negara di dunia yang datang ke Amerika.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang lebih dikenal dengan istilah Civics dimulai pada 1957 saat pemerintahan Soekarno. Saat itu pendidikan kewarganegaraan hanya membahas materi tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Pada 1962, materi Civics masuk dalam kurikulum SMP dan SMA. Materi pelajaran Civics lebih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, dan pidato-pidato politik kenegaraan yang dikemas dalam "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi". Isi dari "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" adalah pidato-pidato politik kenegaraan Presiden Soekarno ditambah dengan Manifesto Politik (Manipol) dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin,

Kepribadian Indonesia (USDEK).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, bahan-bahan pelajaran yang bersifat indoktrinasi tersebut dibuang dan dihilangkan sama sekali. Pada 1968, penerapan Civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah kemudian berganti nama menjadi pendidikan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum 1968, istilah Civics dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara bertukar pakai (interchangeably). Dalam kurikulum SMP Tahun 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan

Negara yang dipakai sebagai mata pelajaran. Materi mata pelajaran ini mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan Civics (yang diterjemahkan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara).

Tujuan diajarkannya Pendidikan Kewargaan Negara adalah agar tiap-tiap warga negara Indonesia berkewajiban mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta merealisasikan isi dan jiwa UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPRS. Dengan kata lain, mata pelajaran Kewargaan Negara tidak saja wajib dipelajari, tetapi juga merupakan bentuk sikap hidup.

Pada kurikulum 1975, istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap MPR IV/MPR/1973. Materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Mata pelajaran PMP merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Pada 1976, mata pelajaran PMP mulai diajarkan untuk pertamakali di sekolah menggantikan pelajaran Kewargaan Negara.

Tahun 1979, Presiden Soeharto membentuk sebuah lembaga yang secara khusus mengkaji nilai-nilai Pancasila (BP7) dan merumuskan program nasional P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

PELAJARAN KEWARGANEGARAAN ERA SOEKARNO

1950
Civics (Ilmu Kewarganegaraan) pertama kali diajarkan untuk jenjang pendidikan setingkat SMA

Materi yang diberikan meliputi:
Hak & Kewajiban Warga Negara,
Sejarah Kebangkitan Nasional,
Pancasila, & UUD

Pelajaran Civics juga dipakai untuk memberi penjelasan tentang tulisan & pidato kenegaraan Soekarno selama masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Buku pegangan resminya yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (1960) dilarang dipakai pada tahun-tahun awal Orde Baru



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kendati P4 dinilai sebagai proyek hegemoni pemerintah terhadap masyarakat, harus diakui program tersebut berhasil dengan baik. Nilai-nilai Pancasila berhasil merasuk dalam jiwa seluruh warga negara Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dedikbud) pada waktu itu telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (Dikbud, 1982). Beberapa hal penting dalam penjelasan itu, antara lain Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional dikenal dengan adanya Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Sebab, Tap MPR No. II/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, maka dijadikan sumber dan tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal.

Mata pelajaran PMP ini terus diper-tahankan, baik istilah maupun isinya, sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum

1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada value in-culcation dengan muatan nilai-nilai Panca-sila dan UUD 1945. Artinya, bidang studi PMP merupakan bahan-bahan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan kebijakan politik di Indonesia, karena berbagai perubahan dan pertimbangan, serta sejalan dengan disusunnya kurikulum sekolah tahun 1994, mata pelajaran PMP diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan ini terutama didasarkan pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 UU itu disebutkan bahwa "isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: a. Pendidikan Pancasila; b. Pendidikan Agama; dan c. Pendidikan Kewarganegaraan.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum PPKn tahun 1994 menggunakan pengorganisasian materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P4 dan sumber resmi lainnya. Mata pelajaran Pancasila dan Sejarah digabungkan menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Maka, dengan penggabungan itu, muatan masing-masing menjadi sangat

berkurang. Inilah titik awal memudarnya nilai-nilai moral di kalangan anak didik. Dampaknya mulai terasa saat ini. Sebagai sebuah proses, dampak pendidikan, baik positif maupun negatif, baru akan tampak beberapa tahun kemudian.

Seiring dengan tumbuhnya iklim demokratis yang berkembang pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru maka tuntutan untuk mereformasi pendidikan Pancasila yang dianggap buah Orde Baru tak terelakan. Hasilnya, pada 2001 mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diganti menjadi mata pelajaran Kewarganegaraan tanpa Pancasila atau menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Perubahan ini dituangkan dalam Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006 yang mengubah istilah PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), hakikat pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Hal ini diperlukan supaya warga negara memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air, serta memiliki watak, sifat, dan karakter yang sesuai dengan Pancasila. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali siswa agar bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara maupun sesama manusia.

Setelah kata "Pancasila" hilang dari mata pelajaran di sekolah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam UU tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan.

Saat ini muncul perdebatan dan per-bincangan untuk menambahkan kembali kata Pancasila ke mata pelajaran PKn sehingga menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarga-negaraan (PPKn) kembali. Salah satu alasannya adalah nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik sudah mulai luntur sehingga perlu nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima perlu diinternali-sasikan kembali kepada semua siswa. □

BSC (dari berbagai sumber)

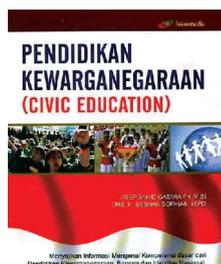




FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. Wakil Ketua MPR RI

Saya Apresiasi Respon Cepat Kemendikbud

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengajukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 57 ini sebagai persiapan assesmen nasional yang akan dilakukan pada September 2021. Sebelumnya, PP itu telah menghilangkan mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dari kurikulum wajib. Tentu saja, PP itu menimbulkan kontroversi sehingga muncul desakan agar segera direvisi.

PP yang tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan itu disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021. Menkumham Yasonna Laoly kemudian mengundang PP itu pada 31 Maret 2021. Pemerintah menggunakan SNP itu untuk jalur pendidikan formal hingga non-formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 40 ayat 3 PP ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam SNP pada kurikulum pendidikan tinggi.

Untuk membahas seputar kontroversi PP

ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. Berikut petikan wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Kemendikbud akhirnya mengajukan revisi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan setelah mendapat kritik dari berbagai elemen masyarakat. Karena PP itu tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran/mata kuliah wajib. Apa tanggapan Bapak?

Sejak PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menghilangkan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia ramai diperbincangkan, saya sudah menyampaikan pendapat. Saya sudah mempertanyakan kenapa hal itu (hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP itu) bisa terjadi. Sungguh sangat disayangkan. Dan, ternyata, bukan hanya saya, tapi juga anggota masyarakat dan tokoh nasional mempertanyakan hal yang sama. Saya kira hal itu bagus untuk mengingatkan pemerintah.

Dan, Alhamdulillah, pemerintah melalui

Kemendikbud akhirnya mendengarkan keresahan yang terjadi di masyarakat. Kemendikbud akhirnya mengajukan revisi PP tersebut. Tentu saya sangat mengapresiasi respon cepat dari Kemendikbud atas masukan dan kritik dari masyarakat.

Kemendikbud (Mendikbud Nadiem Makarim) menyebutkan Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak menjadi pelajaran wajib karena tidak tercantum dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebaliknya UU tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Kedua UU itu tidak sinkron. Apa tanggapan Bapak?

Seharusnya tim penyusun itu mengetahui dan memahami bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia adalah dua hal penting untuk bangsa ini, apalagi untuk generasi muda bangsa. Dalam menyusun PP itu semestinya merujuk kepada UU Pendidikan Tinggi. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa Pancasila malah tidak ada, demikian juga Bahasa Indonesia hilang? Saya rasa pemerintah mesti mengevaluasi tim penyusun PP itu. Sebab kesalahan seperti itu,

menurut saya, termasuk fatal untuk dunia pendidikan Indonesia

Apakah UU tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu direvisi dengan mencantumkan secara eksplisit tentang pendidikan Pancasila dalam kurikulum?

Saya rasa tidak dicantumkannya secara eksplisit Pancasila dalam UU Sisdiknas itu harus menjadi bahan kajian. Mengapa hal sepeenting itu bisa tidak masuk dalam UU? Menurut saya, pelajaran Pancasila harus masuk dalam sistem pendidikan nasional. Ingat, pada era seperti sekarang ini masyarakat dan bangsa Indonesia mengalami banyak peristiwa yang sangat memprihatinkan, seperti masuknya paham radikalisme hingga munculnya aksi teror di

menerima segala perbedaan yang ada. Perbedaan menjadi kekayaan bangsa ini, bukan untuk diperdebatkan apalagi dipermasalahakan hingga menimbulkan konflik di masyarakat. Itu intinya.

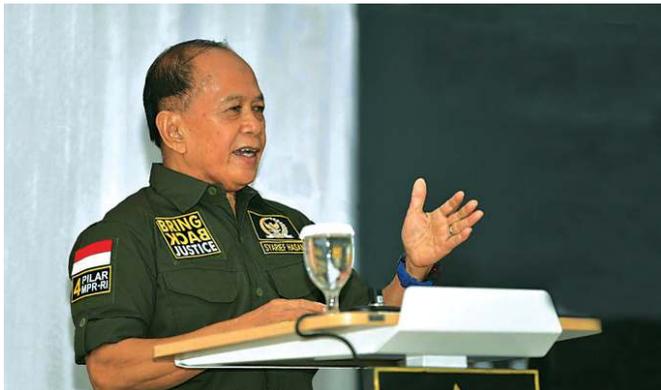
Dan, betul sekali bahwa pemahaman Pancasila yang baik dan benar serta implementasinya akan bisa menangkal paham-paham radikalisme. Sebab, dalam Pancasila diajarkan tentang saling toleransi dan saling menghormati antarsesama.

Kita sudah memiliki BPIP, badan semacam BP7 pada masa Orde Baru. Perlukah dihidupkan kembali Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) dengan metode yang bukan indoktrinasi?

Saya rasa begini, mungkin metode yang

MPR, salah satunya adalah Pancasila. Bagaimana menurut Bapak efektivitas dari sosialisasi ini?

Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) adalah salah satu upaya memberikan pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai luhur bangsa, di antaranya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Saya rasa dalam pelaksanaan selama ini, sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan pimpinan dan anggota MPR sangat efektif. Sebab, sosialisasi Empat Pilar MPR ini menasar seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi dilakukan dengan metode dan bahasa, serta cara penyampaian dan materi yang disesuaikan agar mudah diterima dan diimple-



berbagai tempat. Juga kekerasan yang terjadi di Papua yang dilakukan oleh teroris di sana atau KKB. Hal itu harus diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik.

Menurut Bapak seberapa penting dan urgent Pancasila menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia? Apakah pendidikan Pancasila di sekolah sebagai salah satu upaya menangkal paham-paham lain, seperti radikalisme?

Begini ya, Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara kita Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang pada dasarnya mengikat bangsa ini yang memiliki keragaman dan berbeda-beda. Bangsa kita yang beragam sangat berpotensi mengalami perdebatan sampai konflik karena perbedaan itu. Nah Pancasila sudah terbukti mampu mengikat semua, menyatukan semua untuk

sekarang tidak sama metode seperti zaman Orde Baru. Meski mempunyai metode yang berbeda, tapi semangatnya yang mesti diambil adalah sosialisasi pemahaman Pancasila. Metode sosialisasi Pancasila bisa bermacam bentuk dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi generasi muda milenial sekarang sangat familiar dengan teknologi informasi seperti gadget.

Jadi, saya setuju metode pemahaman Pancasila jangan lagi melalui cara indoktrinasi, tapi pemahaman yang mampu dicerna oleh generasi muda atau kalangan milenial. Mereka harus bisa mencerna dan memahami bahwa Pancasila adalah sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah benteng dari segala macam paham yang bertujuan merusak persatuan bangsa.

Anggota MPR sendiri mempunyai tugas menyosialisasikan Empat Pilar

mentasikan.

Metode sosialisasi pun dilakukan dengan bermacam-macam cara, mulai dari kegiatan serap aspirasi, seminar, focus group discussion, diskusi tanya jawab, berbagai lomba seputar kebangsaan. Saya rasa sekarang ini sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan sudah sangat bagus. Ke depan perlu ditingkatkan kualitasnya lagi. Dan, satu hal lagi, semua upaya yang dilakukan MPR ini akan percuma tanpa respon yang baik dari masyarakat sendiri.

Selain itu, setiap warga masyarakat juga mesti menyadari bahwa Pancasila adalah bagian dari jati diri bangsa. Kesadaran untuk menggali dan memahami kembali Pancasila pada diri seluruh anak bangsa akan meminimalisir pengaruh negative, seperti berbagai paham radikal dan berbagai potensi hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. □

Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang

MPR Berupaya Merealisasikan Haluan Negara pada 2023



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Di depan pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah berharap, amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dengan agenda memasukkan kewenangan MPR dalam menetapkan Haluan Negara berlangsung sekitar awal 2022 atau awal 2023.

WAKIL Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah mengungkapkan, MPR sedang mengupayakan untuk merealisasikan hadirnya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 paling sekitar akhir 2022 atau awal 2023. Jika terealisasi PPHN ini akan menjadi panduan dalam pembentukan dan penyampaian visi, misi, dan program para calon presiden dan kepala daerah pada tahun 2024.

“MPR sedang mengupayakan perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk memasukkan kewenangan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara,” kata Ahmad Basarah di depan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (30/4/2020). Pada kesempatan itu, Ahmad Basarah menyampaikan presentasi tentang Penguatan Ideologi Pancasila untuk Menjalankan Tugas-Kedewanan.

Menurut Ahmad Basarah, jika perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 ini bisa disahkan sebelum Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak tahun 2024 maka para calon presiden dan calon kepala daerah tidak

lagi membuat visi misi berdasarkan orientasi elektoral individual, tetapi berdasarkan PPHN sebagai panduannya.

“Dengan sistem pemilu saat ini, para calon presiden dan calon kepala daerah membuat visi misi yang berorientasi electoral. Pokoknya bagaimana massa pemilih tertarik dengan visi misi dan program mereka. Visi misi mereka buat untuk membujuk pemilih bukan berdasarkan pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat secara menengah dan jangka panjang serta kesinambungannya,” jelasnya.

Ahmad Basarah menambahkan, upaya menghadirkan PPHN dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia sudah menjadi agenda MPR sejak lama. Secara resmi MPR mengeluarkan Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rekomendasi MPR RI periode 2009-2014. Salah satu rekomendasinya adalah reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Rekomendasi MPR periode 2009-2014 itu ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019 dengan membentuk dua panitia ad Hoc (PAH) pada 2018. PAH pertama untuk Haluan Negara diketuai Ahmad Basarah, dan PAH



kedua untuk perubahan Tatib MPR yang diketuai Rambe Kamaruzzaman.

Visi misi dan program, lanjut Ahmad Basarah, seharusnya menggambarkan visi misi para pendiri bangsa yang dirancang untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan calon presiden dan calon kepala daerah.

“Ke depan kita berharap, Pokok Pokok Haluan Negara bisa terwujud dan dirancang secara gotong royong dan diproyeksikan untuk membangun Indonesia secara berkesinambungan,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR ini.

“Kita tidak ingin ganti presiden ganti kebijakan. Itu yang terjadi kalau kita tidak

mempunyai haluan negara dan haluan pembangunan nasional. Kita tidak mau jalannya pembangunan seperti tari Poco Poco, maju dua langkah, mundur dua langkah,” sambungnya.

Karena itu, lanjut Ahmad Basarah, jika perubahan UUD NRI Tahun 1945 disetujui maka MPR bisa melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. “Maka kita bisa merancang bangsa ini jauh ke depan. Siapa pun yang menjadi presiden dia akan melanjutkan pembangunan sesuai haluan negara,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Kartika dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan DPRD Kota Malang ini dalam rangka kegiatan konsultasi dan koordinasi untuk peningkatan anggota DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan. “Ini akan mewujudkan sinergi antara DPRD Kota Malang dan MPR RI,” ujarnya. □

Webinar Hari Kartini

Kesetaraan Gender untuk Kehidupan Berbangsa Lebih Baik

Hingga saat ini pandangan bahwa perempuan tidak setara dengan pria masih saja tumbuh di masyarakat. Perempuan masih saja dianggap sebagai objek.



KESETARAAN gender yang diperjuangkan di era Kartini hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi perempuan dunia, termasuk di Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik.

“Pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) no 5 masih memuat isu kesetaraan gender untuk segera direalisasikan dan Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sudah mengamanatkan untuk mewujudkan itu,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci dalam webinar peringatan Hari Kartini yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Jumat (23/4/2021).

Hadir dalam webinar yang bertema: ‘Buah Pikiran RA Kartini Mewujudkan Perempuan Indonesia Bermartabat Menuju Indonesia Maju,’ itu antara lain: Ketua Umum Kowani, Giwo Rubiyanto Wiyogo; Dirjen Kebudayaan,

an, Kemendikbud RI, Hilmar Farid; dan Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat PIKAT, Jeanette Rondonuwu SIBY, sebagai narasumber.

Menurut Lestari, dengan adanya perangkat aturan yang menegaskan hal itu, para pemangku kepentingan seharusnya berkewajiban untuk mewujudkan sejumlah tujuan pembangunan tersebut, agar tercipta kehidupan berbangsa yang lebih baik.

Secara jelas, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tujuan pembangunan berkelanjutan atau sering disebut SDGs (Sustainable Development Goals) nomor 5 mencanangkan untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Selain itu, ujar Rerie, juga menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.

Semangat mewujudkan kesetaraan gen-

der, tambah Rerie, sudah tercermin dari surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda pada 1901, seperti dikutip pada Buku Emansipasi: Surat-Surat Kepada Bangsaanya,..”Usaha kami mempunyai dua tujuan, yaitu turut berusaha memajukan bangsa kami dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia.”

Namun, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, hingga saat ini pandangan bahwa perempuan tidak setara dengan pria masih saja tumbuh di masyarakat. Perempuan masih saja dianggap sebagai objek. Pada saat pandemi Covid-19, perempuan dan anak malah menjadi korban kekerasan, baik fisik hingga verbal.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2020 tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kondisi tersebut, menurut Rerie, membutuhkan kehadiran negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi korban kekerasan, lewat perangkat hukum yang benar-benar bisa memberikan rasa aman terhadap seluruh warga negara, termasuk perempuan dan anak.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Kowani, Giwo Rubiyanto Wiyogo menyayangkan masih relatif sedikitnya perempuan yang diakui sebagai pahlawan nasional. Hingga saat ini, ujar Giwo, baru 15 perempuan yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Karena itu, Giwo dan jajaran Kowani se Indonesia bertekad untuk mengawal proses pengajuan Ratu Kalinyamat dari Jepara yang saat ini sedang diinisiasi oleh Yayasan Dharma Bakti Lestari, untuk menjadi pahlawan nasional. □

FGD Tim Pengkaji Kemenko Polhukam

HNW Minta UU ITE Segera Direvisi

Hingga saat ini pandangan bahwa perempuan tidak setara dengan pria masih saja tumbuh di masyarakat. Perempuan masih saja dianggap sebagai objek.

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, dalam siaran persnya, Kamis (18/3/2021), menegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu segera direvisi. Usai berbicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Tim Pengkaji UU ITE Kemenkopolhukam, Hidayat Nur Wahid mencatat ada beberapa pasal dalam UU ITE itu yang multitafsir dan terkesan tidak adil, sehingga perlu segera direvisi.

Selain HNW—sapaan Hidayat Nur Wahid— hadir pula dalam acara FGD terkait dengan implementasi dan revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) itu adalah Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin.

Terkait penerapan UU ITE, HNW menyebut beberapa pasal dalam UU itu yang multitafsir dan terkesan tidak adil, di antaranya pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 29, dan pasal 45A. “Ketentuan-ketentuan bersifat karet inilah yang kerap digunakan untuk menjerat pihak yang kritis, seperti aktivis, jurnalis ataupun lawan politik. Inilah yang menjadi momok bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat rakyat saat ini,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini berharap, pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk menginisiasi revisi UU ITE ini, dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Langkah ini, menurut HNW, akan lebih efektif dan efisien karena pemerintah memiliki hak dan kewenangan konstitusional, apalagi UU ITE ini sejak awal juga adalah usulan dari pemerintah.

Apalagi, katanya lebih lanjut, pemerintah juga mempunyai dukungan koalisi politik yang sangat dominan di DPR, sehingga akan lebih



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mempermudah realisasi dari keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE. Sebelumnya, menurut HNW, fraksi PKS berulang kali mengusulkan untuk merevisi UU ITE ini, tetapi belum ada dukungan di DPR.

Revisi UU ITE, kata HNW, juga bisa dijadikan momentum bagi negara untuk hadir menertibkan buzzer-buzzer di media sosial yang telah memperdalam perpecahan bangsa Indonesia, suatu tindakan yang sangat tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kelompok buzzer yang dimaksud adalah mereka yang secara terorganisir menyerang seseorang atau organisasi lain dengan cara menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik hingga melakukan cyber bullying.

“Ini yang akhirnya menjadi salah satu sebab pembelahan masyarakat yang semakin dalam pasca Pilpres. Dan, kemudian menghadirkan rasa ketidakadilan hukum, karena penindakan hukum yang tidak melaksanakan prinsip dasar sebagai negara hukum, yaitu: equality before the law,” ujarnya. Uniknya, lanjut HNW, mereka justru seakan tidak pernah tersentuh hukum.

“Sudah banyak laporan polisi terhadap para tokoh buzzer ini, tetapi belum terlihat ada proses hukumnya, membuat masyarakat menilai bahwa UU ITE ini seperti hanya digunakan untuk menjerat salah satu kubu tertentu,” paparnya.

Melihat pentingnya revisi UU ITE, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah harus cepat menginisiasinya, sebab dukungan akan lebih mudah didapat. Ini terbukti dengan pembuatan UU Cipta Kerja yang sangat cepat prosesnya. Jika UU Cipta Kerja yang sangat banyak pasalnya bisa selesai dalam waktu singkat, maka tentunya revisi UU ITE yang hanya fokus kepada beberapa pasal saja, bisa lebih cepat lagi.

“Presiden Jokowi mesti benar-benar berkomitmen menjawab kegunaan publik dengan merealisasikan komitmennya untuk merevisi UU ITE agar hadir keadilan hukum, mengoreksi kecemasan publik, dan agar rakyat tidak menilai pernyataan Presiden Jokowi soal revisi UU ITE sebagai PHP saja,” pungkasnya. □

Sound of Borobudur

Gerakan Meningkatkan Kepedulian Warisan Budaya

Gerakan masyarakat diperlukan untuk membentuk kepedulian terhadap nilai-nilai warisan budaya yang dimiliki bangsa.



“SOUND OF BOROBUDUR harus digaungkan untuk mengangkat berbagai nilai peradaban masa lalu yang memperkaya nilai-nilai kebangsaan yang kita pahami saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menerima Purwacaraka dan Trie Utami penggagas Sound of Borobudur di rumah dinas di Jl. Denpasar No. 12, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/4).

Pada kesempatan itu, hadir pula anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan dari Fraksi NasDem, Direktur Pemberitaan Metro TV, Arief Suditomo, dan Dewan Pengarah Dewan Redaksi Media Group, Saur Hutabarat.

Menurut Lestari, lewat interpretasi dalam bentuk replika alat-alat musik yang merupakan bagian dari relief Borobudur dan memainkannya, kita bisa membangun kepedulian anak bangsa terhadap kekayaan peradaban nusantara yang kita miliki.

Sound of Borobudur merupakan kreasi sejumlah seniman musik nasional yang terinspirasi dari relief di dinding Candi

Borobudur sekaligus sebagai bentuk ekspresi kekaguman terhadap keunikan dan kemegahan candi tersebut melalui musik.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, Sound of Borobudur harus menjadi sebuah gerakan di tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai peradaban luhur warisan para pendahulu bangsa bisa tetap dinikmati dan dipahami oleh generasi penerus.

Upaya mengangkat nilai-nilai peradaban luhur bangsa, jelas Rerie, sangat penting karena saat ini nilai-nilai tersebut sudah tergerus dan banyak yang hilang.

Menurut Rerie, Candi Borobudur sebagai warisan budaya dalam bentuk benda memang masih ada wujudnya, namun banyak warisan budaya tak benda yang dimiliki bangsa ini hilang karena tidak ada lagi orang yang memahaminya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, upaya dari masyarakat seperti Sound of Borobudur bisa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, agar nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu

bangsa bisa terus dijaga.

Pada kesempatan itu, penggagas Sound of Borobudur, Trie Utami menegaskan, upaya yang dilakukannya bersama sejumlah seniman merupakan upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung pada relief Candi Borobudur.

Lewat reinterpretasi atas keberadaan alat-alat musik yang tergambar pada relief Candi Borobudur sebagai tahap awal, Trie Utami berharap, nilai-nilai peradaban warisan pendahulu kita bisa menjadi dasar untuk membangun karakter dan identitas anak bangsa.

Dengan membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai warisan budaya di masa lalu, Rerie berharap, gerakan masyarakat terkait kebudayaan bisa segera tumbuh.

Keberadaan gerakan masyarakat tersebut, menurut Rerie, bisa menjadi kekuatan pendorong bagi para pemangku kepentingan agar lebih peduli dan konsisten terhadap peninggalan budaya masa lalu. □

Terima Duta Besar RI untuk Turki

Indonesia Selalu Menikmati Surplus Perdagangan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, melalui IT-CEPA, Indonesia akan tetap menjadi mitra strategis bagi Turki dalam menjangkau pasar ASEAN, sebaliknya Indonesia juga tetap menjadikan Turki sebagai negara kunci dalam menjangkau pasar Timur Tengah dan Eropa.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung agar Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Turki (Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement/IT-CEPA) bisa segera diselesaikan pada 2021 ini. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Erdogan pada Juli 2017 di Turki, dalam meningkatkan perdagangan Indonesia - Turki mencapai

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, melalui IT-CEPA, Indonesia akan tetap menjadi mitra strategis bagi Turki dalam menjangkau pasar ASEAN yang memiliki market penduduk mencapai 625 juta jiwa atau 8,8% penduduk dunia. Sebaliknya, Indonesia juga tetap menjadikan Turki sebagai negara kunci dalam menjangkau pasar Timur Tengah dan Eropa.

Bamsuet menyebutkan, ekspor unggul-an

ang, termasuk Presiden Erdogan yang telah disuntik vaksin Sinovac pada 15 Januari 2021.

"Data Worldometers mencatat, per 28 April 2021, jumlah warga Turki yang terkena Covid-19 mencapai sekitar 4,7 juta jiwa, tertinggi ke-6 dunia setelah Amerika Serikat, India, Brazil, Perancis, dan Rusia," sorot Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pada 16 April 2021, kasus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

US\$ 10 miliar pada tahun 2023.

Hingga September 2020, jelas Bamsuet, nilai perdagangan Indonesia-Turki mencapai sekitar US\$ 958.400. Sebelumnya, di tahun 2019, nilai perdagangan kedua negara mencapai US\$ 1,6 miliar. Sejak 2015, Indonesia selalu menikmati surplus perdagangan. Pada 2019, surplus perdagangan bahkan mencapai US\$ 1 miliar atau sekitar Rp15 triliun.

"Melalui IT-CEPA, dengan salah satu poin pentingnya penghilangan bea masuk untuk ekspor dan impor beberapa komoditas dari kedua negara, diharapkan surplus Indonesia semakin meningkat," ujar Bamsuet usai menerima Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta, Kamis (29/4/21).

Indonesia ke Turki, antara lain produk berbahan baku karet alam, minyak hewani dan nabati, serat tekstil buatan tangan, pita buatan tangan, karet, dan produk karet. "Sedangkan ekspor utama Turki ke Indonesia, antara lain produk berbahan besi dan baja non-paduan, tembakau dan produk tembakau, produk kimia organik, karpet, serat tekstil dan produknya, serta sereal dan produk sereal," jelas Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini juga menyoroti progres penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah Turki. Hingga pertengahan April 2021, dari sekitar 83,6 juta penduduk, Turki telah menyuntikkan lebih dari 20 juta dosis vaksin Covid-19 ke warganya. Jumlah warga yang sudah menerima dosis pertama mencapai 12 juta or-

harian di Turki mencapai puncaknya, sekitar 63 ribu warga terkena Covid-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekitar dua minggu lalu pemerintah Turki memberlakukan jam malam mulai pukul 19.00 hingga 05.00. Mulai 29 April hingga 17 Mei 2021, ditingkatkan dengan menerapkan lockdown.

"Sama halnya seperti Indonesia dan negara dunia lainnya, Turki juga masih berperang menghentikan penyebaran virus Covid-19. Sebagai sahabat, kita berharap, Turki bisa segera keluar dari pandemi Covid-19, begitupun dengan Indonesia. Sehingga people to people contact melalui perjalanan wisata dan pendidikan antarpenduduk kedua negara bisa kembali menggeliat," pungkas Bamsuet. □

Gerakan Separatis dan Teroris di Papua

Bamsoet: “Sikat Habis, Saya Siap Bertanggung Jawab”

Sangat tepat jika gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dinilai sebagai gerakan pemberontakan melawan pemerintah yang sah (makar) dengan cara-cara teror.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kepentingan dalam negeri dan rakyat adalah yang utama. Karena-nya, jangan sampai ada ruang toleransi bagi tumbuh subur-nya gerakan separatis dan teroris di bumi Indonesia. Termasuk bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang oleh Badan Intelijen Negara kini telah dilabeli sebagai kelompok separatis dan teroris.

“Memangnya para separatis dan teroris itu pakai teori Hak Asasi Manusia saat membunuh rakyat dan aparat yang bertugas? Sikat habis, tumpas dan rata-kan para separatis dan teroris yang tidak berprikemanusiaan itu,” tegas Bamsoet dalam merespon pernyataan Amnesty Internasional Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Demi melindungi rakyat dan negara, sebagai pimpinan MPR RI, dia siap menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan hukum internasional atau hukum manapun. “Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia,” katanya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dari aspek pertahanan keamanan nasional dan hukum, sangat jelas bahwa KKB di Papua bukanlah kelompok kriminal bersenjata biasa. Melainkan termasuk gerakan yang memiliki

motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mereka jelas tidak punya right to self determination (hak menentukan nasib sendiri). Karena ketika Papua telah menjadi bagian integral NKRI berdasarkan New York Agreement 1962, maka hak menentukan nasib sendiri serta merta batal demi hukum,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menekankan, sangat tepat jika gerakan KKB dinilai sebagai gerakan pemberontakan melawan pemerintah yang sah (makar) dengan cara-cara teror. Sehingga penetapan keadaan darurat militer, baik secara hukum nasional maupun internasional, sudah sah dan bisa segera diberlakukan.

Menurut Bamsoet, tidak boleh lagi ada toleransi terhadap para separatis dan teroris untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat, serta mengakibatkan korban jiwa. “Kerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki. Selain Densus 88 dan Brimob Polri, juga Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan, mereka pasti bisa menumpas habis para separatis

dan teroris di Papua hingga ke akarnya,” pungkas Bamsoet.

Tegas Bukan Langgar HAM

Negara berkewajiban merespons dengan tegas aksi KKB memerangi negara selama ini, yang ditandai dengan pembunuhan Kabinda Papua, sejumlah prajurit TNI-Polri, warga sipil hingga pembakaran sekolah, rumah, dan properti lain milik masyarakat. Kalau sekarang negara mau bertindak tegas, apakah itu melanggar HAM?

“Ini bukan soal pengabaian HAM. Ini soal keselamatan rakyat. Memangnya para pembunuh rakyat tak berdosa itu peduli HAM?” tegas Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Penegasan ini menanggapi pernyataan sikap dan pola pikir PHBI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) dalam memandang kekerasan bersenjata berkelanjutan di tanah Papua, yang sudah begitu banyak menelan korban jiwa. “PHBI harusnya juga menghayati dan bersimpati kepada semua pihak yang anggota keluarganya menjadi korban kekerasan, bahkan pembunuhan oleh KKB,” kata Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 itu juga menegaskan, untuk keutuhan NKRI dia siap bertanggung jawab. “Yang penting para pembunuh, anggota gerakan separatis dan teroris yang tidak peduli HAM itu musnah dan rata dulu. Sehingga rakyat Papua bisa hidup tenang dan damai kembali,” tegas Bamsoet, seraya menyatakan, “Jika ada yang mempersoalkan statement saya soal HAM kita bicarakan kemudian. Sebagai pimpinan MPR, saya siap pasang badan dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Jika PBHI mengaku selalu memperjuangkan keadilan, seharusnya juga bersimpati kepada negara dan semua keluarga korban kekerasan dan pembunuhan oleh KKB. “Bukan hanya bersimpati kepada KKB dan membela HAM mereka,” pungkas Bamsoet. □

Peringatan Hardiknas 2021

Ahmad Basarah: Membudayakan Kembali Pendidikan Pancasila Langkah Wajib

Tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Bagaimana kita harus merefleksikan demi pembangunan bangsa, terutama demi menguatkan nilai-nilai kebangsaan di tengah ancaman ideologi trans-nasional? Dalam rangka peringatan Hardiknas 2021, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah memiliki himbauan yang mendasar.



MENURUT Ahmad Basarah, peringatan Hardiknas tahun ini harus kita letakkan pada konteks historis dan reflektif, mengapa tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. “Seperti kita ketahui, 2 Mei adalah hari kelahiran Bapak Pendidikan Nasional, yakni Ki Hajar Dewantara. Selain sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar merupakan tokoh kebangsaan, yang bersama dua tokoh lain, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, kita sebut sebagai Tiga Serangkai. Tiga tokoh inilah yang mengenalkan ideologi nasionalisme di Indonesia, dan menjadi guru dari tokoh pergerakan nasionalisme seperti Bung Karno”, demikian urai Ahmad Basarah yang juga Anggota Komisi Pendidikan DPR ini

Menurut Basarah, ketika Ki Hajar mendirikan Perguruan Taman Siswa pada Juli 1922, konsep dan praktik pendidikannya tidak lepas dari ideologi kebangsaan yang telah dikembangkan jauh hari. Maka Taman Siswa lalu menjadi lembaga pendidikan yang tidak

hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi rasa cinta Tanah Air, khususnya semangat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. “Visi dan misi inilah yang harus kita kembalikan dalam membangun pendidikan nasional kita,” ujar Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI ini.

Maka pihaknya menghimbau kepada pemangku kebijakan pendidikan agar meneladani visi Ki Hajar Dewantara dalam membangun sistem pendidikan nasional. Kontroversi terkini, yakni terkait Peraturan Pemerintah No. 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan harus menjadi pengingat bersama visi kebangsaan tersebut. Ketika pendidikan Pancasila tidak dijadikan mata pelajaran dan mata kuliah wajib dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hal ini menjadi tanda bahwa kita telah alpa akan visi kebangsaan dari konsep pendidikan nasional tersebut.

“Segegap stakeholder Pemerintahan mesti satu visi dan misi dengan semangat

kebangsaan untuk menghidupkan kembali rasa cinta kepada ideologi negara. Menghasilkan peserta didik yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja memang realistis, tetapi apalah artinya jika generasi penerus bangsa kita tersebut nantinya akan meninggalkan, apalagi mengkhianati nilai-nilai luhur bangsanya sendiri?” ulas penerima Bintang Jasa Utama ini.

Tantangan untuk menghidupkan dan membudayakan kembali pendidikan Pancasila menjadi langkah wajib untuk membangun semangat kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini menjadi tantangan besar, sebab pendidikan kita belum mampu menghidupkan rasa kebangsaan di hati anak didik. “Kita harus betul-betul merekonstruksi pendidikan kita demi penguatan kebangsaan. Sebab, sejak Reformasi, bangsa ini telah digempur oleh berbagai ideologi trans-nasional yang merongrong nasionalisme kaum terpelajar.

Kasus teror yang dilakukan Zakiah Aini di Mabes Polri pada 31 Maret lalu harus menjadi pelajaran berharga. Sebab, Zakiah merupakan mahasiswi yang terpapar ekstrimisme. Kalau kita baca surat wasiat kepada keluarganya, terlihat betapa virus ekstrimisme telah membuat Zakiah mengafirkan Pancasila, NKRI, demokrasi, dan nilai-nilai kebangsaan kita. Ini harus menjadi lampu merah, sebab pendidikan Pancasila yang telah diwajibkan di perguruan tinggi, ternyata tidak mampu membuat Zakiah mencintai negeri dan bangsanya sendiri,” tambah Basarah.

Belum lagi berbagai hasil survei yang melaporkan banyaknya generasi muda kita yang sudah terpapar paham ideologi trans-nasional. Untuk itu, pihaknya memperingatkan agar pemangku kebijakan pendidikan tidak menganggap remeh krisis kebangsaan

dalam pendidikan nasional kita. Oleh karenanya, menghidupkan dan membudayakan kembali Pancasila sebagai pendidikan wajib, sifatnya mutlak dilakukan.

“Kalau kita lihat, ideologi trans-nasional

ini memang menysasar ke kalangan terpelajar yang awam ilmu agama. Jika pendidikan kita tidak mampu membentenginya maka pelan-pelan anak bangsa kita akan lebih mencintai falsafah ke-

negara bangsa lain, yang berbeda dan belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri”, pungkas Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Malang ini. □

Kejahatan Libatkan Perempuan dan Anak

Kementerian PPPA Harus Hadir pada Seluruh Kasus

Jumlah kaum perempuan dan anak-anak yang terlibat pada kejahatan narkoba dan prostitusi, jauh lebih besar dibanding mereka yang terlibat pada radikalisme, terorisme, dan bom bunuh diri.

WAKIL Ketua MPR RI Dr.H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., prihatin dengan meningkatnya pelibatan perempuan dan anak dalam berbagai jenis kejahatan, seperti pada kasus narkoba, prostitusi, dan bom bunuh diri. Tetapi, HNW – sapaan Hidayat Nur Wahid—mengkritisi penggiringan opini seolah kalangan perempuan sering dimanfaatkan hanya untuk aksi radikalisme dalam bentuk bom bunuh diri, seperti di depan Gereja Katedral Makassar dan serangan di Mabes Polri, sebagaimana respons dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

HNW mengakui bahwa perempuan dan kalangan milenial rentan terpapar aksi radikalisme, namun faktanya, kerentanan dan pelibatan perempuan/milenial tersebut sudah lebih dulu terjadi dan jauh lebih masif pada kasus narkoba serta prostitusi, ketimbang bom bunuh diri.

“Kita sepakat, tolak pelibatan perempuan dan anak dalam aksi terorisme/radikalisme apa pun, termasuk teror yang dihadirkan oleh keterlibatan dalam kejahatan narkoba dan prostitusi. Karenanya, Kementerian PPPA perlu lebih kritis dan memperkuat kewenangan serta fungsinya, agar benar-benar dapat melaksanakan tupoksinya dengan mengoreksi pelibatan perempuan dan anak dalam kejahatan radikalisme/terorisme dalam segala bentuk,” demikian keterangan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tertulis HNW di Jakarta, Senin (5/4/2021).

HNW yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII membidangi urusan Perempuan dan Anak ini mengingatkan, kasus keterlibatan perempuan dan anak dalam pusaran kejahatan narkoba dan prostitusi jauh lebih dahulu dan lebih besar dibandingkan keterlibatan pada kasus radikalisme (terlibat dengan organisasi/kelompok radikal yang lakukan bom bunuh diri).

Berdasarkan data Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2018 oleh BNN, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa perempuan meningkat dari 1,3 pada 2011 menjadi 2,2 pada 2018. Angka

tersebut setara dengan sekitar 790 ribu orang, jauh lebih tinggi dan lebih sering daripada penyalahgunaan narkoba pada kalangan perempuan pekerja sekitar 350 ribu orang.

Pada era pandemi Covid-19 ini pun, lanjut HNW, pelibatan perempuan dan milenial dalam kejahatan/terorisme terkait narkoba dan kemudian ditangkap polisi, jauh lebih banyak dan lebih sering ketimbang kasus pelibatan perempuan/milenial dalam kasus terorisme bom bunuh diri. Adapun kasus prostitusi pada perempuan yang menjadi teror terhadap moral bangsa, berdasarkan catatan Kementerian Sosial tahun 2018 mencapai 40 ribu orang. Itu pun hanya data

pada prostitusi yang terlokalisasi.

Bahkan, selama masa pandemi Covid-19, perempuan ditangkap polisi karena kasus kejahatan teror moral prostitusi jumlahnya lebih dari 15 mucikari, dan lebih dari 286 PSK (*Sindonews.com* 25/2/2021). Sementara kasus terpapar radikalisme/terorisme pada perempuan berdasarkan data LP3ES hanya sebanyak 39 orang sepanjang kurun waktu 2000-2020.

HNW memahami bahwa Kementerian PPPA sudah bekerja sama dengan BNN untuk atasi pelibatan perempuan dalam kejahatan narkoba. Namun, pelibatan perempuan terkait narkoba, yang oleh BNN disebut sebagai Narkoterorisme (Terorisme Narkoba), masih meningkat. Bahkan, pada era pandemi Covid-19 ini pun ada perempuan yang jadi bandar, kurir untuk bandar asing, juga berani menjualnya ke polisi sekalipun akhirnya ditangkap polisi.

Seharusnya dalam rangka mengoreksi pelibatan perempuan dan anak dalam kejahatan terorisme narkoba, prostitusi, atau pun radikalisme, menurut HNW, Kementerian PPPA bisa membuat terobosan dengan hadir lebih efektif pada seluruh kasus kerentanan pelibatan perempuan dan anak.

“Yang penting Kementerian PPPA berlaku lebih adil dan proporsional, dengan menyoroti banyaknya kasus pelibatan perempuan dan anak dalam berbagai kejahatan, seperti narkoba dan prostitusi, bukan hanya radikalisme. Sehingga Kementerian PPPA bisa berkontribusi lebih konkret untuk menyelamatkan dan melindungi perempuan/milenial dan anak-anak Indonesia, dari segala bentuk radikalisme dan terorisme, seperti narkoterorisme, prostitusi, dan radikalisme,”ujarnya.

Tidak Adil

Politisi PKS ini mengingatkan, penggiringan opini keterlibatan aktif perempuan hanya dalam aksi terorisme, radikalisme, tidak faktual, tidak adil, dan tidak menyelesaikan masalah meningkatnya pelibatan perempuan dalam kejahatan. Karena, keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkoba atau prostitusi jauh lebih banyak dan lebih sering

ketimbang terorisme bom bunuh diri.

Berdasarkan penelitian LP3ES, faktor “ketertarikan hingga pelibatan” perempuan pada radikalisme bukan karena faktor tunggal, seperti pemahaman atau aliran agama, sekalipun agama tidak mengajarkan radikalisme/terorisme. Ada tiga faktor yang membuat perempuan dan anak bisa terpapar radikalisasi, yakni: personal (ketertarikan pada pandangan radikal), sosial (ketidakadilan dan ketimpangan), dan tragedi (pelecehan dan pembungkaman perempuan).

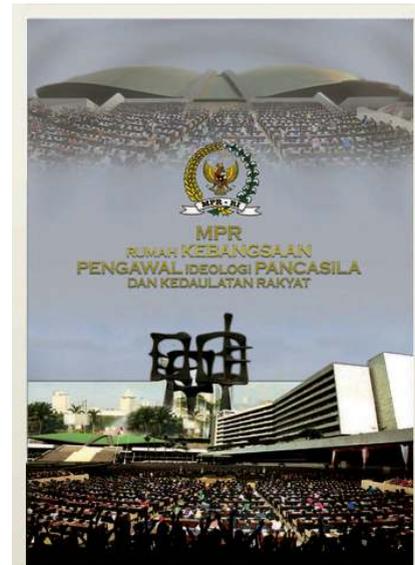
Kondisi saat ini, menurut HNW, ketidakadilan meningkat. Itu bisa dilihat dari indeks demokrasi di Indonesia yang turun hingga titik terendah selama 14 tahun terakhir. Ketimpangan ekonomi juga meningkat, dilihat dari naiknya indeks gini ke angka 0,385 pada September 2020.

Selain persoalan tersebut, ketahanan keluarga juga menjadi kunci penting untuk penjagaan masyarakat dari berbagai masalah yang mungkin menimpa perempuan dan anak dalam skala paling mikro. Termasuk, kaitannya dengan isu berbagai macam terorisme. Hal tersebut secara prinsip telah menjadi perhatian Kementerian PPPA.

“Karenanya, Kementerian PPPA perlu serius merumuskan strategi untuk hadirnya ketahanan keluarga sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengoreksi bahaya terorisme yang mewujud pada bahaya laten narkoba, prostitusi, hingga radikalisme, yang makin melibatkan dan mengorbankan perempuan dan anak.

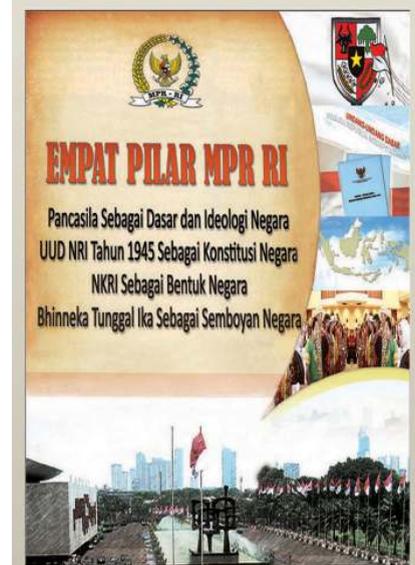
Dalam rangka menjaga institusi keluarga di era pandemi Covid-19, sebetulnya Fraksi PKS telah berinisiatif mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga, namun sayangnya justru ditolak oleh DPR-RI. Untuk itu, menurut HNW, Kementerian PPPA perlu mencari terobosan agar tujuan mulia tersebut bisa tercapai. “Sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk radikalisme dan terorisme, termasuk prostitusi dan narkoba, serta bom bunuh diri, dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berdaya guna,” pungkas HNW. □

MBO



Implementasi Sila-sila Pancasila

- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa
- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi





H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Pancasila Memelihara Takdir Saudara-saudara Se-tanah Air

'SAUDARA-SAUDARAKU Sebangsa dan Setanah Air,' akan menjadi ungkapan salam atau sapaan tanpa makna, jika generasi muda terkini tidak tahu memaknai dan mengejawantahkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai perekat takdir keberagaman Indonesia. Pondasi NKRI akan terus digerogoti jika kegagalan orang muda menghayati Pancasila terus dibiarkan.

Ketika banyak elemen masyarakat atau komunitas meneriakkan semangat dan prinsip 'NKRI Harga Mati', ungkapan ini lebih sebagai dorongan kepada negara untuk segera bersikap lebih tegas terhadap aksi dan ujaran dari kelompok-kelompok yang terus berupaya menggerogoti pondasi NKRI. Fakta dan kecenderungan menyangkal takdir keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diperjuangkan dan dipertontonkan kelompok tertentu itu sudah menjadi pengetahuan umum, dan setiap komunitas memiliki catatan contoh kasus.

Paling baru dan relevan untuk dikedepankan adalah contoh kasus serangan bersenjata di Mabes Polri oleh seorang wanita muda, akhir Maret 2021, dan juga aksi bom bunuh diri oleh pasangan suami-istri berusia muda di gerbang Gereja Katedral di Kota Makassar. Ketiga pelaku pada dua aksi itu diyakini memiliki banyak simpatisan atau pendukung. Sebab, ada penelitian yang mengungkap bahwa sejumlah kampus sudah terpapar paham radikal.

Bahkan, Badan Intelijen Negara (BIN), pada 2018, juga menerbitkan catatan tentang 41 dari 100 rumah ibadah milik kementerian/lembaga serta BUMN pun sudah terpapar paham radikal. Temuan GP Ansor juga memperkuat data BIN itu. Selain itu, investigasi

oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2019 pun mengungkap sekitar dua juta pegawai BUMN berpotensi terpapar paham radikal.

Mereka adalah komunitas yang menolak keberagaman, dan dengan sendirinya menyangkal pula Pancasila sebagai perekat keberagaman itu. Mereka memilih menerima dan patuh tanpa syarat terhadap pandangan atau ajaran yang mengajak atau menyuruh mereka memusuhi negaranya sendiri, serta membenci siapa saja yang pandangan hidupnya tidak sama dengan mereka. Dengan begitu, dalam konteks ke-Indonesia-an semua komunitas di negara ini, mereka pun menolak atau tidak mengakui orang lain di luar kelompok mereka sebagai 'Saudara Sebangsa dan Setanah Air'.

Penyangkalan terhadap Pancasila sebagai perekat keberagaman NKRI bisa terjadi karena negara dalam sebuah periode yang cukup panjang tidak militan dalam upaya menanamkan nilai-nilai luhur lima sila Pancasila kepada generasi muda. Absennya negara menghadirkan Pancasila dalam proses tumbuh-kembang orang muda dimanfaatkan kelompok-kelompok penganut paham radikal untuk menanamkan ajaran-ajaran sesat, termasuk ajakan memusuhi negara dan masyarakat, serta rangkaian aksi bunuh diri. Pembawa paham radikal itu melakukan penetrasi hingga ke berbagai aspek kehidupan orang muda; dari ruang belajar, kelompok kegiatan hingga tempat kerja. Akibatnya sudah dialami dan dirasakan semua orang.

Negara harus belajar dari semua pengalaman buruk itu. Ketiadaan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi orang muda di semua jenjang pendidikan menjadi



sebuah kesalahan cukup fatal, dan kesalahan ini harus dibayar dengan cukup mahal. Mencari dan menunjuk siapa paling bersalah tidak akan menyelesaikan masalah. Sangat bijaksana jika hal itu diterima sebagai kesalahan bersama yang tentu saja harus segera diperbaiki.

Karena itu, inisiatif Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mendorong revisi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) guna mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib patut diapresiasi dan didukung. Seperti diketahui, Pasal 37 UU Sisdiknas mewajibkan kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memuat pendidikan kewarganegaraan. Pancasila tidak secara khusus tercantum sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib. Maka, belajar dari pengalaman buruk selama ini, sekarang adalah waktunya bagi negara membuat dan memberlakukan keputusan tegas, dengan mewajibkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib

di semua jenjang pendidikan.

Perjalanan sejarah bangsa mencatat bahwa takdir keberagaman NKRI direkatkan atau sudah dimeteraikan oleh Pancasila. Pancasila — yang kandungan falsafahnya bersumber dari kearifan lokal semua suku dan golongan di seantero bumi nusantara — merekatkan persaudaraan semua komponen bangsa. Dan, Pancasila akan selalu memelihara dan merawat persaudaraan itu. Itu sebabnya, setiap orang Indonesia berhak menyapa warga dari semua daerah dan golongan dengan salam dan sapaan 'Saudaraku Sebangsa Setanah Air'.

Memang, adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia merasakan masih adanya tantangan kebangsaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tantangan itu antara lain berupa melemahnya toleransi dalam menyikapi keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, dan mudahnya identitas dan karakter bangsa. Fakta bahwa Indonesia per geografis sebagai negara kepulauan yang terpisah oleh laut tidak boleh menjadi faktor yang melemahkan.

Dan, kendati secara sosio-kultural, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan tidak akan pernah merusak prinsip 'Saudara Sebangsa Setanah Air'. Penyatuan dan persaudaraan itu dipelihara dan dirawat oleh Pancasila sebagai benteng untuk menghadapi berbagai potensi ancaman yang ingin menceraiberaikan ikatan kebangsaan.

Dengan begitu, Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sudah final. Tak hanya merekatkan kebhinekaan, Pancasila juga menjadi sumber nilai bagi pembangunan karakter generasi muda bangsa (nation character building). Sebab, di dalam lima sila itu terkandung falsafah, prinsip dan semangat spiritualisme, humanisme, nasionalisme, etika serta standar moral, dan beragam sistem nilai positif hingga nilai dan prinsip kebenaran universal. Bukankah semua kandungan nilai luhur ini menjadi gizi yang amat dibutuhkan anak dan remaja dalam proses tumbuhkembang mereka? □

Kunker di Wilayah Kota Bogor

Syarief Hasan Bertemu Ulama, Bagi-bagi Santunan untuk Anak Yatim, Santri, dan Kaun Dhuafa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA., dalam bulan suci Ramadan lalu melakukan kunjungan kerja di Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kunker tersebut Syarief Hasan, begitu dia biasa disapa, melakukan berbagai kegiatan, seperti buka puasa bersama, dan pemberian santunan pada anak-anak yatim, para santri dan kaum dhuafa.

Mengawali kegiatannya, Syarief Hasan menyambangi anak-anak yatim di Desa Tegallega, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu

(17/4/2021). Hadir dalam acara tersebut para pimpinan dan kader Partai Demokrat Kota Bagor, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anak-anak yatim yang ada di sekitarnya.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia buat umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di bulan suci ini, banyak berkah dan kebaikan yang dicurahkan Allah SWT. Untuk itu, perbanyaklah amal ibadah dan berbuat baik, karena pahalanya akan dilipatgandakan.

Salah satu amal yang tepat di bulan suci ini, lanjut Syarief Hasan, adalah bersilaturahmi dan bersedekah kepada anak-anak yatim. Sebab, anak yatim sangat dekat dengan Rasulullah. Memuliakan anak yatim, menurut Syarief Hasan, sama artinya dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW.

Intinya, kegiatan bukber dan sedekah ini bertujuan untuk berbagi dengan sesama. Sebab, dalam menjalani kehidupan ini kita harus berharap pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sedekah ini adalah



jembatan untuk mendapatkan itu. “Ini penting, apalagi kami warga Demokrat beberapa waktu lalu mendapatkan ujian berat soal KLB dan Alhamdulillah ujian itu berhasil kita lalui dengan sabar dan berkat Rahmat Allah SWT. Sedekah ini juga wujud syukur kita,” katanya.

Dalam acara bukber itu, Syarief Hasan tidak lupa mengajak para anak yatim untuk berdoa demi keselamatan bangsa dan negara. “Seperti kita ketahui pandemi Covid-19 yang melanda bangsa sudah satu tahun lebih ini, telah banyak menyangsarakan rakyat. Kita semua berharap dengan bantuan doa para anak yatim, Allah berkenan segera menghilangkan pandemi,” tambahnya.

Syarief Hasan juga meminta doa agar Partai Demokrat tetap istiqamah mengawal

apalagi di masa pandemi ini, terus berjuang dan bekerja keras demi masa depan, saya yakin kalian bisa jika tekun dan fokus,” pungkasnya.

Jangan Lengah, Patuhi Protokol Kesehatan

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM., MBA., mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 hingga saat ini masih mewabah dan mengancam kesehatan serta jiwa seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, masyarakat jangan sampai lengah. kewaspadaan harus tetap dijaga, baik untuk diri sendiri, maupun keluarga dan lingkungan.

Awalnya, Syarief Hasan mengaku khawatir, karena terlalu lama berada dalam kondisi pandemi, masyarakat menjadi masa bodoh, dan tidak lagi menjalankan proses

dilakukan berbagai elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga-lembaga negara, swasta, bahkan sampai pelosok desa. Kondisi ini harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

“Namun, tidak bisa dipungkiri, pandemi ini mengakibatkan banyak rakyat kehilangan sumber pendapatannya, juga pekerjaannya hilang, usaha hancur, keluarganya ada yang terjangkit Covid, sehingga berpotensi menurunkan semangat hidup. Mereka butuh uluran tangan, apalagi di bulan suci, Ramadan, seperti ini,” ujarnya.

Untuk itulah, Syarief Hasan melakukan rangkaian kegiatan silaturahmi, buka puasa bersama sekaligus pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Di sela kegiatannya, Syarief Hasan selalu menyampaikan beberapa hal seputar Pancasila,



pemerintah dari luar. Sebab, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintah sangat dibutuhkan. Bukan bertujuan untuk mengganggu, tapi membantu mengingatkan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tetap dalam koridor untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Demokrat sendiri pernah menjadi the ruling party, jadi kami paham apa yang diperlukan dan tidak diperlukan rakyat. Pengalaman itu kami jadikan sarana untuk mengawal dan mengingatkan pemerintah,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Syarief Hasan memberi motivasi kepada anak-anak yatim untuk terus semangat dalam beribadah dan belajar. “Kesempatan, hak, kewajiban kalian sama dengan anak-anak lainnya di seluruh Indonesia. Untuk itu jangan patah semangat

dalam kegiatan sehari-hari, terutama di luar ruangan. “Namun, kekhawatiran saya berubah ketika beberapa kali mengunjungi warga masyarakat di berbagai daerah. Ternyata masyarakat kita sangat memahami bahaya Covid dengan mematuhi proses sesuai anjuran pemerintah,” katanya.

Hal itu disampaikan politisi Partai Demokrat ini saat menghadiri kegiatan silaturahmi, Buka Puasa Bersama dan Pemberian Bantuan Sembako, di Kampung Parung Jambu, Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021). Hadir dalam acara tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitarnya.

Syarief Hasan menegaskan, tingginya tingkat pemahaman rakyat terhadap penyebaran virus corona dan bahayanya adalah bukti keberhasilan sosialisasi yang

UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.

“Penjelasan tentang nilai-nilai luhur bangsa sangat penting diberikan. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa kita semua, walaupun berbeda-beda, adalah saudara setanah air. Jika satu mengalami kesulitan yang lain pasti merasakan dan akan membantu. Kalau ini terbangun, saya yakin dampak pandemi ini lambat laun akan sirna,” paparnya.

Syarief Hasan mengajak seluruh warga bangsa untuk selalu memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. “Jangan gentar hadapi Covid. Mumpung berada di bulan suci, mari kita lebih giat melakukan amal ibadah agar upaya bangsa kita dalam menanggulangi pandemi ini mendapatkan ridha Allah SWT,” ujarnya.

Selanjutnya, Syarief Hasan secara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada warga. Dan, dilanjutkan buka puasa bersama.

Nikmat dan Indahny Selalu Dekat Ulama

Di sela-sela kunjungan kerjanya di wilayah Kota Bogor, Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan menyempatkan diri bersilaturahmi kepada para ulama. Salah satunya mengunjungi seorang ulama besar Habib Hasan Al Attas yang dikenal sebagai Habib Empang Bogor, di pesantren atau Ma'had Nurul Fata.

Meski di wilayah tersebut hujan turun cukup deras, tapi tak menyurutkan langkah kaki politisi Partai Demokrat ini untuk bertemu dengan ulama yang telah dia kenal sejak lama. "Saya merasakan nikmat dan indah dekat dengan ulama dan anak-anak yatim juga para santri," katanya usai ber-

silaturahmi dengan Habib Hasan Al Attas, selagus acara buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim, para santri serta bantuan sembako kepada warga dhuafa, di Ma'had Nurul Fata, Desa Pamoyanan, Bogor Selatan, Jawa Barat, Rabu (28/4/2021).

Syarief Hasan mengutarakan bahwa hubungan baik dengan Habib Empang sudah terjalin sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, dan tetap terjaga hingga saat ini. "Bapak SBY sangat menghormati beliau dan sebaliknya Habib-pun sangat menghormati SBY. Habib sebagai ulama selalu memberikan wejangan, nasihat yang selalu diperhatikan oleh SBY. Ini menjadi teladan yang baik, yakni terbangunnya sinergitas antara ulama dan umaro," paparnya.

Berbicara seputar santri, Syarif Hasan

mengungkapkan bahwa kebetulan sebagai Pimpinan MPR sedang menggodok program kerja yang khusus untuk santri dan anak-anak yatim. Sebab, dari berbagai kunjungan ke berbagai pondok pesantren dan kebanyakan santrinya anak yatim, ternyata pemahaman mereka seputar bangsa dan negara sangat baik, termasuk pengetahuan tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal sebagai Empat Pilar MPR.

"Ini bukti bahwa pengasuh-pengasuh Ponpes telah sangat serius mengajarkan hal tersebut kepada santri-santrinya. Jadi, saya rasa, para santri ini ke depannya akan menjadi manusia Indonesia yang unggul, baik dari sisi agama, ilmu pengetahuan, dan juga memiliki karakter kebangsaan yang bagus. Program kerja saya nanti adalah bentuk apresiasi, harapan, dan perhatian saya untuk mereka," pungkasnya.

Melihat besar potensi para santri, Syarif Hasan mendorong agar para pimpinan dan pengasuh ponpes terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan soal kebangsaan. "Saya akan membantu jika dibutuhkan, terutama soal materi ajaran atau dalam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa," tandasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Akan Naik, Jika

Di hari keempat rangkaian kegiatannya di wilayah Kota Bogor, Syarif Hasan menyambangi masyarakat di keluarahan Cilendek Timur, Bogor Barat, Kamis (29/4/2021). Kepada masyarakat, ia mengingatkan, sampai saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga mereda. Bahkan dalam lingkup global, hampir seluruh negara sangat mengkhawatirkan munculnya gelombang kedua dari pandemi ini. India adalah contoh negara yang mengalami serangan gelombang kedua sangat dahsyat.

Fenomena itu, lanjut Syarif, sangat mengerikan jika terjadi di Indonesia. Serangan gelombang pertama saja dampaknya sudah sangat menyengsarakan rakyat, terutama rakyat kecil. Perekonomian nasional lambat laun turun, tingkat pengangguran tinggi, banyak usaha rakyat yang gulung tikar.

"Untuk keluar dari pandemi dan menghindari datangnya gelombang pandemi selanjutnya, sekaligus perbaikan perekonomian nasional, perlu sinergitas yang





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia,” katanya, sebelum acara buka puasa bersama dan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar yang dikoordinir kader Partai Demokrat Kecamatan Bogor Barat.

Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan secara ketat tersebut adalah anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat Eny Indari, para kader, tokoh agama serta masyarakat sekitar sebagai peserta.

Lebih lanjut Syarief Hasan menaparkan, agar upaya memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi bagus maka penanganan pandemi mesti tepat dan cepat. Namun, ternyata ada dua wacana besar yang beredar di tengah masyarakat, yakni di satu sisi ada yang berpandangan untuk segera memperbaiki perekonomian baru pandeminya. Di sisi lainnya berpendapat, pandeminya yang harus diatasi dahulu baru perekonomian.

“Itulah demokrasi, semua pendapat harus dihargai sebab semuanya pasti bermaksud

baik. Saya melihat pemerintah cukup bagus dalam melakukan tugasnya, dua-duanya dijalankan, yakni seraya melakukan upaya menghilangkan pandemi dengan sosialisasi dan penerapan kebijakan protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat sampai pelaksanaan vaksinasi massal, dan pemerintah juga bekerja keras memperbaiki perekonomian yang rusak akibat pandemi,” terangnya.

Syarief berharap, rakyat mendukung upaya-upaya tersebut dengan mematuhi prokes, seperti selalu memakai masker, terutama di luar rumah, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan pribadi dan keluarga dan mengikuti program vaksinasi. Jika itu dilakukan, maka pandemi lambat laun akan hilang dan diharapkan di kuartal kedua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ada perubahan menjadi positif dua persen (2%) dan makin melaju di kuartal selanjutnya.

“Jika hal baik itu terus bertahan, maka saya yakin pada akhir 2021 pertumbuhan ekonomi

kita bisa mencapai 5% kembali lagi seperti sebelum pandemi muncul. Untuk itu, saya mengajak pemerintah dan rakyat mulai saat ini bergandengan tangan lebih erat lagi, untuk bersama-sama keluar dari musibah ini. Saya percaya kita bisa apalagi dibarengi doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucapnya./der

Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dan Negara

Menutup rangkaian kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak-anak yatim, para santri, fakir miskin, di beberapa wilayah Kota Bogor, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menggelar acara ‘Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dan Negara’. Acara diselenggarakan, di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/4/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat, Anita Primasari Mongan, dan para kader partai



berlambang Merci itu.

Dalam acara itu, Syarief Hasan menegaskan, doa adalah sarana paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi bencana luar biasa, yakni Pandemi Covid-19. Apalagi doa yang dipanjatkan secara bersama-sama, mudah-mudahan akan cepat menembus langit.

Lebih jauh, Syarief mengingatkan, untuk mendapatkan pertolongan Allah, berdoa mesti dibarengi dengan usaha, yakni mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah. Yaitu: selalu memakai masker, terutama di luar rumah; menjaga jarak; mencuci tangan; minum vitamin; dan menerapkan gaya hidup sehat untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

“Satu lagi, kita harus tetap semangat dalam bekerja untuk mencari nafkah dan beraktivitas yang baik-baik, walaupun

pandemi ini tidak jelas kapan berakhirnya. Intinya, jangan patah semangat walaupun kondisinya sangat berat,” ucapnya.

Syarief Hasan memberi contoh, keluarga Partai Demokrat sempat dilanda peristiwa pahit yang mengguncang perasaan, serta memeras emosi seluruh kader, dengan adanya KLB Medan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, dengan kesabaran, doa, serta upaya tanpa kenal lelah, pada akhirnya kemenangan berada di pihak yang benar.

“Itulah bukti kekuatan doa yang tulus. Demikian juga doa-doa kita untuk bangsa, pasti pada saatnya nanti Allah akan mengabulkannya. Yang penting kita bersabar,” imbuhnya. Dan, Syarief Hasan juga mengingatkan dan mengajak masyarakat, agar bulan suci Ramadan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk saling berbagi.

“Saling berbagi itu tidak akan membuat

kita susah, malah hikmahnya sangat besar, di antaranya akan selalu mendapatkan doa yang baik, menambah teman dan saudara. Saya sendiri melakukan rangkaian kegiatan bukber di Kota Bogor, tujuan utamanya untuk saling berbagi dengan sesama,” tambahnya.

Ada satu kejadian kecil tapi unik di lokasi acara. Di antara warga masyarakat peserta doa bersama, persisnya di belakang tenda terlihat dua gadis kecil lusuh. Kedua pengamen jalanan ini tampak senang sangat senang ketika mendapatkan paket makanan buka puasa dan kue-kue dari panitia.

Sebelum buka puasa bersama dimulai, secara simbolik Syarief Hasan menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar yang dikoordinir oleh kader Partai Demokrat Kecamatan Tanah Sareal. □

DER

Rapat Koordinasi Virtual Hadapi KKB

MPR: Rebut Hati dan Pikiran Masyarakat Papua

Mustahil membangun bumi Papua jika eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan adanya peningkatan intensitas aksi teror dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua — yang kini oleh pemerintah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa teroris adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

“Data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mencatat, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB. Sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personil TNI sebanyak 27 orang, dan personil Polri sebanyak 9 orang,” ujar Bamsoet dalam



Rapat Koordinasi Virtual MPR RI bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, dan BIN, di Jakarta, Senin (3/5/21).

Turut serta para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Arsul Sani. Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD., Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, di tingkat internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI. Karena seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang Penentuan Pendapat Rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

Sementara Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengingatkan bahwa isu kemerdekaan Papua tidak berdiri sendiri oleh internal KKB maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dalam negeri. Melainkan ada campur tangan dari jaringan internasional di luar negeri. Seperti keberadaan Benny Wenda di Inggris, hingga Veronica Koman di Australia, penerima beasiswa LPDP, yang paspornya sudah dicabut pemerintah Indonesia dan ditetapkan dalam

Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, sepanjang April 2021 telah terjadi puluhan aksi teror yang dilakukan kelompok teroris KKB. Antara lain 8 April 2021, penembakan terhadap seorang guru, di Kelurahan Yulukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Tanggal 9 April 2021, penembakan terhadap guru honorer SMP 2 Beoga, serta pembakaran rumah dinas guru, bangunan SD Jambul, SMP 1 dan SMA 1 Beoga, di Kabupaten Puncak.

"Tanggal 11 April 2021, pembakaran Heli Upmi815 milik PT. Ersa Air di Apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Tanggal 13 April 2021, pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP Negeri Beoga dan rumah Anggota DPRD Kabupaten Puncak. Tanggal 14 April 2021, penembakan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak," papar Bamsuet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan Keamanan ini menambahkan, 15 April 2021, penembakan pelajar SMA di Kampung Tagaloo, Kabupaten Puncak. Tanggal 17 April 2021, pembakaran gedung SD Dambet, rumah Kepala Suku dan tiga rumah dinas guru di Kampung Dambet, Distrik Beoga Kabupaten Puncak.

"Tanggal 25 April 2021, serangan KKB menewaskan KABINDA Papua, Mayjen

Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Tanggal 27 April 2021, serangan KKB menewaskan anggota Brimob Polri, Bharada Komang, dan melukai dua anggota lainnya," tandas Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menekankan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB mempunyai karakteristik mengkhawatirkan. Dilakukan secara intens, menimbulkan korban jiwa, menasar target yang bersifat acak/random, yaitu guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, dan aparat, disertai perusakan fasilitas publik dan tempat tinggal, serta menciptakan ketakutan dan teror terhadap kehidupan rakyat.

"Mustahil membangun bumi Papua jika eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang. Karenanya, pendekatan soft power tetap diutamakan, namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua," tegas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, untuk menumpas para teroris KKB, TNI-Polri harus menerjunkan kekuatan penuh. Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan. Air kolam adalah sarana dan prasarana pendukung kelompok teroris, sementara ikannya adalah teroris KKB.

"Setelah memukul mundur dan menguasai kembali berbagai desa dari cengkraman para teroris KKB, pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 20 Tahun 2020. Selain juga melakukan berbagai operasi bhakti kesejahteraan. Anggota TNI dan Polri, misalnya, dapat ditugaskan sebagai guru dan membangun kembali fasilitas umum yang rusak. Karena merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik memulihkan kembali kondisi damai di Papua," pungkas Bamsuet. □

Diskusi KKB di Papua

Membahas Penyelesaian Kekerasan di Papua

Permasalahan kekerasan di Papua yang melibatkan kelompok KKB harus diselesaikan secepatnya untuk keutuhan bangsa dan negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ANGGOTA MPR RI Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, mengatakan bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya, juga sangat berharap dialog akan dapat menuntaskan permasalahan di Papua ini.

Yan melihat upaya dialog dan rekonsiliasi dengan GAM di Aceh yang dilakukan pemerintah berhasil. "Kalau di Aceh berhasil, kenapa di Papua tidak dilakukan pola yang sama," ungkap politisi asal Papua selaku pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center MPR/DPR/DPD Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Lebih lanjut dalam diskusi bertema: 'Peran TNI-Polri dalam Menumpas KKB Papua' itu, Yan menyatakan, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola seperti yang diterapkan di Aceh dilakukan kembali. "Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan di gunung-gunung akan turun meletakkan

senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua," ujar Yan dalam diskusi yang diikuti para awak media masaa nasional yang mangkal di Parlemen tersebut.

Sebenarnya, lanjut Yan, masyarakat Papua tidak menginginkan kekerasan ini terus berlanjut dan tidak berkesudahan. Karena, dikhawatirkan kekerasan ini akan berlanjut ke generasi selanjutnya. "Inilah pentingnya dialog. Dialog yang baik mengakomodir semua pihak sehingga akan mengubah pola pikir pelaku kekerasan," kata Yan dalam dialog yang juga menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPD RI Letjend TNI Mar (Purn.) Nono Sampono, dan anggota MPR RI Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno.

Jadi, menurut Yan, jika pola pikir sudah berubah maka selanjutnya karakter dan perilaku akan mudah sekali dibentuk. Tapi, yang menjadi persoalan adalah susahny mendeteksi otak-otak KKB ini, karena mereka ada di luar negeri. "Sekarang bagaimana caranya mereka yang ada di luar negeri dan KKB yang ada di Papua bisa kita kumpulkan dan duduk bersama, berdialog dengan

pusat," tambahnya.

Yan mengajak semua elemen, baik itu pemerintah pusat, daerah, masyarakat Papua, maupun pihak KKB untuk kembali memikirkan rakyat dan masa depan mereka. "Mari kita semua melakukan kesepakatan damai, menyudahi semua pertikaian yang hanya menguntungkan segelintir pihak dengan tujuan mengacak-acak persatuan Indonesia, serta mengadu domba antaranak bangsa," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dave Akbarshah Fikarno mengatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat sipil Papua. Aksi pembunuhan yang dilakukan menyasar pada siapapun, baik aparaturn maupun masyarakat umum.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Dave Akbarshah, kelompok bersenjata ini ternyata memiliki kemampuan untuk menyerang dan membunuh perwira tinggi militer. Terakhir, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu



Dave Akbarshah Fikarno



Nono Sampono



Yan Permenas Mandenas

Danny Nugraha, gugur saat terjadi kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Menurut Dave Akbarshah, kemampuan mereka (KKB) tidak main-main. Mereka memiliki skill tempur mumpuni dan didukung oleh persenjataan yang modern. "Mereka tidak bisa lagi disebut KKB, tapi kelompok separatis teroris. Untuk itu, penanganan yang dilakukan terhadap mereka harus tegas," katanya.

Namun, Dave mengingatkan bahwa

penanganan permasalahan di Papua tersebut harus dilihat dari berbagai sisi secara hati-hati. Sebab, benih-benih penyebab aksi kekerasan karena adanya rasa ketidakadilan serta kurangnya perhatian dari pemerintah pusat yang sudah berlarut-larut dan meledak dalam bentuk aksi separatis.

Tapi, Dave mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat Papua yang menyikapi kekecewaan tanpa melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu, penyelesaiannya mesti

dibagi menjadi dua tahap, yaitu: *Pertama*, tindakan tegas harus dilakukan terhadap kelompok yang melakukan aksi kekerasan sampai pembunuhan.

Dan, tahapan *kedua*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan SDM. "Dua tahap ini harus dilakukan agar upaya menuju perdamaian di Papua menjadi efektif dan mencapai hasil yang diharapkan," ujarnya. □

DER



Ibu Sumarni

Perempuan **Tangguh** Desa Katongan *Gunung Kidul*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DALAM lima tahun terakhir, penduduk Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa hidup lebih nyaman. Desa yang dulunya gersang, hanya bisa menikmati rimbunnya dedaunan di sawah dan ladang, dan itupun hanya terjadi di musim penghujan. Tapi, kini pemandangan hijau itu bisa berlangsung sepanjang tahun.

Kenapa itu bisa terjadi? Pola hidup warga masyarakat di sana memang telah berubah. Dulu, sebagian besar warga Desa Katongan berprofesi sebagai petani yang sangat bergantung pada musim penghujan. Saat musim kemarau tiba, mereka tidak memiliki cadangan air untuk bercocok tanam. Dan, para petani di situ juga tidak mempunyai teknologi untuk memberdayakan air tanah.

Maka, praktis ketika musim kemarau tiba, karena tidak bisa bercocok tanam, warga masyarakat Desa Katongan, khususnya kaum pria, terpaksa menggeluti profesi lain, sebagai tukang bangunan. Namun, pekerjaan tersebut tidak selalu tersedia. Karena itu, hampir bisa dipastikan, jika musim kemarau tiba, sebagian masyarakat Desa Katongan menjadi pengangguran. Dan, akibatnya, sudah tentu, kesejahteraan warga Desa Katongan tak kunjung meningkat.

Beruntung, situasi sulit itu berangsur-angsur membaik. Itu terjadi setelah masyarakat

Katongan mengenal dan mau berpindah dari budidaya komoditas tanaman padi dan palawija menjadi lidah buaya atau aloe vera. Bahkan, karena keberhasilan dalam budidaya lidah buaya, kini Katongan pun dikenal sebagai Desa Aloe Vera.

Julukan Desa Aloe Vera itu tak berlebihan. Warga masyarakat Katongan berhasil mengelola tanaman lidah buaya itu ke dalam berbagai produk turunannya. Mulai dari minuman, dodol, hingga produk kesehatan dan kecantikan. Tidak itu saja, Katongan juga dikenal sebagai desa penyedia bibit lidah buaya. Desa ini juga sering menerima kunjungan para pelancong, baik sekedar

untuk berwisata, maupun datang untuk belajar dan melihat peluang usaha aloe vera.

Sukses yang dicapai Katongan ini tak bisa dilepaskan dari kiprah dan perjuangan seorang perempuan tangguh warga Desa Katongan. Dia adalah Ibu Sumarni (54 tahun). Ceritanya, Sumarni-lah pertama kali mengenal dan membudidayakan tanaman aloe vera. "Jadi, pada 2014, saya disuruh menanam lidah buaya oleh Alan, anak saya yang merantau ke Jakarta. Saat itu dia (Alan) tidak memberitahu apa manfaat dan cara mengolah lidah buaya. Pokoknya, Alan hanya menyuruh saya menanam aloe vera," kata Sumarni kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.



Tanpa pikir panjang perempuan kelahiran 11 November 1967 ini menuruti kemauan anaknya. Mula-mula ia membeli 500 bibit lidah buaya dengan harga Rp 5.000/tanaman. Namun, setelah dibeli tidak semua bibit bisa tumbuh dengan baik. Karena, sebagian memang sudah layu saat dalam pengiriman. Sebagian lagi tidak bisa berkembang karena kurangnya asupan air.

“Sebagian lagi, karena bibit lidah buaya saya tanam di tempat yang relatif jauh dari rumah, sehingga tidak mendapat asupan air yang cukup setiap harinya,” tutur Sumarni.

Sumarni mengakui, ketika memulai usahanya banyak menghadapi tantangan. Selain masalah kondisi alam yang kurang ramah, juga minimnya teknologi pertanian. Belum lagi, perempuan dengan dua putera hasil pernikahannya dengan Widodo ini, harus menghadapi cibiran dari sebagian warga masyarakat. Ada yang bilang Sumarni kurang waras, karena menanam lidah buaya dan meninggalkan kebiasaan bercocok tanam padi serta palawija. Apalagi, waktu itu, tanaman aloe vera yang dibudidayanya belum tahu akan diapakan.

“Sedih juga kalau mengingat bahwa saya pernah dicibir masyarakat. Padahal, waktu itu, pikiran saya ingin membantu masyarakat, minimal ibu-ibu. Pasalnya, kaum wanita di sini kebanyakan membantu suaminya pada saat musim tanam. Tetapi, ketika musim kemarau, mereka menganggur,” ungkap Sumarni.

Dompot Duafa

Pada 2016, usaha Sumarni menanam aloe vera mulai terlihat arahnya, terutama pada saat anaknya yang merantau ke Jakarta pulang kampung, ke Katongan. Saat itulah, Sumarni mendapat ilmu cara mengolah aloe vera. Mulai dari cara memanen, mengupas, hingga mengolahnya menjadi minuman.

Pada saat bersamaan, tetangga Sumarni



yang semula mencibir mulai takjub. Mereka ingin ikut membudidayakan aloe vera. Apalagi, pada setiap pengajian yang dia ikuti, Sumarni selalu mengajak warga Katongan untuk ikut menanam lidah buaya. Tetapi agak terkendala, karena mereka memiliki keterbatasan, karena kurangnya modal.

Pada 2017, Sumarni dipertemukan dengan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Melihat upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Sumarni, Dompot Dhuafa bersedia membantu pengembangan pembudidayaan aloe vera. Intervensi bantuan pun disalurkan. Sebanyak 100 keluarga dari 7 RT di Desa Katongan mendapatkan bantuan berupa 50 bibit aloe vera setiap keluarga.

Sejak saat itu, tumbuhan lidah buaya mulai menghiasi setiap sudut halaman rumah di desa tersebut. Karena tumbuh tak kenal musim, para ibu-ibu kini lebih produktif membudidayakan aloe vera. Dan, sejak itu, jadilah Desa Katongan ini dikenal sebagai ‘Desa Aloe Vera’.

Keterlibatan Dompot Dhuafa dalam pengembangan budidaya aloe vera di Desa Katongan ini pun semakin intens. Dompot Dhuafa tidak hanya terbatas pemberian

benih, tapi juga ikut serta menemani warga masyarakat dalam pengembangan produk terusan aloe vera. Melalui diskusi dan beberapa kali ujicoba, akhirnya kualitas produk minuman berbahan dasar aloe vera semakin meningkat. Pengemasan yang dulu sederhana, kini menjadi lebih menarik

Bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ikut serta pula membantu untuk meneliti produk, sehingga bisa awet dan lebih tahan lama. Kini, rumah Sumarni selalu sibuk dengan produksi olahan aloe vera. Produk olahan itu laris manis dan terdistribusi, bukan hanya di wilayah Yogyakarta, namun juga di luar kota.

“Paling banyak dipesan untuk oleh-oleh. Selain rutin dikirim ke toko-toko. Ada juga konsumen yang datang langsung ke rumah. Kami juga ada langganan di Jakarta,” ungkap Sumarni.

Kini, di sepanjang jalan pedesaan itu dihiasi oleh jejeran tumbuhan aloe vera. Di kebun, di ladang pertanian, hingga teras rumah warga dipenuhi dengan tanaman tersebut. Nampak asri, Desa Katongan pun kini semakin terkenal dengan sebutan Desa Aloe Vera. □

MBO

Sekolah Tatap Muka Terbatas

Persiapannya Harus Matang, Baik Teknis Maupun Psikologis

Faktor keamanan peserta didik dan para pendidik dalam pelaksanaan belajar tatap muka harus menjadi pertimbangan utama. Kesiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan protokol kesehatan harus mendapat dukungan penuh.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan, rencana dimulainya pembelajaran tatap muka harus diikuti persiapan yang matang dari sisi teknis dan psikologis para peserta didik dan pengajar.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/3/2021), Lestari Moerdijat mengutip juru bicara Satgas Covid-19, pekan lalu, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembukaan sekolah tatap muka akan dilaksanakan di 14 provinsi dan dipersiapkan secara bertahap. Provinsi tersebut, antara lain: Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Bali.

Tahapan yang harus dipersiapkan untuk memulai belajar tatap muka, antara lain adalah tahapan prakondisi sebagai tahapan persiapan untuk pemberlakuan kebiasaan baru. Sikap kehati-hatian pemerintah, yang ditunjukkan dalam bentuk persiapan yang dilakukan secara bertahap, menurut Lestari, merupakan langkah tepat yang harus dilalui sebelum melakukan

pembukaan belajar tatap muka.

Untuk mendukung kelancaran persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Lestari yang biasa disapa Rerie, berharap, dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dalam proses adaptasi yang dilakukan para peserta didik dan tenaga pengajar.

Dukungan tersebut, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, antara lain bisa dalam bentuk kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah atau bentuk dukungan lainnya.

Kesiapan lainnya, menurut Rerie, seharusnya bisa dilakukan sejak dini dalam bentuk membiasakan disiplin menjalankan protokol kesehatan bagi para peserta didik sebelum pelaksanaan belajar tatap muka atau sejak masih di rumah.

Bersama anggota keluarga, ujarnya, para peserta didik mulai dibiasakan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menghindari kerumunan jika bepergian. Dengan sudah terbiasa men-

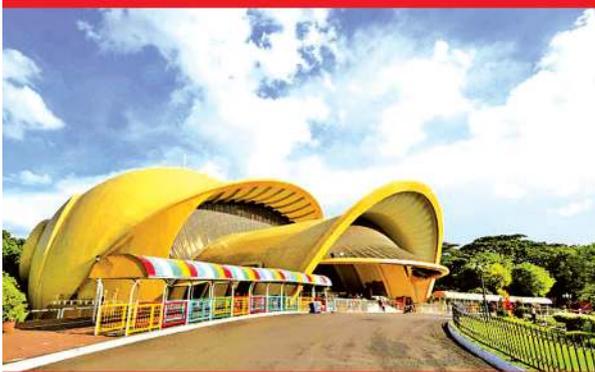
jalankan protokol kesehatan sejak di rumah, Rerie berharap, saat pembelajaran tatap muka di sekolah, para peserta didik sudah terbiasa menerapkan protokol kesehatan dengan temannya.

Rerie berharap, pada tahapan uji coba jelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka benar-benar dilakukan simulasi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar tatap muka, mulai dari berangkat ke sekolah sampai dengan pulang ke rumah.

Rerie berharap, dengan langkah-langkah tersebut dapat dihasilkan pola-pola belajar tatap muka yang benar-benar adaptif di masa pandemi ini. Terpenting, tegasnya, para tenaga pengajar dan petugas di lingkungan sekolah sudah mendapatkan vaksin Covid-19 untuk menekan peluang penyebaran virus corona di lingkungan pendidikan.

Pemerintah pusat menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Dan, belajar tatap muka terbatas bakal dimulai setelah guru dan tenaga pendidikan disuntik vaksin corona (Covid-19). □

Taman Mini Indonesia Indah



Kekayaan Indonesia dan
Gambaran Masa Depan Ada di Sana

TMI hadir tidak hanya menyuguhkan keragaman agama, budaya, flora, dan fauna. Di taman ini juga hadir teknologi masa depan. Ketika di Indonesia belum ada kereta layang, di TMI sudah ada. Saat bioskop masih menyuguhkan film format 2 dimensi, Di Keong Mas sudah berputar format 3 dimensi. Ketika Singapura, Malaysia, dan Thailand belum ada kereta gantung, di taman yang digagas Bu Tien ini sudah tersedia.

Taman yang disebut terinspirasi dari Disneyland dan Timland ini sepertinya memakai konsep One Stop Living. Di dalam satu lokasi, tersedia semua kebutuhan.

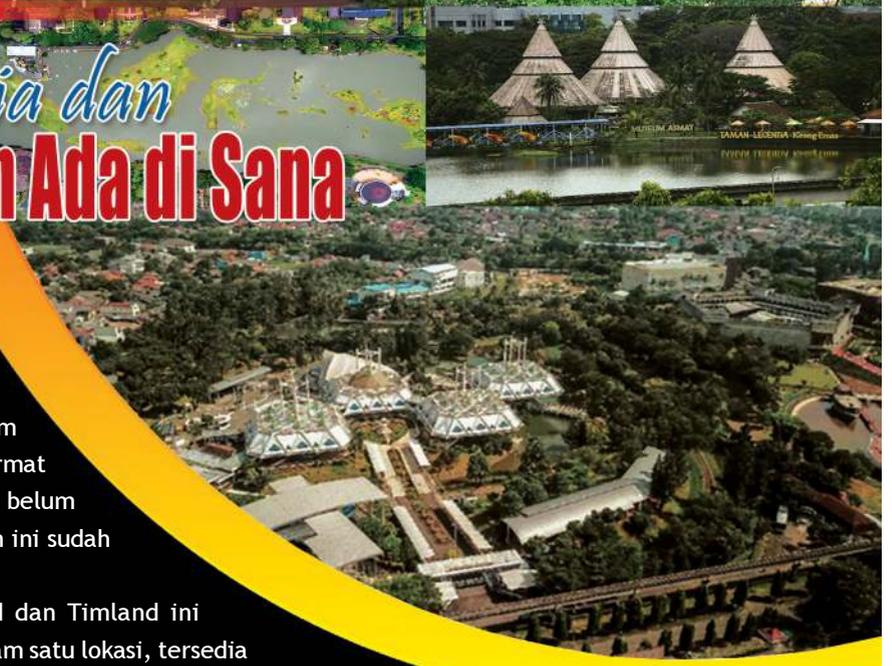


FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

NIATAN Lita, guru Bahasa Indonesia, bersama guru pendamping serta ratusan siswa lainnya untuk *study tour* ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, terpaksa gagal. Covid-19 yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia, membuat rencana kegiatan yang sudah dirancang oleh salah satu SMP di Bandung, Jawa Barat, itu menjadi urung. Padahal mereka sudah memesan delapan bus. Menurut Lita, mereka memilih TMII sebagai lokasi *study tour*, sebab di sana banyak museum. “Selain itu, ada *snowbay* dan tempat rekreasi lainnya”, tuturnya.

Keinginan untuk bisa mengunjungi TMII tetap masih menjadi harapan bagi Lita beserta guru pendamping, dan ratusan siswa SMP di Bandung tersebut. Namun, itu sangat tergantung kapan wabah corona yang telah mendera Indonesia selama lebih dari satu tahun ini akan berlalu.

Meski rencana *study tour* sebuah SMP di Bandung harus ditunda, tapi setidaknya itu menjadi salah satu bukti bahwa TMII sebagai lokasi wisata dan pendidikan memiliki daya tarik tersendiri. TMII tetap menjadi salah satu tujuan wisata yang tak pernah sepi pengunjung, meski saat ini tumbuh banyak lokasi wisata yang lebih modern, menarik, dan menantang, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, seperti Dufan, Seaworld,

Taman Safari, dan Transmart.

Bila kita berada di TMII pada hari Sabtu, Ahad, atau hari-hari libur lainnya, kita dapat menyaksikan puluhan bahkan ratusan bus terparkir di sekitar area TMII. Dari tempelan kertas ataupun spanduk yang terpasang di kaca atau terbentang di samping badan bus, kita dapat mengetahui dari mana rombongan itu berasal, dari sekolah mana dan dari daerah mana. Biasanya rombongan itu datang dari wilayah Sumatera, Jawa, hingga Bali.

Daya tarik TMII lebih terasa pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Presiden Soeharto sepertinya menjadi ‘marketing’ TMII. Buktinya,

ia kerap mengadakan kegiatan di sana. Diliput oleh TVRI dan RRI, serta disiarkan dan dipancarkan ke seluruh Indonesia, hingga membuat lokasi itu menjadi impian bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Di lihat dari sejarahnya, berdirinya taman ini tidak lepas dari ikhtiar keluarga Soeharto. Dari catatan sejarah yang ada, penggagas berdirinya TMII adalah Nyonya Siti Hartinah alias Tien Soeharto. Ia merupakan Ibu Negara atau istri Presiden Soeharto. Ide untuk mendirikan taman ini muncul dari pengalaman Bu Tien – begitu istri Presiden kedua Indonesia ini biasa disapa — mendampingi





Presiden Soeharto mengunjungi berbagai negara di dunia.

Saat mendampingi Soeharto melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan Thailand, Bu Tien katanya sangat terpesona dengan wahana wisata yang ada kedua negara itu. Di negeri Paman Sam, ia terpesona menyaksikan *Disneyland*, sebuah tempat hiburan yang banyak terdapat wahana wisata dan pendidikan yang terbagi-bagi dalam anjungan. Ide untuk membuat wahana yang sama di Indonesia, namun diisi dengan budaya sendiri semakin menguat ketika Bu Tien menyambangi Thailand. Di negeri Gajah Putih itu, Bu Tien melihat *Timland*, sebuah wahana wisata yang juga terbagi dalam beberapa anjungan berdasarkan klasifikasi wisata di sana.

Cipayung, Jakarta. Pada masa itu suasana di sana masih *adem*, segar, rindang, dan tidak sepadat saat ini sehingga mampu menyediakan lahan seluas 100 hektare. Jalan tol pun belum dibangun. Setelah semua ide dan lokasi yang dipilih beres, maka pada 1972 pembangunan TMII dimulai. Anggaran pembangunan pada saat itu mencapai Rp10,5 miliar.

Setelah berproses selama 3 tahun untuk membangun taman itu, pada 20 April 1975, TMII resmi berdiri dan terbuka untuk umum. Pada tahun itu, jumlah provinsi di Indonesia masih 27 sehingga anjungan provinsi yang ada sebanyak jumlah provinsi yang ada saat itu. Namun, ketika terjadi banyak pemekaran maka anjungan provinsi pun bertambah. Anjungan provinsi yang muncul setelah

enam zona: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat. Anjungan itu juga menampilkan baju dan pakaian adat, busana pernikahan, baju tari, serta artefak etnografi seperti senjata khas dan perabot sehari-hari, model bangunan, dan kerajinan tangan. Semua ini dimaksudkan untuk memberi informasi lengkap mengenai cara hidup tradisional berbagai suku bangsa di Indonesia.

Setiap anjungan provinsi juga dilengkapi panggung, amfiteater atau auditorium untuk menampilkan berbagai tarian tradisional, pertunjukan musik daerah, dan berbagai upacara adat yang biasanya digelar pada hari Ahad. Beberapa anjungan juga dilengkapi



Tien Soeharto

Tapi, sumber lain menyebutkan, munculnya gagasan mendirikan TMII setelah Bu Tien mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto di depan anggota DPR GR. Dalam pidato itu, presiden memaparkan tentang keseimbangan pembangunan umum.

Berdasarkan pengalaman saat berkunjung ke Disneyland dan Timland, serta menyimak isi pidato Pak Harto di DPR GR, selanjutnya Bu Tien di rumahnya, di Jl. Cendana No. 8 Menteng, Jakarta, pada 1970, menyampaikan gagasan untuk mendirikan suatu taman, di mana di dalam taman itu dibangun berbagai macam bangunan yang menggambarkan nilai-nilai budaya, agama, flora dan fauna daripada bangsa Indonesia.

Saat itu lokasi yang dipilih adalah di Ceger,

adanya pemekaran, seperti anjungan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan selanjutnya Kalimantan Utara.

Dalam *Wikipedia* disebutkan, di Indonesia setiap suku memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda, bahkan tidak jarang satu suku memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang mereka buat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di TMII, gambaran tersebut diwujudkan melalui anjungan daerah, yang mewakili suku-suku.

Masih menurut *Wikipedia*, anjungan provinsi dibangun secara tematik dibagi atas

kafetaria atau warung kecil yang menyajikan berbagai masakan Indonesia khas provinsi tersebut, serta dilengkapi toko cenderamata yang menjual berbagai kerajinan tangan, kaus, dan berbagai cinderamata.

Indonesia tidak hanya beragam dalam suku dan budaya, tapi bangsa ini juga terdiri dari berbagai agama, sehingga sebagai taman yang menggambarkan keragaman bangsa, di taman ini juga dibangun tempat-tempat ibadah dari agama yang ada di Indonesia. Di TMII ada Masjid Pangeran Diponegoro, Gereja Katolik Santa Catharina, Gereja Protestan Halleluya, Pura Penataran Agung Kertabhumi, Wihara Arya Dwipa Arama, Sasana Adirasa Pangeran Sember Nyawa, dan Kuil Konghucu Kong Miao.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pada masa itu kehadiran TMII merupakan lokasi wisata terbesar di Asia Tenggara. Timland yang lebih dulu hadir dan menjadi inspirasi bagi Bu Tien dalam membangun TMII menjadi terkalahkan.

Untuk melihat taman ini dari sudut pandang yang luas dan tak perlu putar-putar yang melelahkan maka dibangunlah kereta gantung atau *cable car*. Dari *Wikipedia* dipaparkan, kereta gantung yang ada di taman ini memiliki 85 kabin penumpang yang menempuh 3 stasiun A, B dan C. Jalur membentuk huruf V dan jarak tempuh keseluruhan, yaitu 2.688 m dengan ketinggian mencapai 20 m dari permukaan tanah. Pengunjung dapat menyaksikan indahnya “Nusantara” dalam keberagaman; jajaran pulau-pulau, anjungan daerah, dan seluruh sarana rekreasi di TMII dari angkasa. Kereta gantung ini merupakan kereta gantung pertama di Asia Tenggara. Artinya, kereta gantung di TMII (Indonesia) ini sudah ada sebelum di Singapura, Malaysia, dan

Thailand memiliki kereta gantung.

Pun demikian ketika Jakarta dan Palembang suka cita atas hadirnya MRT dan LRT yang memiliki jalur layang dan bawah tanah, transportasi yang demikian sebenarnya sudah ada di TMII. Di taman itu ada kereta layang yang memiliki jalan melingkar sepanjang 3,2 km. Nama kereta layang inilah adalah *Titihan Samirono*. Sebutan *Samirono* ini adalah pemberian Soeharto.

Ketika bioskop-bioskop di Indonesia format filmnya masih menawarkan 2 dimensi, di TMII sudah ada film dengan format tiga dimensi. Film yang berformat tiga dimensi ini ada di Teater IMAX Keong Mas. Dalam *Wikipedia* disebutkan Keong Mas berdiri juga atas prakarsa Bu Tien dan mulai buka pada 20 April 1984.

Perlu dijelaskan, Keong Emas merupakan tempat pemutaran dan pertunjukan film khusus dengan teknologi canggih. Film yang ada mempertontonkan kekayaan alam dan

budaya bangsa melalui tanyangan film layar raksasa dengan menggunakan kecanggihan teknologi sinematografi model Proyektor IMAX, sehingga menonton film di teater ini serasa ikut berada di dalamnya dan ikut pula berperan sebagai pemain.

Jadi kehadiran TMII tidak hanya untuk menggambarkan keberagaman agama, seni, budaya, flora, dan fauna bangsa Indonesia, namun ia juga mampu menunjukkan teknologi masa depan, di samping menyuguhkan teknologi masa lalu, seperti adanya kereta api uap.

Taman ini mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga TMII masih diminati masyarakat di tengah hadirnya tempat-tempat wisata baru yang lebih canggih, seru, dan menantang.

Dari waktu ke waktu, wahana, anjungan, dan tempat rekreasi wisata di tempat ini bertambah. Bukti dari berkembangnya TMII adalah bila saat dibuka luasnya 100 hektare, saat ini taman ini telah bertambah menjadi





150 hektare. Di tempat ini terdapat puluhan museum. Bahkan museum satu-satunya di Indonesia, yakni di TMII. Museum yang dimaksud adalah Museum Indonesia, Purna Bhakti Pertiwi, Keprajuritan Indonesia, Perangko Indonesia, Pusaka, Transportasi, Listrik dan Energi Baru, Telekomunikasi,

Penerangan, Olahraga, Asmat, Komodo dan Taman Reptil, Serangga dan Taman Kupu-Kupu, Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Minyak dan Gas Bumi, dan Museum Timor Timur (bekas Anjungan Timor Timur).

Indonesia tidak hanya kaya agama,

budaya, dan bahasa. Bangsa ini juga kaya dengan aneka flora dan fauna. Aneka flora dan fauna itu bisa dijumpai di TMII dalam suatu taman seperti taman burung, anggrek, kaktus, melati, akuarium ikan air tawar, dan taman bekisar. □

AWG/dari berbagai sumber

Tsunami Protes di Mana-Mana

Rencana pembangunan TMII ditolak oleh mahasiswa dan tokoh masyarakat. Mereka menyebut pembangunan yang dilakukan hanya menghamburhamburkan uang. Soeharto bersikap keras kepada para penentang. Penolakan menjadi senyap suaranya ketika dibentuk badan pengawas yang beranggotakan kedua belah pihak.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI TAHUN 1971, Presiden Soeharto dalam pidato resminya mengatakan, kita jangan melakukan pemborosan-pemborosan, karena sebagian besar rakyat masih hidup miskin. "Marilah kita menggunakan dana dan kemampuan yang kita miliki sekarang hanya bagi usaha-usaha yang perlu dalam rangka mencapai kemajuan," begitu antara lain bunyi pidatonya.

Apa yang dikatakan Presiden kedua Indonesia yang termuat dalam koran *Mahasiswa Indonesia*, 5 Desember 1971, itu dirasa benar oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan apa yang disampaikan pria kelahiran Bantul, Yogyakarta, itu dijadikan dasar oleh mahasiswa untuk melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan Taman

Mini Indonesia Indah (TMII).

Mahasiswa di berbagai kota seperti Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Malang, merasa rencana pembangunan itu bernegasi dengan apa yang telah disampaikan oleh Soeharto. Dalam *historia.id*, diceritakan, pembangunan taman yang terinspirasi dari Disneyland dan Timland itu merupakan proyek mercusuar yang tidak mempunyai banyak faedah. *Mahasiswa Indonesia*, 9 Januari 1972, memberitakan pembangunan TMII bukan skala prioritas pembangunan sehingga tidak mendesak untuk segera diwujudkan.

Generasi muda, mahasiswa, yang setiap menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang cerdas dan mengena, saat mereka menolak pembangunan TMII yang

dianggap sebagai menghambur-hamburkan uang di tengah keterbatasan anggaran negara, membentuk berbagai macam organ. Organ yang dibentuk dilabeli dengan nama-nama yang 'menghujam', seperti *Gerakan Penghematan*, *Gerakan Akal Sehat*, dan *Gerakan Penyelamat Uang Rakyat*.

Para mahasiswa di tahun 1970-an dalam menyampaikan penolakan pembangunan TMII itu menggunakan berbagai macam cara, yakni turun ke jalan atau demonstrasi, menggelar diskusi, dan seminar-seminar besar. Cara demonstrasi yang terbukti sukses menjatuhkan Presiden Soekarno pada 1966, digunakan lagi oleh organ-organ mahasiswa dalam menolak TMII pada waktu itu. Titik-titik sasaran demonstrasi pun dibagikan oleh organ-organ mahasiswa yang ada. *Gerakan Penghematan* melakukan *long march* ke Sekretariat Negara. Sedang *Gerakan Penyelamat Uang Rakyat* menggeruduk Sekretariat Yayasan Harapan Kita (YHK) sebagai pelaksana proyek. Di depan kantor yayasan yang diketuai oleh Bu Tien itu, para aktivis membentangkan spanduk yang bertuliskan nada-nada yang menyentil, yakni *Sekretariat Pemborosan Uang Negara*.

Bila di Jakarta riuh mahasiswa menolak pembangunan TMII di jalan-jalan, lain dengan gaya mahasiswa Bandung dalam melakukan hal serupa. Meski jalan-jalan di Kota Kembang, menurut *historia.id*, sepi dari gerakan mahasiswa namun di kampus-

kampus, di ruang-ruang yang ada, riuh diskusi dan seminar mengenai itu. Dalam diskusi dan seminar itu, rencana pembangunan TMII dikupas secara cerdas dan intelektual. Para pakar, seperti teknokrat, birokrat, wartawan, dan kaum cendekiawan diundang untuk memaparkan masalah-masalah yang ada.

Gerakan penolakan pembangunan TMII pada saat itu seperti bola salju, makin lama menggelinding dan semakin besar. Tidak lagi hanya mahasiswa yang bergerak. Kaum cendekiawan, aktivis HAM, jurnalis, dan budayawan pun ikut melakukan hal yang sama. Tokoh-tokoh yang keras dalam penolakan itu seperti W. S. Rendra, Arief Budiman, H.J.C Princen, dan Mochtar Lubis.

Soeharto tak langsung menyalahkan para pemprotes, mayoritas dari kalangan mahasiswa. Ia mengakui ada “perbedaan pendapat” yang disebutnya “bumbu demokrasi”. Tetapi, lanjutnya, “harus dalam batas-batas keserasian dan jangan hanya ingin menggunakannya sehingga timbul kekacauan, khususnya dalam menghadapi proyek miniatur Indonesia.” Sedang dalam *historia.id*, disebut, Soeharto menilai aksi dan diskusi dari para penentang TMII tidak substansial, agresif, dan ke luar batas. Presiden yang lengser pada 1998 itu menduga ada “Mister X” yang punya tujuan lain di balik protes terhadap pembangunan TMII. Dalam Soeharto: *Pikiran, Ucapan, dan*

demi kepentingan negara dan bangsa, saya akan gunakan Supersemar”.

Ketika Soeharto sudah bereaksi, maka demonstrasi, diskusi, dan seminar yang biasanya aman-aman dan lancar-lancar saja berubah menjadi mencekam. Kejadian demonstrasi di depan Kantor Sekretariat YHK pada 23 Desember 1971 yang awalnya berlangsung damai, tiba-tiba berubah menjadi ricuh. Pasalnya, selepas demonstrasi membentangkan spanduk yang bertuliskan *Sekretariat Pemborosan Uang Negara*, tiba-tiba muncul puluhan orang yang tidak dikenal dengan menghunuskan senjata tajam. Pastinya, kehadiran mereka mempunyai niat yang buruk. Orang-orang tak dikenal itu menyerang demonstrasi yang terhimpun dalam *Gerakan Penyelamat Uang Rakyat*. Aksi brutal itu menyebabkan satu demonstrasi terkena *sabetan* senjata tajam. Di tengah kekacauan, tiba-tiba terdengar suara letusan bedil, *door!* Suara itu menambah ketegangan dan kepanikan. Muntahan peluru dari bedil itu satu menasar ke Kantor Sekretariat YHK dan satunya lagi menasar ke paha mahasiswa.

Kerasnya tindakan terhadap para penentang yang dilakukan oleh pemerintah semakin menjadi-jadi. Wapangkopkamtib Letjen TNI Soemitro melarang semua aktivitas gerakan anti-TMII. Aparatur negara itu juga menahan tokoh-tokoh kritis seperti Arief Budiman dan Princen.

Serunya aksi penolakan pembangunan TMII dan bergemingnya pemerintah tetap melanjutkan pembangunan, membuat DPR turun tangan. Untuk menengahi kedua belah pihak, lembaga negara itu membentuk Panitia Khusus TMII, Maret 1972. Panitia yang ada memfasilitasi pertemuan antara kelompok penentang, yakni mahasiswa, budayawan, jurnalis, dan cendekiawan; dengan perwakilan pemerintah serta YHK.

Dalam *tirto.id* diceritakan, sebelum DPR membentuk panitia khusus, pada awal Januari 1972, Ibu Tien telah mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog. Dialog berlangsung secara tertutup.

Meski demo, diskusi, dan seminar di kampus sudah terjadi serta dialog antara



Presiden Soeharto dan Bu Tien Soeharto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Semakin membesarnya gerakan penolakan itu digambarkan oleh Mochtar Lubis dalam *Indonesia Raya*, 13 Januari 1972, dengan kalimat, *taufan* (sekarang tsunami-red) *protes-protes terhadap proyek mini Indonesia telah berhembus ke segenap penjuru tanah air kita*.

Di awal-awal penolakan, ketika gerakan yang ada belum besar, Soeharto hanya senyum-senyum namun ketika gerakan semakin meluas dan dirasa sudah merisaukan kepentingan dan ambisi, mantan Menpangad itu pun mulai bereaksi.

Tirto.id mengutip *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter* (2004), yang disusun Rum Aly dan yHatta Albanik,

Tindakan Saya, ia mengatakan tahu ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan proyek yang kami cita-citakan itu sebagai satu isu politik. Mereka mencari kesempatan untuk bisa mengganggu kestabilan nasional.

Tak hanya itu, Komandan Komando Mandala itu memperingatkan gerakan penentang TMII agar tidak berperilaku di luar batas. Dia akan menghantam gerakan itu jika berniat menggulingkan kekuasaannya. Dalam, *Mahasiswa Indonesia*, 9 Januari 1972, terungkap kata-kata Soeharto yang mengatakan, “*yang memakai kedok demokrasi secara berlebih-lebihan akan ditindak. Kalau ada ahli hukum yang mengatakan tidak ada landasan hukum,*



kedua belah pihak sudah difasilitasi dan dilakukan, namun semua aktivitas itu tidak menghentikan pembangunan TMII. Malah dari DPR dihasilkan kesimpulan, YHK dipersilahkan melanjutkan pembangunan TMII, namun dengan syarat tidak boleh menikmati fasilitas keuangan negara dan juga tak ada sumbangan wajib. DPR meminta pemerintah

membentuk badan pengawas pembangunan yang memantau aliran dana dan pembangunan TMII. Dari sinilah selanjutnya *historia.id* menulis, suara protes terhadap pembangunan TMII menjadi senyap.

Setelah pembangunan berlangsung selama 3 tahunan, akhirnya pada 20 April 1975, TMII diresmikan. Dalam sambutan

Bu Tien mengatakan, terima kasih kepada para penentang gagasannya. “Karena ketidaksetujuan mereka sebenarnya ingin mengingatkan kami agar kami tidak berbuat salah. Dan, dengan begitu mendorong kami untuk bekerja lebih berhati-hati”, ujarnya. □

AWG/dari berbagai sumber

Setelah Taman Mini, Berdirilah Mekarsari

Di timur Cibubur terhampar taman buah yang bernama Mekarsari. Seperti TMII, taman buah itu digagas oleh Bu Tien. Pengunjung tak hanya menikmati luasnya taman yang ditumbuhi berbagai macam pohon buah-buahan, namun juga bisa menyantapnya dengan cara memetik langsung.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BU NEGARA di masa Pemerintahan Presiden Soeharto, yakni Siti Hartinah alias Tien Soeharto, merupakan sosok yang kaya ide. Sukses pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang telah digagasnya di awal-awal kekuasaan suaminya, tidak membuat ia berpuas diri. Mumpung suaminya berkuasa, gagasan yang ada di pikirannya selalu diwujudkan.

Di awal 1990-an. Bu Tien, demikian akrab dipanggil, ingin membangun suatu kawasan yang luas di mana di sana tumbuh berbagai macam buah-buahan tropis. Untuk menggapai hasrat itu dipilihlah lokasi di Kampung Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada masa-masa itu, suasana Kampung Mekarsari — sama dengan suasana di Kampung Ceger, lokasi

TMII di 1970-an — masih sepi, alami, dan jarang penduduk.

Lewat Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP), di atas lahan bekas perkebunan karet milik PTP IX yang sudah tidak produktif, Bu Tien membangun Taman Buah Mekarsari pada 1990 (www.duaistanto.com). Dalam *Wikipedia* disebutkan, tujuan pembangunan Taman Buah Mekarsari untuk meningkatkan kualitas dan popularitas buah-buahan Indonesia agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional, serta mengangkat harkat dan martabat para petani Indonesia. Dalam mekarsari.com, dipaparkan bahwa taman ini merupakan salah satu pusat pelestarian keanekaragaman hayati buah-buahan tropika terbesar di dunia, khususnya jenis buah-buahan unggul yang

dikumpulkan dari seluruh daerah di Indonesia, sekaligus merupakan tempat penelitian budidaya (*agronomi*), pemuliaan (*breeding*), dan perbanyakan bibit unggul untuk kemudian disebarluaskan kepada petani dan masyarakat umum.

Taman ini juga bertujuan menciptakan kebun hortikultura yang terdiri dari kebun buah-buahan, sayuran, bunga dan tanaman hias, yang berfungsi sebagai kebun koleksi dan sebagai sumber plasma nutfah, dan diharapkan dapat menjadi taman rekreasi hortikultura yang kelak dapat dikembangkan menjadi pusat studi hortikultura, terutama untuk tanaman buah-buahan dan sayuran dataran rendah.

Untuk mencakup tujuan itulah maka pembangunan taman buah ini memerlukan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lahan seluas 264 hektare. Lebih luas dibanding lahan untuk TMII. Setelah melalui pembagian petak berdasarkan jenis-jenis pohon, pada 14 Oktober 1995, Taman Buah Mekar Sari dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto. Bila pada masa itu TMII di bawah Yayasan Harapan Kita, maka sejak 14 April 1994, pengelolaan Taman Buah Mekar Sari berada di bawah PT. Mekar Unggul Sari (MUS).

Dikutip dari *duaistanto.com*, taman ini memiliki 1.470 varietas tanaman buah dan 100.000 pohon, termasuk di antaranya tanaman rempah, tanaman biofarmaka, tanaman pangan, tanaman hias, tanaman sayur, tanaman industri, dan tanaman pelindung. Terkait sebagai pusat penelitian, pemuliaan, dan pembibitan maka di lokasi taman buah ini ada laboratorium untuk menyilangkan banyak varietas tumbuhan.

Sebagai taman yang luas, hijau, dan

banyak pohon buah, Taman Buah Mekar Sari juga berfungsi sebagai tempat wisata, agrowisata. Di sana ada berbagai macam wisata, yakni wisata kebun buah, wisata bermain, wisata air, dan wisata berkendaraan. Pengelola taman buah ini juga menyediakan berbagai macam paket tur.

Dari aneka wisata di ruang terbuka dan luas itu tak heran bila di taman buah itu setiap hari libur terlihat berdatangan rombongan menggunakan bus. Di sana, mereka melakukan kegiatan *outbound*, *tracking*, *hiking*, *camping*, dan kegiatan-kegiatan instan berkebun, bertani, dan beternak, seperti menanam padi, memandikan sapi, dan memetik atau panen sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam *mekarsari.com*, diceritakan, pengunjung melakukan beberapa kegiatan. Para pelajar SMP Tunas Bangsa Jakarta ketika berkunjung ke sana, mempelajari budidaya tanaman dengan metode kultur

jaringan dan belajar cara menanam dengan memanfaatkan media daur ulang. Saat di lokasi, para pelajar itu dipahamkan akan tahapan melakukan kultur jaringan. Kemudian mengunjungi laboratorium untuk melihat dan mempraktikkan tahapan proses kultur jaringan. Selanjutnya siswa diajak menanam dengan memanfaatkan barang yang tidak terpakai, seperti botol plastik air mineral sebagai wadah pot. Tanaman yang berhasil mereka tanam sendiri nantinya akan dibawa pulang dan diharapkan dapat bermanfaat untuk penghijauan di rumah maupun di sekolah.

Suatu ketika di sana juga diadakan acara panen dan makan buah nangka. Nangka yang dipanen dan disantap adalah nangka kandel, dulang, mini, bola, dan telanjang. Saat mengikuti acara itu pengunjung bisa menikmati buah nangka dengan suasana kebun nangka yang asri. □

AWG/dari berbagai sumber

Habib Hasan Al Attas

Bogor

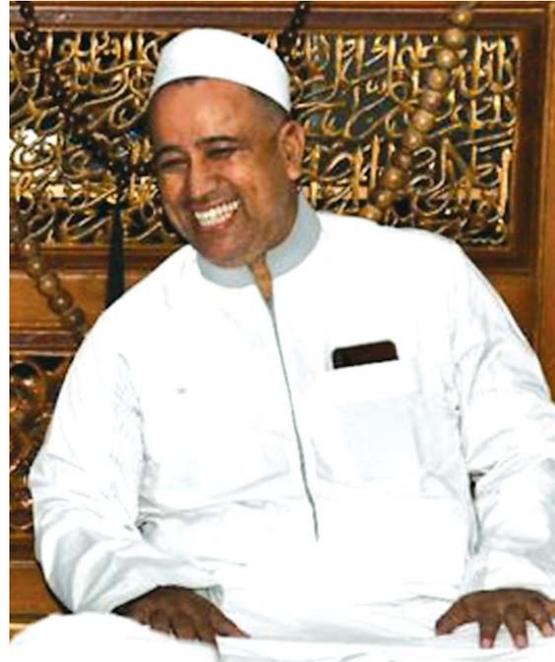
Pemerintah Berikan Perhatian Kepada Ponpes

ALHAMDULILLAH, pendidikan di pondok pesantren saat ini sudah banyak diminati masyarakat. Pemerintah juga sangat memberikan atensi kepada ponpes, dan itu sangat bagus agar kualitas pendidikan ponpes makin baik di masa datang.

Perhatian pemerintah pada ponpes dibuktikan dengan banyaknya pejabat negara yang melakukan silaturahmi dengan ulama di pondok-pondok pesantren. Memang, menurut saya, semestinya begitu. Ada sinergi yang baik antara ulama dan penyelenggara negara, agar semuanya berjalan baik dan diridhoi Allah SWT.

Terkait bidang pendidikan di ponpes, saya harap, jalur birokrasi atau aturan bidang pendidikan untuk pesantren jangan terlalu sulit. Artinya, dipermudah saja, sebab ponpes ini adalah tempatnya generasi muda harapan agama dan bangsa dalam menempuh pendidikan yang bagus.

Untuk itu, saya berharap, mendapat dukungan penuh dari pemerintah, termasuk kebijakan yang baik. Apalagi kebanyakan dari para santri adalah anak-anak yatim yang berasal dari keluarga tidak mampu. □



DER

Viola Pongajouw

Keua BEM Universitas Sam Ratulangi

Haluan Negara untuk Kebaikan Rakyat



PIMPINAN MPR saat ini sedang giat melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat, salah satunya kepada akademisi perguruan tinggi di berbagai kampus. Serap aspirasi ini terkait wacana akan dimunculkannya kembali Haluan Negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Sebagai warga masyarakat Indonesia dan juga sebagai generasi muda, saya berharap agar setiap wacana atau gagasan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak harus benar-benar dipikirkan. Bukan hanya sekedar dibuat, tapi urgensi dari kebijakan tersebut apa.

Urgensi memunculkan Haluan Negara harus dipikirkan secara serius, apakah Haluan Negara ini memang dibutuhkan rakyat atau tidak. Dan, saya sangat mengapresiasi MPR yang melibatkan rakyat untuk mendiskusikan dan saling bertukar pikiran demi bangsa dan negara. □

DER

Ibadah Haji di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan sendi kehidupan umat manusia. Ibadah haji sebagai ibadah yang paling akbar bagi umat Islam tak luput dari terkena dampaknya. Tahun lalu pelaksanaan ibadah ini ditiadakan karena alasan pandemi. Tahun ini masih terjadi perdebatan antara iya dan tidak ibadah haji dilaksanakan. Yang jelas akibat dari tertundanya pelaksanaan ibadah haji ini menyebabkan antrian calon jemaah haji akan semakin panjang. Bagaimana menyikapi masih belum jelasnya pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Berikut pendapat wakil rakyat yang paham masalah itu.

Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB

Jangan Lemah di Hadapan Arab Saudi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

JAMAAH haji dari Indonesia bukan hanya sebagai rombongan jemaah haji, namun juga sebagai delegasi bangsa. Selama ini jemaah haji dari Indonesia terkenal dengan ketertiban dan keteraturannya. Hal demikianlah yang membuat banyak negara ingin belajar bagaimana cara mengelola haji dari Indonesia. Untuk itu, saya berharap kepada Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji agar citra yang baik dari jemaah haji Indonesia ini betul-betul dijaga dan tetap menjadi ciri jemaah haji ketika beribadah di sana.

Tahun lalu pelaksanaan haji ditangguhkan, sebab dalam bahasa agamanya ada *udzur*

syar'i atau ada alasan secara syariat yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajiban haji. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19.

Apakah *udzur syar'i* ini sudah hilang atau belum? Kalau dilihat dari angka yang ada, wabah masih terjadi. Apakah Indonesia dan Arab Saudi sudah sepakat menghilangkan *udzur syar'i* ini? Kalau kedua negara sudah menghilangkan *udzur syar'i* maka ibadah haji tahun ini sudah bisa dibuka kembali.

Saya mendengar kabar, ibadah haji tahun ini akan dibuka dengan jumlah jemaah terbatas. Nah, sekarang terbatasnya itu berapa? Kalau dari 231.000 jemaah kemudi-

an yang boleh berangkat hanya 10% maka yang berangkat 23.000 jemaah. Berarti, ada jemaah yang keberangkatannya tertunda lagi. Menutup ibadah haji selama satu tahun saja membawa dampak akan menambah antrian, apalagi bila tahun ini ditutup lagi atau dibatasi. Kalau berminat naik haji harus segera mendaftar agar antrian tidak bertambah panjang. Bisa-bisa antriannya hingga 2045, saat Indonesia Emas.

Bagi mereka yang perjalanan hajinya tertunda apakah nanti beban perjalanannya menjadi bertambah atau malah dikurangi. Ibaratnya, kalau naik pesawat *delay* akan mendapat *aqua*. Bila *delay* lebih dari 12 jam akan mendapat layanan hotel. Nah, kalau dalam ibadah haji yang tertunda ini bagaimana? Ketertundaan ini bukan kesalahan dari jemaah. Ia sudah antri, sudah membayar, tetapi tidak bisa berangkat. Nah, ini Kementerian Agama harus menjelaskan. Saya berharap, tidak ada tambahan biaya. Kalau di tengah jalan ada perubahan harga itu secara *akad syariah* salah.

Tertundanya ibadah haji ini pastinya akan membawa kerugian pada para jemaah. Untuk itu pentingnya Kementerian Agama agar mengurus haji ini dengan pelayanan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan seaman-amannya. Tujuan berbangsa kita adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dalam ibadah haji itu implementasinya seperti apa?

Kita mendukung pemerintah melakukan lobi-lobi tingkat tinggi agar ibadah haji jangan tertunda lagi. Kalau tertunda lagi rakyat

dirugikan. Sebagai bangsa yang mengirimkan jemaah haji terbesar di dunia, masa berhadapan dengan Pemerintah Arab Saudi lemah. Hal ini jangan sampai terjadi.

Terkait vaksin yang digunakan katanya harus sesuai standar WHO, saya yakin

Kementerian Agama akan melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan vaksin yang sudah digunakan oleh bangsa Indonesia, khususnya para jemaah haji, bisa diterima. □

AWG

Bukhori Yusuf, Anggota MPR Fraksi PKS

Pemerintah Jangan Main-Main Mengurus Ibadah Haji

KITA berdoa dan memohon, mudah-mudahan ibadah haji tahun 2021 bisa terbuka untuk umum, meskipun kita paham dengan kapasitas terbatas. Kami sangat optimistis dan mudah-mudahan, *insha Allah*, Indonesia termasuk negara yang bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Memang kita harus akui pandemi Covid-19 menjadi faktor utama dan terbesar sebagai penyebab terjadinya hambatan pelaksanaan ibadah haji. Para ulama dan pemerintah Arab Saudi, termasuk juga pemerintah Indonesia, menjadi konsen jika ibadah haji dapat terselenggara secara terbuka, tapi tergantung pada situasi pandemi. Bila kita ikut melaksanakan ibadah haji maka kita harus tetap fokus pada masalah kesehatan. Jadi, ibadah haji ini akan disesuaikan dengan situasinya, meskipun demikian harus memenuhi rukunnya.

Meski ada vaksinasi, namun vaksinasi itu belum bisa menjamin bahwa orang tidak tertular atau terpapar Covid-19. Faktanya, juga ada orang yang sudah divaksin ternyata bisa terkena wabah, apalagi kemanjuran dari vaksin yang dipakai hanya 64%. Jadi, masih ada peluang 36% orang yang telah divaksin itu bisa terkena. Oleh karena itu tetap saja fokus pada kesehatan. Kesehatan harus menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.

Kalau terkait dengan persyaratan vaksin yang dilakukan oleh Arab Saudi, saya kira ini tidak terkait hanya masalah kesehatan. Ini juga ada kaitannya dengan masalah perang dagang, antara Amerika Serikat dan Cina, he... he... he... Karena Sinovac,



produk Cina, sementara Arab Saudi ini kan grupnya Amerika, sehingga ini terkait persoalan dagang. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia harus bisa menyakinkan kepada pemerintah Arab Saudi supaya vaksin yang dipakai masyarakat Indonesia bisa diterima. Tidak ada cara lain, karena sesuai dengan rapat kerja kita dengan Menteri Agama, semua calon jemaah haji yang jumlahnya 221.000 harus sudah divaksin. Sehingga ada masa jeda efektivitas vaksin selama 28 hari. Jadi, kalau April ini tidak selesai masalah vaksin maka di sana akan menjadi masalah, sebab pemberangkatan haji kloter pertama tahun ini dimulai pertengahan Juni.

Kalau ibadah haji dilaksanakan sangat terbatas, masalahnya begini. Kalau yang

tidak boleh ikut hanya Indonesia, itu problem besar. Tetapi, kalau yang tidak dibolehkan itu seluruh negara, kecuali para jemaah yang ada di Arab Saudi, seperti pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, saya kira itu bisa dimengerti oleh semua pihak. Tetapi, ketika ada pelarangan kepada negara tertentu, misalnya Indonesia, sampai hari ini Indonesia termasuk negara yang di-suspend atau ditangguhkan oleh Arab Saudi, ini akan berdampak pada persoalan yang lain.

Maka, kita akan terus mempertanyakan kepada pemerintah, kalau sampai kemudian Arab Saudi sudah membuka ibadah haji secara terbuka, tetapi jemaah dari Indonesia masih ditangguhkan, nah itu jangan-jangan pemerintah tidak serius mengurus ibadah umat Islam. Jadi, masalah haji tahun ini menjadi tantangan bagi pemerintah.

Bila dikaitkan dengan antrian ibadah haji yang semakin panjang, itu memang tak terhindarkan. Tetapi saya yakin nanti pada tahun 2030 kita akan mengalami suatu perubahan, karena Arab Saudi membuat Mina menjadi dua kota, kota bertingkat. Kalau itu sudah jadi, sangat mungkin jumlah quota akan bertambah 100%. Kalau 100% berarti jumlah atau quota yang semula 221.000 bisa menjadi 442.000, bahkan bisa lebih. Kalau dalam setahun bisa memberangkatkan 442.000 maka antrian yang selama ini mestinya 40 tahun bisa berubah menjadi 20 tahun, dari 20 tahun menjadi 10 tahun, 10 tahun menjadi 5 tahun. Jadi, sangat memungkinkan lebih banyak dan lebih cepat umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. □

AWG

Hari Pendidikan Nasional

Pendidikan Tinggi Harus Bisa Dinikmati Seluruh Warga Negara

Pendidikan tinggi tidak seharusnya menjadi barang mewah yang hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat. “Karena mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945,” ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, peringatan Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, harus menjadi momentum untuk membangun komitmen kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Sebagaimana diamanatkan Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bamsuet juga menegaskan, jangan ada lagi kelalaian menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai rujukan moral dalam pendidikan nasional.

“Pemaknaan Kampus Merdeka yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menegaskan bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi

harus terbebas dari segala bentuk keterbatasan akses. Pendidikan tinggi tidak seharusnya menjadi barang mewah yang hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat. Karena mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsuet dalam webinar (virtual) Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT), Senin (3/5/21).

Turut hadir, antara lain Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darajat, Wakil Rektor IV Universitas Terbuka Rahmat Budiman, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Prof. Ir. Nizam, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Panca Putra Tarigan, dan Bupati Kepulauan

Sangihe Jabes Ezar Gaghana.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, konsep ‘merdeka belajar’ sesungguhnya telah diamanatkan Konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan memilih pendidikan. Terlihat pada beberapa Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, di antaranya Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1). Hak mendapatkan pendidikan tidak saja dijamin oleh Konstitusi, tetapi juga diakui sebagai bagian dari hak asasi yang melekat pada fitrah kemanusiaan sebagai warga negara.

“Sayangnya, data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat, terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun. Sekitar 1,8 juta diantaranya atau



sekitar 48,6% terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Aksesibilitas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi juga terhambat oleh keterbatasan kapasitas kampus untuk menampung seluruh siswa lulusan pendidikan menengah atas tersebut. Apalagi di daerah luar pulau Jawa dan di daerah pinggiran, di mana jumlah kampus masih sangat terbatas,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, kemajuan teknologi dan perkembangan zaman menjadikan pendidikan di kampus tidak seharusnya ‘terpenjara’ oleh hambatan sekat ruang dan waktu. Sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karenanya, patut diapresiasi keberadaan Universitas Terbuka yang telah

menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah mahasiswa aktif lebih dari 312 ribu, dan telah melahirkan 1,8 juta alumni.

“Sebagai lembaga pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh pertama di Indonesia, UT secara konsisten memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dari segala lapisan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan hingga warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, di mana UT telah menjalin kerjasama dengan KBRI di 42 negara,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPP dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, kiprah UT dalam mendukung implementasi ‘merdeka belajar’ juga telah dimanifestasikan melalui kerjasama dengan 14 perguruan tinggi negeri dan swasta, di

mana mahasiswanya dapat mengambil mata kuliah online di UT. Semakin banyak perguruan tinggi mau ‘membuka diri’ dengan menjadikan UT sebagai barometer dan rujukan dalam pengembangan pendidikan jarak jauh di masing-masing kampus, akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat nyata dari gagasan ‘merdeka belajar’.

“Di sisi lain, memaknai kemerdekaan belajar haruslah berbanding lurus dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Untuk mengukurnya, dapat kita rujuk dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM),” tutur Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini memaparkan, berdasarkan laporan UNDP (United Nation Development Programme), IPM Indonesia tahun 2020 berada di urutan 107 dari 189 negara. Bahkan di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia masih kalah dari Singapura (ranking 11), Brunei Darussalam (ranking 47), Malaysia (ranking 62), dan Thailand (ranking 79).

“Sebagai gambaran pembandingan, survei kemampuan pelajar yang dirilis Programme for International Student Assessment (PISA), pada Desember 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara. Masih tertinggal jauh dari Singapura di urutan ke-2 atau Malaysia di urutan ke-56,” papar Bamsoet.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menggarisbawahi, gambaran di atas mengundang pertanyaan sekaligus kekhawatiran. Mengingat dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir, anggaran untuk pendidikan telah dialokasikan sebesar 20% dari total APBN, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Saya juga mengingatkan, pembangunan sumber daya manusia harus bersifat holistik, tidak hanya ditujukan membangun manusia Indonesia yang cerdas dan terampil secara akademis. Sesuai amanat Konstitusi Pasal 31 Ayat 3 yang menggarisbawahi bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah sistem pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Bamsoet. □



Kunker Syarif Hasan di Manado

Soal GBHN, MPR Berharap Lebih Banyak Masukan dari Akademisi

Wacana besar haluan negara masih terus dibahas MPR bersama elemen masyarakat, termasuk para akademisi di berbagai perguruan tinggi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., mengungkapkan bahwa ruang diskusi seputar menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945, sampai saat ini masih terbuka lebar untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Hal itu sangat dimungkinkan, sebab sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, tentu sebelum mengambil kebijakan, pasti harus melalui musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama, sesuai sila keempat Pancasila.

“Itulah yang MPR sedang lakukan terkait GBHN—yang juga dikenal sebagai Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Sejak awal wacana ini bergulir, MPR periode 2014-2019 kemudian dilanjutkan oleh MPR periode 2019-2024 melakukan kajian secara mendalam dengan melibatkan elemen masyarakat, termasuk para akademisi perguruan tinggi,” katanya.

Berbagai metode penyerapan aspirasi yang dinilai tepat untuk menjangkau gagasan serta pemikiran akademisi, seperti silaturahmi, seminar, Focus Group Discussion (FGD) dilakukan MPR. Kegiatan bisa dilakukan di gedung MPR dengan mengundang para akademisi sebagai peserta, atau MPR yang mendatangi akademisi di kampus-kampus.

Hal tersebut dikemukakan oleh Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini dalam acara Silaturahmi dan Serap Aspirasi di Aula Gedung Pertemuan, lantai IV, Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (3/5/2021).

Hadir dalam kegiatan bertema: ‘Meng-



hidupkan Kembali GBHN,' ini Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ronny Gozal, M.Si., serta para dekan dari berbagai fakultas dan perwakilan mahasiswa.

Dari berbagai kegiatan Silaturahmi dan Serap Aspirasi yang dilakukan, menurut Syarief Hasan, ternyata MPR memperoleh beragam masukan dengan berbagai argumentasi yang cerdas dan ilmiah dari para akademisi mengenai PPHN ini. Antara lain, ada yang berpendapat, tidak perlu ada PPHN karena sudah ada RPJMN.

Lalu ada pula pendapat lain yang mengatakan, perlu memunculkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD. Argumentasinya, agar pembangunan menjadi berkelanjutan dan terarah. Tapi, ada pula pendapat menyatakan, perlu PPHN tapi payung hukumnya cukup Undang-Undang saja, alias tak perlu mengamandemen kembali UUD.

Selain itu, ada beberapa pendapat dan juga pertanyaan menarik disimak seputar GBHN. Jika GBHN dihadirkan melalui amandemen UUD maka akan berimplikasi pada fungsi dan kedudukan MPR. Pertama, kedudukan lembaga MPR mesti dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan Presiden adalah Mandataris MPR. Kedua, apa sanksi ketika penyelenggara negara tidak menjalankan GBHN dengan benar atau malah gagal sama sekali.

"Pendapat yang berbeda itu sah-sah saja, dan semuanya akan kami tampung, kemudian



menjadi materi penting dalam pengkajian GBHN di MPR," ungkap Syarief Hasan. Intinya, lanjut Syarief Hasan, terkait GBHN rakyat sebenarnya tidak melihat atau memperlakukan berbagai perdebatan yang ada. Rakyat hanya akan memerhatikan apakah keputusan yang dihasilkan berdampak bagus dan memberikan kesejahteraan untuk mereka.

Mengingat pentingnya wacana ini, Syarief Hasan mengajak para akademisi perguruan tinggi untuk lebih banyak berpartisipasi aktif agar haluan negara bisa menjadi satu kebijakan yang membawa kebaikan untuk semua terutama rakyat kecil.

Rektor UnsratP rof. Dr. Ir. Ellen Joan

Kumaat, dalam kesempatan itu, memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang membuka dialog seputar wacana besar bangsa Indonesia tersebut kepada civitas akademika Unsrat.

"Diskusi yang kita lakukan ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Saya berharap, semua masukan, buah pikir, dari kami ini akan membantu mempermudah MPR dalam mengambil keputusan. Dan, saya rasa karena bobot kualitas materi ini sangat bagus, kami akan membuat kegiatan lanjutan, seperti FGD secara virtual dengan mengundang lebih banyak akademisi, dan Bapak Syarief Hasan sebagai undangan kehormatan," ujarnya. □

DER



Kabupaten Bogor

Da'i Bagian **Solusi** Permasalahan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa para pendakwah atau da'i Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang besar untuk memajukan bangsa, karena sebagai pendakwah yang dihormati tentu sangat dekat dengan rakyat, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa.

Keunggulan tersebut harus disadari para da'i, sehingga melalui materi-materi dakwahnya bisa memberikan jalan keluar yang menggugah seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan, serta keluar dari berbagai masalah bangsa. "Intinya, saya harap para da'i harus menjadi bagian dari solusi dan jangan malah menambah keruwetan," katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR yang akrab disapa Gus Jazil ini, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Lembaga Dakwah PBNU, di Wisma Tugu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/3/2021).

Hadir dalam acara itu, antara lain Ketua LD PBNU KH. Agus Salim, Sekretaris LD PBNU KH. Moch. Bukhori Muslim, dan para kader dari Lembaga Dakwah Pengurus Cabang NU berbagai daerah seperti Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi sebagai peserta.

Sebagai pembelajaran bagus, Gus Jazil mengajak peserta untuk

menelaah pidato Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari ketika membuka Muktamar ke-17 NU di Madiun pada 1947, seputar 'menghidupkan kembali perilaku orang-orang mulia'. Dalam kesempatan itu Hasyim Asy'ari mengingatkan beberapa hal yang harus dicermati, yakni: pertama, soal agama. Beliau mempertanyakan masih adakah ruh keagamaan di masjid-masjid dan ponpes-ponpes.

Kedua, beliau melihat maksiat terbuka dilakukan dimana-mana. Lalu, beliau mengkritisi ukhuwah Islamiyah yang hanya disebutkan di mimbar-mimbar, kemudian soal politik umat Islam seperti mati suri dan agama dijadikan kendaraan politik. Lebih dahsyat lagi, kata beliau, umat Islam sedang berkompetisi dengan ajaran-ajaran yang menjauhkan dari ruh tauhid. "Contohnya, PKI yang menempatkan kemuliaan dari sisi materi," jelas Gus Jazil. Pesan-pesan itu disampaikan pada tahun 1947, dan ternyata masih sangat relevan di era modern saat ini.

Beberapa masalah bangsa lainnya di masa kekinian yang perlu mendapat perhatian para da'i, lanjut Gus Jazil, di antaranya adalah pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak negatif kepada rakyat, termasuk para da'i. "Umat perlu bimbingan dalam menghadapi dan bertahan dari kungkungan pandemi sesuai syariat agama,"



tambahnya.

Selain itu, era modernisasi teknologi sekarang ini juga menjadi tantangan tersendiri para da'i. Mereka ditantang untuk meningkatkan kualitas diri mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dalam

bentuk memahami dan menggunakan media sosial yang sangat digandrungi masyarakat, seperti What's App (WA), Facebook, Twitter, Youtube, sebagai wadah dakwah.

"Saya tekankan, media sosial itu harus digunakan para da'i. Media sosial saat ini

sangat berpengaruh, karena hadir langsung ke tangan pengguna secara pribadi. Saya sendiri, sering di WA pribadi muncul berbagai informasi seputar agama yang sangat bagus-bagus, tapi ada yang tidak jelas referensinya. Itu sangat berbahaya jika informasi itu salah lantas diyakini masyarakat awam. Para da'i NU bisa hadir di sini dengan referensi ilmu yang terpercaya," paparnya.

Di sesi akhir, Gus Jazil mengajak para pendakwah bangkit bersama rakyat dan menjadi teladan dalam menghadapi berbagai persoalan di Indonesia. "Jadilah teladan yang baik buat umat dan seluruh rakyat Indonesia, karena keteladanan lebih kuat menyampaikan pesan daripada kata-kata. Seraya tidak lupa memohon pertolongan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa agar Indonesia selamat dan sejahtera di masa depan," tandasnya. □

Diskusi Hari Pendidikan Nasional

MPR Ingatkan Bahaya *Learning Lost*



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAKNA dari memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, di antaranya adalah untuk memberi penghormatan kepada Ki Hadjar Dewantara”, ujar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Media Centre, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 3 Mei 2021. Lebih lanjut dalam diskusi bertema ‘Hari Pendidikan Nasional dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi’, Lestari menuturkan, banyak pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang cerdas. “Ia merupakan bangsawan, namun memilih menjadi orang biasa”, tuturnya.

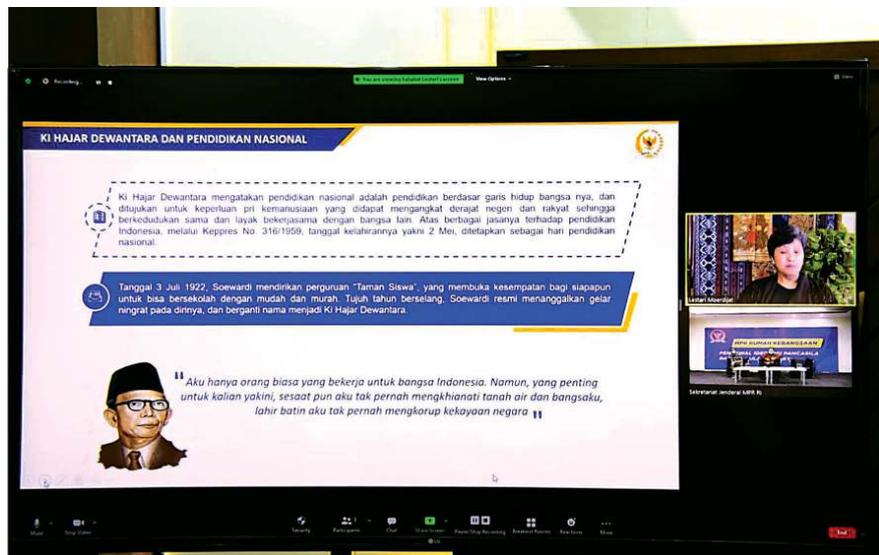
Perempuan yang akrab disapa ‘Mbak Ririe’ itu dalam diskusi terkait pendidikan di Indonesia, mempunyai beberapa catatan. Dia menyebutkan, partisipasi pendidikan di negara ini masih rendah. Meski diakui ada peningkatan, namun hal demikian masih meninggalkan permasalahan. Sebagai negara yang geografisnya luas, bentangan wilayah yang ada merupakan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pendidikan di tanah air. Lebih lanjut, menurut politisi Partai Nasdem itu, selain masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan juga belum maksimalnya pemahaman tentang pendidikan dan mengenal kebudayaan.

Dia mengakui, masa pandemi Covid-19 membuat sektor pendidikan sangat terpu-
 kul.

“Pandemi membuat gerak masyarakat terbatas sehingga proses belajar tak lagi di sekolah”, tuturnya. Dia berharap, dalam masa pandemi yang belum usai, apalagi kasus tsunami Covid-19 di India yang demikian ganasnya, ada cara baru dalam proses belajar.

Dalam masa dunia terkena wabah ini di Indonesia ada sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ), namun hal demikian mempunyai banyak kendala, terutama masalah jaringan internet. “Kalau di kota-kota besar, akses internet mudah, nah masalahnya bila sekolah berada di daerah pelosok”, ungkapnya.

Akibat pandemic, menurut Lestari, membuat ada sekitar 60 juta siswa harus belajar di rumah. “Sayangnya, tak semua siswa bisa belajar lewat PJJ secara ideal”, ujarnya. Akibat pandemi yang berlangsung hampir dua tahun dan kapan berakhir semua tidak tahu membuat Lestari khawatir kita akan berhadapan dengan *learning lost*. Masalah ini jangan dianggap main-main. Ia mengatakan, satu tahun lalu ada anak masuk kelas I SMP dan sampai sekarang belum masuk sekolah. Akibat dari lamanya tak pergi ke sekolah membuat Lestari menyebut ada dampak kesehatan mental yang menimpa para siswa.



“Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah”, tegasnya.

Perempuan pengusaha itu menyatakan demikian, karena pendidikan merupakan prioritas pembangunan. Diakui dalam masa pandemi pemerintah belum bisa menerapkan ekosistem pembelajaran yang ideal. “Masih banyak warga yang belum memperoleh kesempatan belajar”, tuturnya. “Ini yang perlu mendapat perhatian”, tambahnya. Karenanya, PJJ yang ada perlu dievaluasi.

Timbulnya *learning lost* juga diakui oleh Anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi itu. “Kita memperingati Hari Pendidikan Nasional di tengah munculnya *learning lost*,” ungkapnya.

Syaiful Huda mengutip beberapa survei

yang menyebut PJJ efektif, namun saat dia melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan berbicara dari hati ke hati dengan kepala sekolah, ternyata efektifitas PJJ hanya 30%. “Rendahnya efektifitas PJJ kita maklumi sebab pendidik dan siswa masih beradaptasi dengan teknologi,” ungkapnya. Perubahan pada PJJ tidak hanya siswa-siswa yang biasanya belajar di kelas sekarang mereka belajar di luar kelas. Syaiful Huda berharap kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, agar memanfaatkan kondisi yang ada menjadi momentum untuk bangkit. “Misalnya dengan menerapkan pendidikan yang berbasis pada media digital”, tuturnya.

Masa pandemi Covid-19, kata Syaiful Huda, rupanya menelanjangi proses pendidikan di Indonesia. “Ternyata kita tidak siap

PJJ karena soal akses internet”, ungkapnya. “Nah kita juga belum bisa menerapkan proses di sekolah”, tambahnya. Apa yang ada, menurutnya, harus dijadikan hikmah dan pelajaran. “Dengan fakta itu membuat pemerintah bisa membangun program-program yang konkret”, ujarnya.

Terkait *learning lost*, pengamat pendidikan Indra Charismiadi menyebut bahwa sebenarnya dunia pendidikan di Indonesia sudah mengalami *learning lost* sejak 20 tahun lalu. Dia menggunakan data-data dari media dan data asing. “Contohnya, kemampuan matematika siswa di Indonesia rendah,” ungkapnya. Seharusnya, menurut Indra, pendidikan di negara ini sudah harus berbasis pada digital. “Karena arah pendidikan masa depan ke sana”, ujarnya. □

AWG

FGD di Universitas Negeri Makassar

Syarief Hasan Minta Masukan Akademisi Soal GBHN



WACANA seputar GBHN dan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pada awalnya, Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., mengungkapkan bahwa Pimpinan MPR periode 2019-2024 menerima amanah dari Pimpinan MPR

periode sebelumnya (2014-2019) berupa rekomendasi untuk menghidupkan kembali Haluan Negara agar menjadi panduan bagi eksekutif dalam menjalankan pembangunan bangsa ke depan.

Karena wacana yang diamanahkan itu berasal dari rakyat, maka sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan seluruh rakyat In-

donesia, MPR periode saat ini langsung mengambil langkah cepat untuk membahasnya melalui Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sebagai unsur pendukung.

“Kedua lembaga itu melakukan kajian terkait GBHN secara mendalam dan komprehensif sehingga pada saatnya nanti diambil



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

keputusan akan berdampak baik buat seluruh rakyat,” ujar Wakil Ketua MPR Bidang Pengkajian Ketatanegaraan yang biasa disapa Syarief Hasan ini dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan MPR bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM), di Ruang Rapat Senat, Gedung Pinisi UNM Kota Makassar, Kamis (8/4/2021).

Turut hadir dalam acara itu, Rektor UNM Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU., dan tiga narasumber dari kalangan akademisi UNM, yakni: Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum., Prof. Dr. Rifdan, M.Si., Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum., serta para dekan, dosen UNM sebagai peserta.

Namun, lanjut Syarief Hasan, dalam melakukan kajian tentu MPR membutuhkan

materi dan bahan pendukung lainnya dengan melibatkan partisipasi rakyat melalui berbagai program kegiatan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kepada kalangan akademisi perguruan tinggi.

“Selama saya melakukan serap aspirasi kepada akademisi di beberapa kampus, saya melihat respon, kritik, gagasan, dan masukan mereka sangat luar biasa. Kesimpulannya mengerucut pada tiga hal: Pertama, setuju GBHN muncul melalui amandemen UUD terbatas; Kedua, tidak setuju dimunculkannya GBHN, dan ketiga, GBHN bisa hadir melalui UU saja, tanpa mengubah UUD,” ujarnya.

Kepada peserta FGD, Syarief Hasan memastikan bahwa semua masukan yang didapat MPR tentang GBHN akan terekam baik dan menjadi catatan resmi untuk dijadikan bahan kajian. “Saya mengajak seluruh akademisi bisa berperan aktif memberikan buah pikiran cemerlangnya demi terwujudnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya. □

DER



Mempersiapkan Pemuda Menuju Era 5G

Bamsoet Ajak Generasi Muda Perkuat Nilai-Nilai Kebangsaan

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, derasnya laju modernitas zaman telah menghadirkan berbagai lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan itu terasa nyata dalam proses migrasi aplikasi teknologi komunikasi seluler, mulai dari generasi kedua atau 2G, kemudian beralih ke 3G, dan selanjutnya 4G LTE (Long Term Evolution).

“Di saat belum selesai mengadopsi dan menikmati berbagai modernitas dan transformasi digital yang ditawarkan teknologi 4G LTE, kini kita dipaksa untuk mengenal teknologi komunikasi seluler generasi lima atau 5G, yang akan menjadi rujukan paradigma dalam membangun peradaban dan kebudayaan baru,” ujar Bamsoet dalam Webinar ‘Mempersiapkan Pemuda Indonesia Menuju Era 5G’, sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama SAPMA PP (Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila), di Jakarta, Kamis (22/4/21).

Turut hadir, antara lain Ketua Umum SAPMA PP Aulia Arief, CEO dan Founder INFINA Oktorah Irahadi serta kader SAPMA di sejumlah daerah.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, karakteristik teknologi 5G menawarkan berbagai keunggulan. Antara lain, kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi hingga 20 giga per detik dengan kebutuhan waktu akses layanan tunda kurang dari 1 milidetik. Bisa dibayangkan betapa banyak efisiensi waktu yang dapat kita optimalkan.

“Efisiensi ini tidak hanya bermanfaat bagi industri telekomunikasi saja, namun juga dapat diaplikasikan pada berbagai bidang lainnya. Seperti pemerintahan untuk memangkas birokrasi, penyediaan fasilitas umum yang serba otonom, peralatan medis yang modern dan canggih, dan sistem transportasi publik yang terintegrasi,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menerangkan, transformasi digital yang dihadirkan teknologi 5G bahkan berpotensi mendorong lahirnya berbagai inovasi. Ditambah semakin luasnya peluang tumbuh-kembang ekonomi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian rakyat.

“Meskipun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan internet pada semua lini kehidupan telah menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi, namun kita juga harus tetap waspada. Jika tidak bijaksana dalam menyikapi, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya menghadirkan kemubaziran, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, kemubaziran tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa besarnya angka penetrasi internet oleh generasi muda sebesar 85,62%, ternyata tidak berbanding lurus dengan pemanfaatan yang optimal. Sebagai gambaran, survei Kementerian Tenaga Kerja pada 2018 mencatat sekitar 90,61% pemuda menggunakan internet hanya untuk media sosial dan jejaring sosial.

“Padahal sesungguhnya internet dan teknologi informasi sangat potensial dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif. Misalnya, seperti apa yang dilakukan

CEO dan founder INFINA Oktorah Irahadi, yang memanfaatkan internet untuk mengembangkan platform digital mendorong UMKM untuk bergerak maju bersama dengan para influencer, melalui kolaborasi dalam berbagai aspek pengembangan bisnis,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, selain kemubaziran, pesatnya kemajuan teknologi juga berpotensi memberikan dampak negatif. Misalnya, lahirnya generasi yang cenderung bersikap anti sosial. Daya magis modernitas zaman yang direpresentasikan oleh hadirnya gadget canggih yang kaya fitur, membuat generasi muda menjadi terlalu asyik dengan dunianya sendiri, sehingga cenderung abai dan acuh terhadap realita sosial dan kondisi lingkungan di sekitar mereka.

“Sisi gelap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dirasakan dari maraknya hoax yang meresahkan masyarakat, serta derasnya gelombang tantangan kebangsaan yang semakin sulit dibendung. Paham radikal, sikap intoleran, dan berbagai arus pemikiran yang mengabaikan ideology, serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal kita, begitu mudahnya terbawa arus globalisasi yang mendompleng kemajuan teknologi informasi, dan menyasar generasi muda bangsa kita,” pungkas Bamsoet. □

Safari Ramadan Gus Jazil di Priangan Timur

Doa Bersama untuk KRI Nanggala 402



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

TENGGELAMNYA KRI Nanggala 402 menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menghormati dan menandoakan ke-53 prajurit TNI AL yang gugur dalam tugas, ratusan santri Pondok Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada 27 April 2021 menggelar doa bersama untuk KRI Nanggala 402.

Acara yang digelar di Aula Pertiwi itu

dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, pimpinan Pesantren Al Mizan KH. Maman Imanulhaq, serta puluhan tokoh masyarakat dan tentunya para santri pondok pesantren Al Mizan.

Jazilul Fawaid menyebutkan, ke-53 prajurit TNI AL yang gugur itu merupakan syuhada dan pahlawan. Dalam doanya, ia menyelipkan harapan agar mereka, para

syuhada, ini diberi tempat khusus di sisi Allah SWT. “Pemerintah hendaknya juga memberi penghargaan khusus kepada mereka dengan kenaikan pangkat,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu. Mereka, kata Gus Jazil, telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia.

Doa bersama yang digelar selepas salat taraweh, menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB, itu juga merupakan tanda untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa perlu dan pentingnya meningkatkan kemampuan alutsista TNI.

“Kemampuan alutsista bangsa ini harus ditingkatkan dan diperbaiki,” tuturnya. Peningkatan alutsista, menurut alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu sangat penting sebab saat ini seluruh bangsa di dunia sedang berada dalam pertarungan global.

Kehadiran Jazilul Fawaid ke Pesantren Al Mizan merupakan rangkaian Safari Ramadan. “Kegiatan dan kunjungan ke pesantren ini dalam rangka menghormati dan memuliakan Ramadan”, ujar pria asal



Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu. Di bulan puasa, Gus Jazil mengajak kepada umat Islam untuk meningkatkan ibadah. Selama Ramadan, ia mengajak umat Islam untuk lebih meningkatkan ibadah membaca Alqur'an.

Mengingat pentingnya meningkatkan membaca Alqur'an di bulan puasa maka pada malam itu digelar Kajian Alqur'an. "Saya hadir di sini selain diminta memberi ceramah juga didaulat untuk membaca kitab kuning", ungkapnya. "Saya senang karena membuka kembali kebiasaan mengaji," ujar pria yang juga pernah nyantri itu.

Di hadapan para santri, Jazilul Fawaid mengingatkan, agar mengedepankan perkataan yang baik, kalimat *thoyibah*. Dia menekankan hal itu, karena saat ini di media sosial terutama, banyak orang suka menggunakan narasi-narasi yang buruk. Alqur'an menuntun kita untuk menggunakan narasi-narasi yang baik. Narasi yang baik diibaratkan seperti pohon yang memberi manfaat kepada manusia. "Pohon itu tumbuh dan memberi manfaat beraneka rupa, mulai pohonnya rindang hingga bisa berteduh dari panas matahari, memberi kesejukan, serta batangnya bisa dimanfaatkan," paparnya.

Di tengah hiruk-pikuk perbincangan, fitnah, *hoax*, serta ujaran kebencian, Gus



Jazil mengajak para santri menjadikan bulan Ramadan untuk introspeksi diri. "Saatnya kita mengutamakan kalimat *thoyibah*, mendidik, dan baik", ujarnya.

Sosialisasi di Ponpes Miftahul Ulum

Selepas ashar, ratusan warga masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, pelajar, santri, dan petani memenuhi aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Bangunsirna, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 28 April 2021. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, mereka mengikuti kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau populer disebut Empat Pilar MPR, dan sekaligus buka puasa bersama.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, para pimpinan pondok pesantren, jajaran Muspida Ciamis, serta anggota DPRD Jawa Barat, Ciamis, dan Tasikmalaya. "Hari ini kita bersyukur dapat bersilaturahmi, apalagi di bulan suci Ramadan," ujar Jazilul Fawaid. "Saat *ngabuburit*, menunggu buka puasa, ini kita mendapat banyak ilmu, setelah mengaji, selanjutnya mendapat pemaparan mengenai Empat Pilar," tambahnya.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, masyarakat, ulama, petani, dan politisi.

Memiliki jiwa dan kriteria Empat Pilar, menurut Gus Jazil, tidak bisa ditawar-tawar. Lebih lanjut dia mengatakan, pemimpin juga harus mempunyai integritas yang baik dan track record yang jelas. "Pemimpin juga perlu memiliki kepedulian dan ketulusan kepada bangsa dan negara," tuturnya. Tak hanya itu, ia juga harus mampu melayani rakyat sebaik-baiknya. Hal demikian, menurut Gus Jazil, penting agar rakyat yang dipimpin bisa

selamat dan sejahtera. "Di kalangan NU, pemimpin juga harus mewarisi darah ulama," tambahnya.

Dalam rangkaian acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, ia mengingatkan kepada peserta bahwa negara Indonesia ini merupakan warisan dari para ulama. "Empat Pilar juga bagian dari ijtihad dari para ulama pendiri bangsa," ungkapnya. Sebab sebagai warisan ulama maka Empat Pilar wajib untuk terus diperjuangkan, dilestarikan, dan diwujudkan agar tercipta Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.

Menurut Gus Jazil, Empat Pilar merupakan rukun berbangsa dan bernegara. Sebagai rukun maka Empat Pilar sangat vital bagi keberlangsungan Indonesia. "Bila salah satu rukun yang ada roboh maka bangsa ini bisa runtuh," paparnya. Dari sinilah membuat Jazilul Fawaid mengajak kepada semua untuk mengimplementasikan Empat Pilar dalam kehidupan.

Kehadiran Jazilul Fawaid di kota yang disebut Priangan Timur itu juga bagian dari Safari Ramadan. Dalam kegiatan safari Ramadan itu, di mengunjungi Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut. Gus Jazil menjelaskan mengenai pentingnya bulan Ramadan kepada para peserta. Bulan puasa, katanya, merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Saat Ramadan, umat Islam meningkatkan amalan ibadah dengan harapan mendapat limpahan rahmat, berkah, kebahagiaan, dan ampunan dosa dari Allah.

"Bulan ramadan juga bulan istimewa bagi bangsa Indonesia, sebab pada bulan ini kita merdeka," tuturnya. "Kita merdeka pada 17 Agustus atau 9 Ramadan," tambahnya. Merdeka di bulan puasa sebagai bukti bahwa bangsa ini diberkahi oleh Allah SWT. □

AWG



Dialog Empat Pilar

Indonesia Setelah BP7 dan P4 Dibubarkan



Ahmad Basarah



Abdul Mu'ti

WAKIL Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengingatkan, radikalisme dan bom bunuh diri yang melibatkan generasi milenial terjadi paska dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), dan hilangnya mata pelajaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan aparatur negara.

Sejak BP7 dibubarkan, lanjut Basarah, tidak ada lagi lembaga yang berkewajiban mensosialisasikan dasar dan ideologi negara. Dan, sejak P4 ditiadakan, tidak ada lagi pelajaran mengenai dasar dan ideologi negara untuk pelajar, mahasiswa dan aparatur negara. Akibatnya, generasi milenial mencari-cari ideologi dan dasar negara yang dipakai di negara lain, meski belum tentu sesuai dengan Indonesia.

Kondisi ini semakin rumit, karena generasi muda lebih percaya kepada media sosial daripada media massa konvensional. Terbukti tingkat kepercayaan masyarakat kepada medsos mencapai 20,3%. Atau, lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh *website* lembaga pemerintah yang hanya 15,3%.

“Harus diakui, negara pernah abai terhadap pentingnya sosialisasi dasar dan ideologi negara. Dianggapnya sila-sila dalam Pancasila itu bisa diartikan sesuai rezim pemerintahan yang berkuasa. Sehingga saat penguasanya berganti, Pancasila-pun harus berganti. Lantas bagaimana anak-anak

muda akan memahami Pancasila, kalau disosialisasi pun tidak pernah,” ungkap Ahmad Basarah.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Dialog Empat Pilar, yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/4/2021). Selain Basarah, dialog bertema: “Menangkal Penyusupan Paham Ekstrimisme, di Kalangan Anak Muda,” ini juga menghadirkan narasumber Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Menurut Basarah, anak muda gampang dipengaruhi untuk melancarkan gerakan radikalisme dan aksi bom bunuh diri, karena umumnya mereka memiliki jiwa militan yang sangat kuat. Kepada anak-

anak muda itu ditanamkan keyakinan bahwa semua yang datang dari barat adalah kafir dan thogut, termasuk masalah demokrasi dan Pancasila. Akibatnya, banyak anak muda yang terpengaruh dan larut dalam aksi radikalisme.

Maraknya aksi radikalisme dan bom bunuh diri itu terlihat jelas dalam kurun 2000-2020 tercatat 553 serangan teror di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, dalam duapuluh tahun terakhir rata-rata setiap bulan terjadi dua kali aksi teror. Dari sejumlah aksi tersebut beberapa pelakunya diketahui tergolong masih muda. Seperti Nana Ikhwan Maulana (20), pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz-Carlton (2009); Dani Dwi Permana (18), pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott (2009); Sultan Ajiansyah (22), penyerang pos lalu lintas





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Cikokol, Tangerang (2016); Rabbial Muslim Nasution (24), pelaku bom bunuh diri di Polresta Medan (2019); Lukman (26), pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar (2021); dan Zakiah Aini (26), pelaku teror di Mabas Polri (2021).

Dalam diskusi itu, Basarah mengutip ucapan Ali Imron, pelaku bom Bali. Dalam sebuah diskusi Ali Imron menyatakan, melibatkan generasi muda dalam aksi radikalisme sangat mudah. Hanya butuh waktu dua jam. Sementara untuk mengeluarkannya dari kelompok radikal butuh waktu sangat lama. "Inilah salah satu alasan

mengapa banyak generasi milenial terpapar radikalisme," ujar Basarah.

Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, dulu aksi ekstrimisme didorong oleh faktor ekonomi dan kesejahteraan. Tetapi kini, alasan tersebut sudah bergeser menjadi persoalan ideologi, demokrasi, dan politik. Keterlibatan generasi milenial dalam aksi ekstrimisme, kata Abdul Mu'ti, karena pada usia muda mereka tengah mencari identitas dan jati diri. "Kalau tidak mendapat bimbingan yang benar niscaya mereka akan mudah terbawa arus yang mempengaruhinya,"

katanya.

Menurut Abdul Mu'ti, karena ada kekosongan jiwa sehingga mereka gampang dipengaruhi, termasuk untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Juga kurangnya pengetahuan dan keteladanan yang bisa mereka temukan. Selain itu, Abdul Mu'ti menyebutkan, kenapa gerakan anti Pancasila makin banyak. "Karena mereka melihat Indonesia dengan Pancasila tidak semakin baik dan makmur. Oleh sebab itu, muncul keinginan mencari ideologi baru. Apalagi di luar sana ada ideologi yang membuat suatu negara maju," ungkap Abdul Mu'ti.

Keterlibatan generasi muda dalam aksi ekstrimisme, menurut Abdul Mu'ti, juga dipengaruhi minimnya ruang terbuka yang bisa mereka jadikan tempat untuk berekspresi dengan leluasa. Termasuk bersosialisasi dan menyalurkan bakat, serta hobinya. Dan, itu butuh peran serta kehadiran negara secara lebih besar lagi.

Jadi, kata Abdul Mu'ti, harus ada evaluasi sejauh mana keberhasilan kita mengantisipasi ekstrimisme. Sudah pasti, penanganan ekstrimisme harus menjadi kebutuhan bersama atau semesta partisipatif. Bukan hanya BNPT atau Densus tapi bersama-sama, termasuk menggabungkan partisipasi yang berbeda-beda," katanya. □

MBO



Pergantian Antar Waktu Anggota MPR RI Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo kembali menyesalkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/ pelajaran wajib. Serta hilangnya frasa agama dalam Visi Pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Juga tidak adanya jejak pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus Pahlawan Nasional, KH Hasyim Asyari, serta Presiden RI ke-4 sekaligus guru bangsa, KH Abdurrahman Wahid dalam Kamus Sejarah Online yang diterbitkan dan dikelola Kemendikbud.

“Walaupun Kemendikbud sudah menyatakan akan merevisi PP SNP serta mengoreksi Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan Kamus Sejarah Online, kejadian ini tetap menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius dari Kemendikbud. Agar kedepannya lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan,”

ujar Bamsoet saat melantik Muhammad Rizal sebagai anggota MPR RI menggantikan (alm) Ali Taher, dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan Banten III, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (21/4/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan, selain tidak selaras dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mewajibkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/ pelajaran wajib, PP SNP tersebut dibuat tanpa informasi yang lengkap dan pertimbangan yang mendalam. Serta mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap Pancasila dan bahasa Indonesia.

“Sejatinya Kemendikbud harus menjadi garda terdepan yang memastikan Pancasila dan bahasa Indonesia ditanamkan kepada seluruh peserta didik, agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Bukan justru sebaliknya, terkesan menghilangkan

Pancasila dan bahasa Indonesia dalam mata kuliah/pelajaran wajib peserta didik,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, Muhammad Rizal yang baru saja dilantik menjadi anggota MPR RI, sebelumnya sudah lama mengabdikan diri di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Beberapa jabatan penting di lingkungan Kesekjenan MPR RI pernah ia pegang. Antara lain sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Persidangan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Jejak pengabdian yang panjang tersebut bisa menjadi bekal dalam memudahkan yang bersangkutan melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional di MPR RI.

“Khususnya dalam mengawal visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan; Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, yang memiliki tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, kepada setiap elemen bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan budaya, serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan beradab. Termasuk dalam memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan semangat Empat Pilar MPR RI,” pungkas Bamsoet. □

DER

BSC Socio Digitechnopreneur Innovation Awards 2021 Bamsoet Dorong Kreatifitas Start-Up Karya Anak Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus pendiri Brain Society Center (BS Center) Bambang Soesatyo melalui ajang kompetisi BSC Socio Digitechnopreneur Innovation Awards 2021 memberikan penghargaan kepada para start-up millennial yang telah berkontribusi dalam perekonomian dan sosial lingkungan.

Juara pertama start-up KontrakHukum mendapatkan hadiah Rp 50 juta serta tropi Ketua MPR, juara kedua Qlue Smart City memperoleh hadiah Rp 25 juta, dan juara ketiga 8Villages dengan hadiah Rp 15 juta.

Ketiga pemenang telah melalui berbagai tahapan ujian sejak dibuka pendaftaran kompetisi pada 5 Maret 2021. Dari 114 peserta start-up yang mendaftarkan diri, tersaring menjadi 40 peserta, kemudian

diseleksi menjadi 10 peserta, dan mengerucut menjadi 3 besar. Hingga pada acara puncak malam ini, ketiganya berhadapan dengan para Dewan Juri untuk menjawab berbagai pertanyaan guna meyakinkan Dewan Juri dalam memilih yang terbaik dari yang paling baik.

“Bagi yang belum beruntung tidak perlu kecil hati, karena seluruhnya sudah membuktikan diri sebagai pemenang karya anak bangsa yang membanggakan. Ajang kompetisi ini hanyalah gerbang pembuka, karena kompetisi sesungguhnya berada di luar sana, menjadi yang terbaik berdasarkan penilaian konsumen,” ujar Bamsoet dalam acara puncak BSC Socio Digitechnopreneur Innovation Awards 2021, di Komplek MPR, Jakarta, Ahad malam (11/4/21).

Selain Bamsuet, para Dewan Juri lainnya yakni Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Direktur Utama BRI Agro Kaspar Situmorang, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi marketplace Shoppe Panda Patria Sjahrir, serta Assistant Vice President PT. Prodia Indry Wulandari.

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum BS Center Darul Siska, anggota Komisi III DPR RI sekaligus Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, dan Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal.

Acara yang dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, ini hadir pula Ketua Umum BS Center Ahmadi Noor Supit, Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Harian BS Center Prof. Didin Damanhuri, Sekretaris BS Center Olla Dhifla Wiyani, Ketua Penyelenggara BSC Socio Digitechnopreneur Innovation Awards 2021



Anom Reksodirdjo, serta Bendahara Umum BSC Anton Rinaldi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, penyelenggaraan BSC Socio Digitechnopreneur Innovation Awards 2021 dilakukan BS Center bersama BRI, Bukit Asam, BTN, BNI, Pertamina, Bank Mandiri, PLN, Prodia, Warna Warni Entertaint dan Air Minum Viro, untuk mengapresiasi usaha para socio digitechnopreneur muda dalam menggerakkan ekonomi digital. Sekaligus menyebarkan motivasi dan inspirasi bagi generasi muda lainnya.

“Di tengah keterpurukan berbagai sektor perekonomian akibat pandemi Covid-19, sektor ekonomi digital serta teknologi informasi dan komunikasi justru menggeliat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal II-2020, sektor tersebut mampu tumbuh sebesar 10,83%, dan pada kuartal III tumbuh 10,61%,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, Bank Indonesia memperkirakan pada 2020 yang lalu proyeksi pertumbuhan ekonomi digital mencapai Rp 429 triliun, lebih dua kali lipat capaian pada tahun 2019 sebesar Rp 205,5 triliun. Sementara Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan pada 2025 mendatang, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai US\$ 124 miliar.

“Optimisme tersebut tidak berlebihan. Mengingat pertumbuhan investasi start-up di Indonesia pada 2021 diperkirakan mencapai US\$ 4 hingga US\$ 5 miliar, atau naik sekitar dua kali lipat dari 2020. Ditopang berlimpahnya jumlah pengguna internet, dari sekitar 400 juta pengguna internet di Asia Tenggara, sekitar 196 juta di antaranya berasal dari Indonesia,” terang Bamsuet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini juga mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah membangun jaringan backbone serat optik nasional Palapa Ring sepanjang 348.416 kilometer, mengelola enam satelit dan menyiapkan dua satelit baru, serta mendirikan 116.982 BTS (Base Transceiver Station). Ditambah program ‘Gerakan Nasional Siberkreas’ untuk pengembangan keterampilan pasar digital, program ‘Digital Talent Scholarship’ bagi puluhan ribu penerima beasiswa, dan program ‘Digital Leadership Academy’ untuk meningkatkan keterampilan digital tingkat advance.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Tidak heran jika Indonesia menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan start-up. Hingga awal Maret 2021, jumlah start-up di Indonesia tercatat mencapai 2.219 unit, terbanyak kelima di dunia setelah AS, India, Inggris, dan Kanada. Dari 2.219 start up tersebut, empat diantaranya masuk kategori unicorn yang mempunyai valuasi lebih dari US\$ 1 juta dan satu decacorn yang mempunyai valuasi lebih dari US\$ 10 juta,” tandas Bamsuet.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan & Distribusi (ARDIN) Indonesia ini mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Mengingat dari 2.219 start-up di Indonesia, mayoritas masih berdomisili di Pulau Jawa. Ditambah maraknya start-up penjualan online (marketplace) yang justru malah menjadi gerbang masuk berbagai barang impor.

“Kita patut mendukung langkah marketplace Shoppe melalui Sekolah Ekspor untuk melahirkan 500 ribu eksportir pada 2030. Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, KADIN, dan SMESCO. Ditambah adanya BSC Socio Digitechnopreneur Innovation Awards 2021 diharapkan bisa merangsang lebih banyak lahirnya start-up yang menjadi gerbang ekspor bagi produk UMKM Indonesia,” pungkas Bamsuet. □

DER

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



PANCASILA



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Syaiful Huda, Anggota MPR Fraksi PKB

Pancasila Wajib Diajarkan pada Seluruh Rakyat Indonesia

AKHIR-AKHIR ini mata pelajaran atau mata kuliah wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi perbincangan di masyarakat. Pasalnya, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib di sekolah dan perguruan tinggi. Setelah mendapat kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk Pimpinan MPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengajukan revisi atas PP Nomor 57 Tahun 2021.

Terlepas dari kontroversi seputar PP tersebut, pendidikan Pancasila di sekolah memang mengalami pasang surut. Nomenklatur pendidikan Pancasila kerap berubah dalam kurikulum. Misalnya, dulu dikenal mata pelajaran Kewarganegaraan, kemudian berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), lalu berubah

lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dan, sekarang ada upaya mengembalikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Berkaitan dengan pendidikan Pancasila di sekolah, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PKB, Syaiful Huda. Berikut wawancara dengan Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan. Petikannya:

Setelah pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi mata pelajaran khusus di sekolah, sejak beberapa waktu lalu banyak desakan untuk mengembalikan pendidikan Pancasila di sekolah. Menurut Bapak seberapa penting dan urgent memasukkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran khusus di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi?

Sebagai negara demokrasi yang sangat beragam dengan berbagai perbedaan maka harus ada alat atau cara yang bisa menyatu-

kan cara pandang dalam bernegara. Salah satu alat tersebut adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang diwariskan founding father negara ini sebagai pengikat. Sedangkan cara terbaik yang bisa diterapkan oleh pemerintah dalam menyatukan pandangan warga negaranya dalam berbangsa dan bernegara adalah melalui pendidikan. Sebab, selain pendidikan sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan pengajaran akhlak, juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk ideologisasi (menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila).

Karena itu, saya menyarankan, pendidikan Pancasila harus dimulai sedari dini selaras dengan pendidikan agama, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sudah saatnya kita memikirkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengajar Pancasila dengan berbagai treatment. Jika setiap pengajar mata pelajaran Pancasila memiliki kualitas yang baik maka mereka menjadi kepanjangan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai (sila-sila Pancasila)

dalam kehidupan sehari-hari.

Apakah dengan demikian mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila wajib diajarkan (menjadi mata pelajaran wajib) mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi?

Pancasila sebagai ideologi bangsa harus ditempatkan pada kedudukan wajib diajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya dalam pendidikan. Karena dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita sebagai warga negara mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat di tengah keheterogenan suku, adat, budaya, dan bahasa. Lebih jauh lagi, nilai-nilai Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa, memunculkan sikap pluralisme dan gotong royong. Nilai-nilai dasar ini sebagai bekal bangsa kita untuk tidak mudah menerima paham dari luar.

Tetapi persoalannya, pemerintah malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP itu justru tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib. Setelah mendapat banyak kritik dari masyarakat, termasuk Pimpinan MPR, Kemendikbud akhirnya merevisi PP tersebut. Apakah ini bermakna pendidikan Pancasila kurang mendapat perhatian?

Tidak tepat jika pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, meniadakan mata pelajaran Pancasila dalam dunia pendidikan. Kita ketahui bersama mengapa PP ini menimbulkan



kan polemik di masyarakat? Hal ini karena ada beberapa hal yang secara substansial (kesalahan konsideran) dan prinsip seperti ideologi negara Pancasila dan alat pemersatu bangsa semisal Bahasa Indonesia tidak secara kontekstual tertuang dalam PP tersebut.

Secara pribadi saya mengapresiasi atas kelegowoan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud sudah mau menerima masukan dari berbagai pihak, baik dari pegiat pendidikan (NU, Muhammadiyah, PUI, dan lain-lain), PGRI, masyarakat, maupun komuniras pendidikan lainnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak menjadi mata pelajaran wajib karena memang tidak tercantum dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga PP sebagai turunan dari UU tidak menyebutkan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Jadi, bagaimana PP itu seharusnya?

Dalam berbagai kesempatan, kami menyampaikan beberapa kesalahan pada PP No. 57 Tahun 2021, di antaranya kesalahan menentukan konsideran, tidak dicantumkannya pendidikan Pancasila, tidak dicantumkannya pendidikan Bahasa Indonesia, hilangnya satuan pengawas pendidikan, dan hilangnya Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Karena itu, saya menyampaikan sikap dan

pandangan, yaitu: Pertama, mendesak pemerintah untuk merevisi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan revisi utama yaitu mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan.

Kedua, revisi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan harus segera dilakukan dan memerhatikan aspirasi masyarakat, dengan melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan pendidikan agar tidak terjadi kesalahan yang berulang.

Kembali kepada persoalan pendidikan Pancasila. Saat ini kita sudah memiliki BPIP, badan semacam BP7 pada masa Orde Baru. Apakah saat ini perlu dihidupkan kembali penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) tentu dengan metode yang bukan indoktrinasi?

Kita tahu saat ini pemerintah membentuk BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Selanjutnya tinggal menunggu badan ini bekerja dengan lebih eksploratif dalam pelaksanaan sosialisasi Pancasila. Kolaborasi menjadi kunci agar badan ini bisa bersinergi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun masyarakat di semua sektor kehidupan masyarakat.

Selain itu, penanaman ideologi Pancasila juga harus lebih soft dengan pendekatan humanis agar lebih mengena dan dapat diterima di semua golongan.

Selain BPIP, lembaga negara MPR menjadi satu-satunya lembaga negara yang juga mendapat tugas dari UU untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila yang dikemas dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi ini dilakukan Pimpinan MPR dan seluruh anggota MPR (anggota DPR dan anggota DPD). Bagaimana Bapak melihat efektivitas penanaman nilai-nilai Pancasila melalui sosialisasi Empat Pilar MPR?

Sejauh ini MPR sudah menjalankan perannya sebagai lembaga yang menyosialisasikan Pancasila sebagai pilar negara, selain pilar lainnya yaitu UUDNRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang menjadi catatan adalah agar intensitas sosialisasi Empat Pilar MPR lebih dimasifkan dan kegiatannya ditambah sehingga capaian di masyarakat menjadi lebih besar. □





Aksi Dewa Budjana di *Sound of Borobudur*



Dewa Budjana

TAK disangka ternyata sebagian dari pahatan relief di candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, itu terdapat 300-an relief tentang alat-alat musik abad ke-7. Berbagai jenis alat musik kuno, seperti alat musik tiup, petik, dan pukul terdapat di sana.

Alat-alat musik di dinding candi itu bukan hanya berasal dari Jawa, melainkan juga dari Kalimantan dan dari negara lain, seperti India dan Thailand. Alat-alat musik kuno ini kemudian dihidupkan kembali oleh beberapa musisi Indonesia dalam pagelaran music

'Sound of Borobudur' di Omah Mbudir, Magelang, 8 April 2021.

Dewa Budjana termasuk salah satu musisi yang terlibat dalam kegiatan tersebut, selain Tri Utami dan Purwacaraka. "Ini tidak mudah. Kami melakukan riset panjang tentang alat-alat musik tersebut, baru kami bisa sajikan dalam bentuk pagelaran musik," ungkap Dewa. Musiknya tidak bergenre, suara yang dihasilkan universal.

"Ini menggambarkan bahwa dulu di wilayah Borobudur ini pernah menjadi pusat peradaban dunia musik dunia. □

DER

Lebaran Nggak Gelar Open House

KARENA pandemi Covid-19, artis **Vicky Shu** menyambut Idul Fitri tahun ini tak menggelar open house di rumahnya. “Biasanya, setiap lebaran, saya adain open house keluarga, teman, fans, tetapi tahun terpaksa tidak digelar dulu,” katanya.

Namun, kata pemilik nama lengkap Vicky Veranita Yudhasoka, hanya open house yang ditiadakan. Sedangkan untuk THR buat pekerja rumah tetap dibagikan. “Amplop juga ya ke keponakan-keponakan itu gak lupa lah, pasti aku siapin,” ujarnya.

Finalis Miss Indonesia 2007 mewakili Provinsi Jawa Tengah ini mengajak seluruh warga masyarakat agar menaati prokes dan menerapkan gaya hidup sehat agar tidak terkena virus. Kita berharap virus corona ini segera hilang. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Vicky Shu



Hengky Koerniawan

Pahit Manis Jadi Artis dan Politisi

DIA MANTAN artis film dan sinetron yang sekarang berkiprah menjadi politisi. **Hengky Koerniawan** adalah artis dimaksud, yang kini sebagai Plt Bupati Bandung Barat. Bagi Hengky, dunia entertainment dan politisi, apalagi menjadi anggota DPR, tantangannya hampir sama.

“Saat masih aktif di dunia entertain sering banget di gosipin, persaingannya ketat. Di politikpun demikaian, kepribadian kita juga sering juga diubek-ubek. Makanya, kita mesti ekstra sabar dan selalu menghadapinya dengan bijak, terutama memberikan penjelasan dan pemahaman kepada publik. Keluarga juga harus diberikan pengertian tentang profesi yang kita jalani saat ini,” ujar Hengky saat hadir dalam salah satu acara bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, April 2021.

Pesan saya kepada generasi muda Indonesia agar tak pantang menyerah dalam menggapai masa depan. Raih apa yang kalian cita-citakan dengan kerja keras, dan setiap sesuatu bertujuan baik pasti akan berhasil,” katanya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ramadan di Selatan Jakarta Bubur Kacang Hijau Gratis untuk Buka Puasa

RAMADAN telah berlalu, tetapi kenangannya masih terasa hingga sekarang. Kenangan terhadap khususnya Ramadan memang tidak mudah dilupakan, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka hikmah dan kenangan puasa akan selalu terngiang selama sebelas bulan, hingga bulan puasa tahun berikutnya kembali datang.

Bagi sebagian masyarakat Ibukota, khususnya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, puasa tak bisa lepas dari hadirnya pasar tiban takjil. Di balik gedung bertingkat dan di tengah kepadatan tiga ruas jalan besar, yaitu Gatot Soebroto, Pasar Minggu, dan Warung Buncit, terdapat keramaian yang datangnya hanya pada bulan suci Ramadan. Keramaian itu dikenal sebagai Pasar Takjil.

Pasar Takjil ini menyediakan berbagai jenis jajanan berupa makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Segala macam gorengan, lauk pauk, serta makanan untuk berbuka lainnya tersedia di sana. Pasar takjil ini terbilang sangat ramai. Ramai pedagangnya dan ramai pula pengunjung yang datang.

Pedagang yang menjajakan dagangannya di Pasar Takjil ini ratusan jumlahnya. Mereka menempati jejeran lapak-lapak tempat

berjualan yang sangat panjang. Mulai dari pintu masuk Jl. Pancoran Barat, lalu bercabang dan mengular di jalan Mampang Prapatan dan sekitarnya. Setidaknya ada tiga wilayah kelurahan yang dipakai untuk membuka Pasar Takjil. Antara lain Pancoran,



Tegalparang dan Mampang.

Dari ratusan lapak yang menjajakan makanan berbuka tersebut, terdapat satu lapak yang membuat takjub *Majelis*. Tidak seperti lapak lain yang tampak sibuk bertransaksi. Sore itu jarum jam masih

menunjuk pukul 16.30 WIB, sang pemilik tempat masih membiarkan lapaknya tetap kosong. Tidak ada satupun barang minuman atau makan yang tersaji di sana. Padahal, calon konsumen sudah pada datang, membentuk barisan panjang, mulai antri.

Baru tiga puluh menit kemudian, tepatnya pukul 17.00 WIB, barulah satu-persatu barang berupa takjil itu mulai tersedia. Beberapa perempuan berhijab tampak membawa baki berisi gelas plastik penuh dengan bubur kacang hijau. Begitu tiba, isi dalam baki itu ludes seketika, begitu seterusnya hingga antrian habis.

Itulah aksi bagi-bagi bubur kacang hijau secara cuma-cuma. Kegiatan tersebut bisa ditemukan di bilangan Jl. Pancoran Barat XI, tepatnya di samping Sekretariat DPP Persatuan Umat Islam (PUI) atau depan Masjid Al Inabah.

Karena pembagian bubur kacang hijau gratis ini berbaur dengan puluhan pedagang takjil lainnya, praktis bagi-bagi takjil yang satu ini tak banyak yang menyangka dibagi secara gratis. Kecuali oleh mereka yang memang sudah mengetahui kegiatan tersebut.

"Yang belum pernah pasti tidak tahu kalau



bubur kacang hijaunya dibagikan cuma-cuma. Mereka pasti mengira bubur ini dijual, sebagaimana takjil lain yang banyak terdapat di daerah ini,” kata Hj. Yayah Hidayah kepada Majalah *Majelis* saat berkunjung ke sana sesaat sebelum berpuka puasa, pada Ramadan 2021 lalu.

Bagi keluarga H. Ahmadi Thaha dan Hj. Yayah Hidayah, kegiatan pembagian bubur kacang hijau secara cuma-cuma ini sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Atau tepatnya dimulai pada bulan puasa tahun 2019.

Awal mulanya bagi-bagi takjil gratis tanpa sengaja. Ceritanya, seperti umat Islam yang lain, Hj. Yayah Hidayah setiap memasuki Ramadan selalu berusaha untuk berbagi takjil kepada para tetangga, dan orang-orang yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Secara kebetulan saat itu takjil yang hendak dibagikan sudah habis. Rupanya, ada seseorang yang begitu berharap mendapatkan takjil dari Hj. Yayah Hidayah dengan cara mengiba.

“Kita kan bikin bubur kacang hijau sekedarnya saja, dan waktu itu benar-benar sudah habis. Tetapi, orang itu tidak mau mendengar, bahkan dia meminta saya membelikan takjil yang dijual di sekitar rumah,” cerita Yayah.

Rupannya peristiwa tersebut membuat Yayah merasa iba. Hj. Yayah jadi sadar bahwa takjil yang bukan sesuatu yang istimewa itu ternyata sangat dibutuhkan orang lain. Bahkan, sampai ada yang berani meminta-minta, karena saking membutuhkannya. Nah, sejak

itulah Yayah bertekad menyediakan takjil berupa bubur kacang hijau, salah satu kudapan yang juga disukai suaminya sendiri.

Untuk memenuhi hasrat tetangga mendapatkan takjil cuma-cuma, perempuan asal Cirebon itu memasak 7 Kg kacang hijau setiap hari. Selain itu, Yayah menggunakan santan asli dari lima butir kelapa, kemudian 3 Kg gula merah dan 3,5 Kg santan. Bubur tersebut mulai dimasak pukul 08.00 pagi dan matang pukul 11.00 siang. Sebelum dibagikan, kudapan tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu agar saat dibagikan sudah hangat-hangat kuku.

Ganti Celana

Selain menunggu orang datang untuk mengambil takjil, ada juga sebagian bubur kacang hijau itu sengaja dikirimkan kepada tetangga. Rata-rata, mereka yang mendapat kiriman itu adalah yang tengah terkena musibah, sakit atau sudah tua. Tetapi, cara itu sempat mengundang curiga. Mereka yang mendapat kiriman bubur mengira disuruh membeli, padahal takjil itu dibagikan cuma-cuma.

Intinya, banyak kisah yang sudah menghampiri keluarga H. Ahmadi Thaha dan Hj. Yayah Hidayah selama tiga tahun menyediakan takjil gratis untuk berbuka puasa. Ada beberapa tetangganya yang kemudian ikut membantu menyediakan bahan dasar pembuatan takjil. Ada juga yang menitipkan makanan lain untuk dibagikan.

“Pada awalnya kita juga sempat dituding sebagai penyebab keributan dan kemacetan, karena warga yang berkerumun sangat banyak. Kemudian kami sampaikan kepada pak RT, sampai akhirnya pak RT turun tangan ikut mengatur warga agar berbaris teratur alias mengantri,” ujar Yayah Hidayah.

Mengingat antusiasme warga untuk mendapat takjil sedemikian besar, Yayah beserta suaminya sempat berfikir untuk menambah jumlah kacang yang dimasak. Apalagi, beberapa tetangganya juga menyatakan, siap membantu memberikan bahan dasar pembuatan bubur. Namun, rencana itu urung dilakukan, karena yang ada saja sudah menyita banyak waktu dan tenaga.

“Dari apa yang kami lakukan saja sudah menyita banyak waktu dan tenaga, apalagi usia kami makin tua. Beruntung ada ibu-ibu yang membantu memasukkan dan membungkus kacang hijau ini menjadi 180 cup yang siap dibagikan,” tutur Yayah lagi.

Ada cerita unik dan mengharukan. Suatu ketika, kata Yayah, ada kejadian seorang remaja mengenakan celana pendek dan meminta dua gelas kacang hijau. Tak lama kemudian remaja itu balik lagi dengan mamakai celana panjang dan berganti baju. Ketika disapa kenapa ganti baju? Anak itu bilang: “Kan hanya boleh mengambil dua gelas, sementara di rumah ada dua orangtua saya yang juga minta bubur kacang hijau yang sama,” cerita Yayah penuh haru. □

MBO

H. Jon Erizal, SE., MBA

Politisi Yang Pengusaha



FOTO-FOTO:ISTIMEWA

HARI raya Idul Fitri selalu memberikan kenangan mendalam bagi kaum muslimin di Indonesia. Karena Lebaran identik dengan kegiatan bersilaturahmi. Sayangnya, dalam dua tahun terakhir, perayaan Hari Kemenangan itu tidak bisa dilakukan sebagaimana biasa. Mudik untuk bertemu orangtua dan sanak saudara tidak bisa dilakukan dengan leluasa, karena pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman. Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 maka kegiatan silaturahmi harus dibatasi.

Meski begitu, Lebaran tetap merupakan momen spesial yang membahagiakan. Begitulah yang dirasakan oleh H. Jon Erizal, SE., MBA., (59), Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) MPR RI. Apalagi, tatacara perayaan berlebaran di daerah asalnya, yaitu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memiliki keunikan tersendiri, dan tidak sama dengan daerah lain.

"Kami melaksanakan silaturahmi dan bermaaf-maafan secara berkelompok, berkeliling ke semua anggota rombongan. Terkadang itu tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, karena jumlah rombongannya banyak, bisa mencapai ratusan orang. Besoknya ganti rombongan dan yang dilakukan begitu juga. Jadi, bisa satu minggu kita berkeliling. Dan, itu sangat berkesan," kata pria kelahiran 30 Desember 1961 di Kampung Parit Bangkung, Bengkalis, Riau, saat berbincang dengan Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Selain berlebaran, menurut Jon Erizal, ada juga tradisi lain yang membuatnya ingin mudik. Tradisi itu adalah *pitulikuran* (27) pada

malam 27 Ramadan. Pada malam itu masyarakat di kampungnya ramai-ramai membuat dan memasang lampu terbuat dari bambu, kemudian merangkainya menjadi gapura, dan dilombakan.

Tradisi pitulikuran ini sangat unik dan mungkin tidak ditemukan di daerah lain. Pada kesempatan itu, masyarakat berkumpul, bergotong royong, dan bersilaturahmi. Dan, itu menimbulkan kesan yang mendalam. Karena itu, tradisi pitulikuran ini cukup layak didukung agar menjadi salah satu obyek wisata religius.

Sayangnya, karena alasan pandemi Covid-19, pada Ramadan dan Idul Fitri dua tahun terakhir ini tradisi itu tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasa. Dan, itu sangat disayangkan oleh masyarakat. Padahal, baik dalam tradisi *pitulikuran* maupun perayaan Idul Fitri tidak hanya ritual keagamaan dan sosial saja yang diuntungkan, tetapi juga aspek ekonomi. Karena dalam kedua tradisi tersebut, sektor ekonomi ikut bergerak.

Bahkan, menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, pandemi Covid-19 bukan hanya merusak suasana perayaan *pitulikuran* dan Lebaran, tapi juga meluluhlantakkan perekonomian. Dampak Covid-19 terhadap sektor ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat tajam dan bahkan menjadi minus. Negara-negara di dunia tengah mengalami krisis, bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga kesehatan dan berdampak pada krisis sosial.

Karena itu, DPR menyetujui keinginan pemerintah agar defisit



anggaran bisa melebihi dari 3%. Ini penting agar pemerintah bisa lebih luasa mengambil langkah-langkah penanganan akibat Covid-19. Karena penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak, jauh berkurang dari harapan yang sudah ditetapkan.

“DPR berharap, anggaran pemerintah yang diperoleh melalui cara berhutang itu bisa dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan penanganan Covid-19, serta menaikkan pertumbuhan

ekonomi. Jangan sampai anggaran yang asalnya dari berhutang itu dialokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif,” harap ayah empat anak ini. Ini penting, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri dari pulau-pulau. Dan, itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Karena, hingga kini, informasi tentang Covid itu belum merata. Buktinya, masih banyak anggota masyarakat yang belum mau divaksin.



“Ada juga persoalan ekonomi yang makin rumit. Pengangguran, misalnya, jumlahnya pasti terus meningkat. Memang ada sektor-sektor yang lumayan bertumbuh, seperti kuliner, kesehatan, dan beberapa sektor lainnya. Tapi perhotelan, wisata, pabrikan manufaktur dan transportasi semua itu ikut terpuruk akibat Covid,” kata suami dari Rita Benny Latief ini lagi.

Jon Erizal mendukung penyaluran bantuan langsung tunai, dibanding bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok. Karena, pelaksanaannya lebih mudah, tinggal transfer ke bank-bank pemerintah. Pemberian bantuan langsung tunai juga bisa berkontribusi memutar roda ekonomi. Karena dengan cara itu, masyarakat akan membelanjakan uangnya di warung-warung sekitar mereka tinggal.

Perahu Besar NKRI

Jon Erizal ditunjuk menjadi Ketua Fraksi PAN MPR menggantikan Ketua sebelumnya, Ali Taher Parasong, yang meninggal dunia. Pengangkatan Jon menjadi Ketua Fraksi PAN MPR tertuang dalam surat keputusan nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/III/2021. Salah satu pertimbangan penunjukan Jon Erizal sebagai pengganti Ali Taher adalah untuk menghindari kekosongan kekuasaan dalam organisasi Fraksi PAN MPR sisa masa jabatan 2019-2024.

Bagi Jon Erizal menjadi Ketua Fraksi PAN MPR RI adalah penghargaan dan kepercayaan yang harus diemban dengan baik. Meski tampak ringan, namun sesungguhnya tugas-tugasnya sebagai

Ketua Fraksi PAN di MPR sangat urgen, menyangkut masalah berbangsa dan bernegara. Terutama terkait dengan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Yaitu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Menjadikan Empat Pilar hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita bukan hanya di bibir saja, dan itulah pekerjaan rumah kita sebagai bangsa dan negara. Sejauh ini pekerjaan tersebut belum selesai, terbukti masih ada penistaan agama, masih banyak saling fitnah, adu domba, hingga saling benci dan curiga mencurigai,” ungkap Jon Erizal lagi.

Kalau semua sudah memahami dan menerapkan Empat Pilar, kata Jon, tentu akan tercapai ketetapan. Ibaratnya berlayar dengan kapal besar bernama NKRI melaju dengan tenang, karena seluruh penumpangnya tahu arah dan tujuan yang hendak capai.

Sebagai politisi, Jon Erizal tidak pernah memaksakan diri bisa terjun ke dunia politik praktis, seperti yang dia jalani saat ini. Dia mengaku, keikutsertaannya dalam perahu PAN karena ajakan koleganya. Ajakan itu diterima oleh Jon Erizal, karena dia menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan tidak bisa lepas dari urusan politik.

Sebelum menekuni politik praktis, kandidat Doktor di Universitas Brawijaya ini dikenal sebagai seorang profesional. Berbagai perusahaan dan per-bank-an pernah digeluti. Erizal sempat mencapai posisi direktur pada salah satu bank swasta nasional. Ia juga pernah bergerak di bidang usaha perminyakan dan gas dengan jabatan Direktur Utama pada PT. Arthindo Utama yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Semua jabatan itu dia jalani setelah merampungkan pendidikan tinggi di Universitas Jayabaya.

Salah satu yang membuat Jon memilih jalur politik, meski harus meninggalkan bisnis serta usaha yang sudah membesarkan namanya, karena alasan kemanfaatan. Menurut Jon, keterlibatan dalam dunia politik bisa berdampak sangat luas. Karena itu, dalam karier politiknya yang belum terlalu lama, Jon Erizal pernah juga mencicipi panasnya persaingan menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada 2013.





FOTO-FOTO:ISTIMEWA

Tinggal di Jakarta

Jon Erizal adalah satu dari sedikit generasi Riau yang beruntung. Meski lahir dan besar Kampung Parit Bangkung, Bengkalis, tetapi alumni SMP Negeri I Bengkalis ini sudah sering pulang pergi Jakarta-Riau. Padahal, waktu itu ia harus menempuh perjalanan panjang selama 24 jam menggunakan perahu menuju Pekanbaru, sebelum akhirnya terbang dengan pesawat ke Jakarta.

"Ibu tidak kerasan berlama-lama tinggal di Jakarta. Praktis beliau sering bolak-balik Jakarta-Riau, karena ayah bekerja di Jakarta. Beberapa kali dalam setahun saya ikut menyertai ibu dalam perjalanan tersebut," cerita Jon Erizal.

Memiliki ayah yang tinggal berjauhan dengan keluarganya membuat Jon Erizal bisa mandiri lebih cepat dari usianya. Jon yang merupakan putera pasangan Muhammad Yatim Awal (ayah) dan Torlina (ibu) memiliki empat anak, hasil pernikahannya dengan Rita Benny Latief.

Jon Erizal menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 8

pada 1974, dan SMP Negeri 1 pada 1977 di kampung halamannya, Bengkalis. Sedangkan pendidikan SMA di Jakarta. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Jakarta. Jon meraih gelar S-1 pada 1987, dan lima tahun kemudian, 2012, ia berhasil meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini ia tengah berjuang meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya. □

MBO

Biodata

H. Jon Erizal, SE., MBA

Tempat/Tg lahir : Bengkalis, Riau, 30 Desember 1961
 Istri : Rita Benny Latief
 Anak : 1. Vasthi Juwita Permata Erizal
 2. Azura Fidya Kirana Erizal
 3. Vania Madina Erizal
 4. Bangga Alam Pradana Erizal

ORGANISASI:

- Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bengkalis Riau, Jakarta
- Ketua Yayasan Masjid Cut Mutiah, Jakarta
- Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat
- Bendahara Umum DPP PAN
- Ketua Fraksi PAN MPR RI

RIWAYAT PEKERJAAN:

- Direktur Utama PT. Arthindo Utama.
- Komisaris PT. Arthasia Cipta Pratama



Menyibak **Kebenaran** Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Ketua DPD RI kedua, Irman Gusman, bersama para pengurus KAHMI di Jakarta, Selasa (27/4/2021). Dalam kesempatan itu, Bamsot menerima buku 'Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman.'

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menerima buku 'Menyibak Kebenaran. Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman' yang ditulis Pitan Daslani. Berisi laporan pandangan mata seorang wartawan yang menggunakan optik jurnalisme dan hak asasi manusia dalam merangkum berbagai peristiwa dan jejak langkah, serta gagasan orisinal dari seorang tokoh yang memegang amanah sebagai Ketua DPD RI ke-2, Irman Gusman. Buku ke-3 dari

Gusman sampai menggarisbawahi bahwa di Indonesia masih terjadi perselingkungan antara hukum dan politik. Perselingkungan itulah yang menurut Irman membawa dirinya dalam drama spektakuler hingga menjatuhkannya dari kursi Ketua DPD RI.

"Buku ini juga memuat renungan Irman Gusman mengenai berbagai kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil, sehingga menyebabkan jurang kesenjangan sosial semakin lebar.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

serial eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman tersebut rencananya akan diluncurkan pada 20 Mei 2021, di Jakarta.

"Para generasi muda, khususnya yang berminat di bidang hukum patut mendalaminya. Sehingga bisa dijadikan sebagai bahan kajian akademik untuk studi kasus dan pembelajaran seputar mekanisme penegakan hukum," ujar Bamsot usai menerima Ketua DPD RI ke-2 Irman Gusman, bersama pengurus KAHMI, di Jakarta, Selasa (27/4/21).

Para pengurus KAHMI yang hadir, antara lain: Sekretaris Jenderal Manimbang Kahariady, Wakil Sekjen KAHMI Sabaruddin, dan para pengurus lainnya, seperti Muslikh dan Rudi Gani.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam buku tersebut terlihat berbagai kegelisahan Irman Gusman terhadap berbagai upaya penegakan hukum yang seringkali dinilai menyimpang dari asas, norma, prosedur, dan aturan hukum yang berlaku. Bahkan Irman

Buku ini juga menjadi gambaran bahwa sekalipun badannya Irman Gusman berada dalam tahanan, namun pikirannya tetap terbang bebas. Tak heran jika selama dalam tahanan, ia melahirkan banyak ide dan gagasan," jelas Bamsot.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menerangkan, setelah bebas, sosok Irman Gusman tetap diterima dengan hangat di berbagai kalangan. Ia termasuk tokoh yang menyukseskan pencalonan La Nyalla Mattalitti menjadi Ketua DPR RI. Ia juga menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden KH Maruf Amin. Bahkan juga aktif mengisi webinar yang dilakukan berbagai komunitas.

"Setiap orang punya catatan dan sejarah masa lalunya masing-masing. Terpenting adalah bisa mengambil hikmah. Berbagai hal yang terjadi di masa lalu, adalah pelajaran berharga dalam menghadapi masa depan," pungkas Bamsot. □

Pustaka Akademik di Gunung Jati

MPR dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) menjalin kerjasama di bidang perpustakaan. Melalui kerjasama ini mahasiswa UGJ bisa mengakses koleksi Perpustakaan MPR.

PULUHAN mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan pada Kamis, 8 April 2021, memenuhi Auditorium Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Kota Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran mereka di sana untuk mengikuti rangkaian acara 'Pustaka Akademik', seperti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan bedah skripsi yang berjudul 'Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota DPRD dalam Menyatakan Pendapat di Media Sosial (Penelitian di DPRD Kabupaten Cirebon)'.

Hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan UGJ itu, Kabiro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., Ketua YPSGJ Dadang Sukandar Kasidin, Rektor UGJ Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Wakil Rektor I Dr. H. Jaja, Wakil Rektor IV Siti Khumayah, SE., SH., MSi., dan Kepala Perpustakaan MPR Yusniar, SH.

Dalam sambutannya, Mukarto mengucapkan terima kasih kepada MPR yang telah memilih kampusnya sebagai tempat untuk menggelar acara 'Pustaka Akademik'. Dia menyebut, perpustakaan merupakan jantung atau denyut nadi dari perguruan tinggi. "Di perpustakaan terselenggara pendidikan dan pembelajaran," tuturnya seraya menyatakan, "Pembelajaran di perpustakaan digelar sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi."

Lebih lanjut Mukarto mengatakan, bagusnya perpustakaan ditandai dengan beragam dan banyaknya koleksi buku, majalah, koran, serta sumber ilmu lainnya, baik cetak maupun elektronik. "Perpustakaan yang memiliki koleksi yang lengkap akan menjadi pemacu kemajuan", katanya.

Kepada semua peserta yang hadir dalam acara itu, Mukarto menjelsakan, UGJ juga barusan membangun perpustakaan. Gedung perpustakaan yang berada di samping auditorium kampus itu memiliki lima lantai. "Kami berusaha terus untuk memfasilitas civitas akademika untuk belajar, mencari referensi yang diperlukan selama mereka menempuh studi di UGJ", ujarnya. Perpustakaan, menurut Mukarto, merupakan tempat untuk belajar, penelitian, dan bentuk pengabdian. Oleh karena itu, "Kami akan terus mengembangkan perpustakaan UGJ", tambahnya. Tak hanya itu, rektorat juga mendorong mahasiswa, dosen, dan masyarakat untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan yang ada sebaik-baiknya.

Upaya itu dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan dan memaksimalkan fungsi perpustakaan. "Acara Pusataka Akademik yang digelar hari ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi perpustakaan", ujarnya. Untuk itu, kerja sama yang telah ditandatangani pada hari itu, lewat MoU dan MoA, adalah kolaborasi yang akan banyak manfaatnya.

Dengan adanya kerja sama antara MPR dan UGJ, lewat kerja sama dalam bidang perpustakaan, menurut Mukarto, akan membuat mahasiswa UGJ akan semakin mudah mencari referensi bila mereka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hendak membuat skripsi atau tugas ilmiah lainnya. "Sekarang mahasiswa UGJ tak hanya bisa mengakses koleksi di perpustakaan kampus, namun juga bisa mengakses koleksi Perpustakaan MPR", ujarnya. Dengan terbukanya Perpustakaan MPR bagi mahasiswa UGJ, khususnya fakultas hukum, akan membantu menambah perbendaharaan buku.

Mukarto berharap, kerja sama tak berhenti di hari itu namun bisa berlanjut terus di kemudian hari. "Tidak berhenti setelah MoU dan MoA, namun juga berlanjut pada aktivitas lainnya", harapnya.

Siti Fauziah dalam sambutan menuturkan, MPR bangga bisa mengadakan kegiatan 'Pustaka Akademik' di Cirebon. "Saya senang panitia bisa menggelar acara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya membatasi jumlah peserta", ujarnya.

Dikatakan, kegiatan 'Pustaka Akademik' telah digelar dengan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. "Kita berharap, kegiatan ini mempunyai daya guna dan bermanfaat bagi civitas akademika perguruan tinggi dan masyarakat", tuturnya. Dia merasa gembira ketika mendengar UGJ memiliki perpustakaan yang besar dengan 5 lantai.

Kedatangan tim dari MPR, menurut perempuan dari Bandung, Jawa Barat, itu tidak sekadar melakukan MoU, MoA, dan bedah skripsi, namun juga membawa buku-buku terbitan MPR. Buku terbitan MPR, menurut perempuan yang akrab disapa Bu Titik itu, sangat istimewa. "Buku-buku terbitan MPR tidak dijual sehingga tidak ada di toko-toko buku", ungkapnya.

Selanjutnya, Siti Fauziah menjelaskan, Perpustakaan MPR sangat terbuka untuk umum. Dia mempersilahkan mahasiswa dan dosen berkunjung ke Perpustakaan MPR, baik secara perorangan atau berkelompok. "Bila ke Jakarta mampirilah ke MPR, tidak hanya mencari buku namun juga bisa melihat perpustakaan yang ada", ujarnya. Dia berharap, kerja sama MPR dan UGJ bisa terjalin semakin erat. □

AWG

Oleh:
Lestari Moerdijat, SS., MM.
Wakil Ketua MPR RI



Perlu Keteladanan untuk Bangun Karakter Bangsa

DI ERA GLOBALISASI di mana dunia tanpa batas dan penyebaran nilai-nilai yang bersumber dari berbagai belahan dunia sangat masif masuk hingga ruang-ruang pribadi warga masyarakat, membutuhkan penyeimbang, antara lain dalam bentuk pemahaman atas nilai-nilai kebangsaan yang sudah kita miliki dan sepakati sejak negeri ini berdiri.

Nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, gotong-royong, cinta tanah air, hingga musyawarah untuk mufakat telah diwariskan para pendiri bangsa kepada anak bangsa, antara lain lewat empat konsensus kebangsaan yang kita kenal dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, disadari atau tidak untuk menanamkan nilai-nilai di dalam empat konsensus kebangsaan tersebut kepada masyarakat luas seringkali menghadapi kendala, sehingga pemahaman nilai-nilai dari luar sangat masif masuk lebih dalam di benak anak bangsa.

Peristiwa terkini memperlihatkan anak negeri yang terbilang berusia muda terpapar nilai-nilai dari luar secara radikal. Serangan bom bunuh diri di lingkungan tempat ibadah dan menerobos Markas Besar Kepolisian dengan menembakkan senjata, merupakan realitas dari kuatnya keyakinan terhadap nilai-nilai asing itu.

Dengan keyakinannya tersebut kelompok masyarakat yang masuk kelompok usia milenial itu rela menukar nyawa dengan keyakinannya itu. Dari sudut pandang pembangunan karakter bangsa, peristiwa tersebut merupakan alarm kewaspadaan yang harus direspon secara serius oleh para pemangku kepentingan di negeri ini.

Karena, salah satu tantangan terbesar bangsa ini di masa depan adalah bahaya laten radikalisme dan terorisme yang mencabik persatuan dan kesatuan. Harus segera disepakati dan dilaksanakan pola-pola pembentukan karakter anak bangsa, sehingga bisa memagari mereka dari paparan paham asing yang jauh dari nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa.

Keteladanan dalam pelaksanaan nilai-nilai warisan dari para pendiri bangsa harus dimulai dari lingkungan keluarga, seperti

antara lain sikap toleransi, saling menghormati dalam keberagaman dan menghormati kemanusiaan. Selain itu, sikap para tokoh masyarakat dan pejabat publik dalam aktivitas kesehariannya pun harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bagaimana seharusnya kita berperilaku.

Sosok lainnya yang layak dijadikan teladan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di ranah publik adalah sosok seorang pahlawan. Pengenalan lebih dalam nilai-nilai tersebut lewat berbagai teladan yang dihadirkan di ranah publik merupakan salah satu cara bagi masyarakat agar mudah memahami dan mempraktikkannya.

Sejumlah langkah tersebut merupakan cara yang bisa dilakukan dalam upaya penanaman karakter kepada anak bangsa. Membangun karakter bangsa lewat membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang diperkenalkan para pahlawan merupakan ikhtiar besar menjaga bangunan sejarah bangsa, sekaligus menjadi pesan bagi generasi penerus bangsa bahwa sebagai Indonesia kita memiliki warisan luhur berupa identitas manusia Indonesia yang tangguh, sarat teladan dalam perilaku.

Pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang paling intens salah satunya memang terjadi di masa perjuangan saat bangsa ini merebut kemerdekaan dari para penjajah. Hampir di setiap daerah di Nusantara ini memiliki pahlawan dalam catatan sejarahnya. Keterlibatan aktif putera-puteri daerah dan dukungan politik dari para pemangku kepentingan dalam ikut menggali nilai-nilai yang diperkenalkan para pahlawan merupakan keharusan untuk memperkuat bangunan kebangsaan kita, yang dihimpun dari nilai-nilai yang dibawa para pendahulu bangsa ini.

Kita tidak boleh melepaskan sejarah dari kerangka pikir kebangsaan. Sejarah merupakan lintasan waktu dan peristiwa yang membentuk jati diri kita di masa kini, dan modal menjawab tantangan ke depan. Jika keketeladanan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang diamanatkan lewat empat konsensus kebangsaan bisa didapatkan di lingkungan keluarga, kehidupan di masyarakat serta diwujudkan oleh para pemangku kepentingan, diharapkan bisa memperkuat bangunan karakter kebangsaan seluruh warga bangsa. □